

**Hamidah Abdurrachman**

**-hak Korban KDR**

# Hak-hak Korban KDRT dalam Putusan Hakim



## Badan Penerbit

**Universitas Pancasakti Tegal (Anggota IKAPI)**

**ISBN : 978-602-73169-8-0**



## **Hak-hak Korban KDRT dalam Putusan Hakim**

**Penulis:** Hamidah Abdurrachman

**ISBN :** 978-602-73169-8-0

**Editor :** Hamidah Abdurrachman

**Penata Letak :** M. Agus Shidiq

**Desain Sampul:** @mahardika

Copyright © Pancasakti Press, 2017

x, 165 hlm, 14,8 x 21 cm

Cetakan Pertama, Oktober 2017

Diterbitkan oleh

**Badan Penerbit Universitas Pancasakti Tegal**

Jl. Halmahera Km. 1 Kota Tegal

Email: lppmupstegal@gmail.com

Dicetak dan Didistribusikan oleh

**Mahardika@comp**

Email : agus.upstegal@gmail.com

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, PASAL 72

# Kata Pengantar

## Rektor Universitas Pancasakti Tegal

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Saya menyambut baik dan apresiasi pada penulis atas penerbitan buku yang mengangkat masalah yang cukup aktual dan masih terus terjadi dalam masyarakat yaitu tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kehidupan rumah tangga adalah dalam konteks menegakkan syariat Islam, menuju ridho Allah Swt. Suami dan istri harus saling melengkapi dan bekerja sama dalam membangun rumah tangga yang harmonis menuju derajat takwa. Allah SWT berfirman: *"Dan orang-orang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."* (Qs. at-Taubah [9]: 71).

Dalam konteks rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan memang seringkali terjadi, baik yang menimpa istri, anak-anak, pembantu rumah tangga, dan orang-orang yang berada dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan ini bisa terjadi karena berbagai sebab, seperti masalah ekonomi, sosial, bahkan karena pihak ketiga. Semua bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu



pada dasarnya harus dikenai sanksi karena merupakan bentuk kriminalitas (*jarimah*).

Harapan saya buku ini menjadi inspirasi bagi Dosen di lingkungan Universitas Pancasakti untuk menulis dan menulis baik paper maupun buku sehingga dapat meningkatkan kualitas Dosen secara pribadi maupun kelnrbagaan.

Tegal, Oktober 2017

Prof. Dr. Wahyono

# Kata Pengantar

## Penulis

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Lahirnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT) merupakan buah perjuangan berbagai kalangan yang peduli dengan masalah kekerasan terhadap perempuan yang tergabung dalam Jangka PKTP atau Jaringan Kerja Advokasi Kebijakan Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan. Melalui Rapat Paripurna DPR-RI pada tanggal 13 Mei 2003 memutuskan membahas RUU Anti KDRT ke dalam Bamus DPR. Setelah melalui proses panjang akhirnya RUU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disahkan oleh paripurna DPR RI pada tanggal 14 Oktober 2004 menjadi undang-undang.

Dengan disahkannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka siapapun warga negara Indonesia akan mendapatkan perlindungan secara hukum dari segala tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, baik itu fisik, psikis, seksual dan ekonomi. Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan bentuk tanggung jawab Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi beberapa konvensi internasional tentang perempuan, seperti Anggota Konvensi CEDAW (*Convention on the Elimination of All forms of Discrimination against women*) atau Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984.



Idealnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga –terutama perempuan- dari segala bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan yang dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan antara lain menyangkut persepsi penegak hukum yang masih menganggap KDRT merupakan urusan privat sehingga proses penegakan hukum menjadi tidak maksimal. Padahal kehadiran UU PKDRT dapat menjadi perangkat hukum yang memadai, yang didalamnya mengatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku KDRT, dengan tetap menjaga keutuhan demi keharmonisan keluarga. Dengan demikian, KDRT bukan lagi menjadi sesuatu yang dianggap privat tetapi sudah menjadi isu publik, maka dalam penanganannya diharapkan dapat dilakukan secara proporsional sebagai bentuk perlindungan terhadap korban dan penanganan terhadap pelaku.

Disisi lain perlindungan terhadap korban KDRT terabaikan. Kalau aparat penegak hukum melakukan penegakan hukum maka kedudukan korban hanya sebatas saksi belaka, dan penderitaan yang dia alami tidak mendapat respon yang memadai dari penegak hukum. Dalam penelitian yang penulis lakukan yaitu tentang PERLINDUNGAN KORBAN KDRT DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA, yang penulis fokuskan pada hak-hak korban KDRT dalam putusan Hakim, hak-hak



korban belum terpenuhi. Akibatnya putusan Hakim hanya menghukum pelaku saja.

Harapan penulis buku ini dapat menjadi bacaan di kalangan akademisi, mahasiswa dan masyarakat sebagai bahan untuk lebih menyempurnakan UU-PKDRT dimasa yang akan datang khususnya memberikan pelayanan bagi hak-hak korban KDRT.

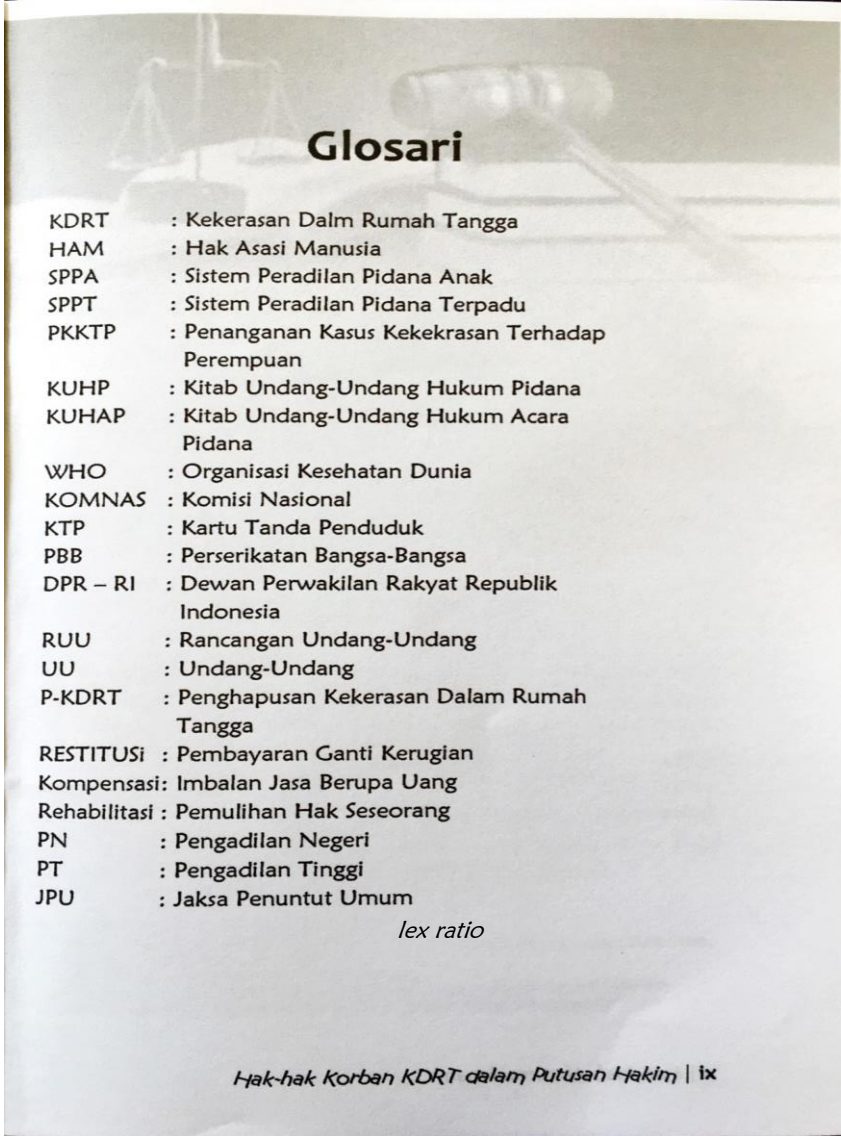
Wassalam

Penulis

# Daftar Isi

Kata Pengantar Rektor UPS Tegal .....	iii
Kata Pengantar Penulis .....	v
Daftar Isi .....	viii
Glosari .....	ix
<b>BAB 1 PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN</b> .....	1
<b>BAB 2 HUKUM PERLINDUNGAN KORBAN</b> .....	21
A. Kejijakan Hukum Pidana .....	21
B. Viktimologi .....	21
<b>BAB 3 HAK-HAK KORBAN KDRT DALAM PUTUSAN HAKIM</b> .....	42
A. Memahami Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga .....	63
B. Kendala Pelaksanaan Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga .....	75
C. Hak-hak Korban KDRT .....	85
D. Adakah Hak-hak Korban KDRT dalam Putusan Hakim .....	101
<b>BAB 4 PROSPEK PERLINDUNGAN KORBAN DI MASA YANG AKAN DATANG</b> .....	133
A. Penal Law Reform .....	133
B. Upaya Perbaikan Sistem Peradilan .....	143
Daftar Pustaka .....	157
Tentang Penulis .....	163
Sinopsis .....	165





## Glosari

KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
HAM	: Hak Asasi Manusia
SPPA	: Sistem Peradilan Pidana Anak
SPPT	: Sistem Peradilan Pidana Terpadu
PKKTP	: Penanganan Kasus Kekekrasan Terhadap Perempuan
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
WHO	: Organisasi Kesehatan Dunia
KOMNAS	: Komisi Nasional
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
DPR – RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
RUU	: Rancangan Undang-Undang
UU	: Undang-Undang
P-KDRT	: Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
RESTITUSI	: Pembayaran Ganti Kerugian
Kompensasi	: Imbalan Jasa Berupa Uang
Rehabilitasi	: Pemulihan Hak Seseorang
PN	: Pengadilan Negeri
PT	: Pengadilan Tinggi
JPU	: Jaksa Penuntut Umum

*lex ratio*



# Perspektif Hukum dan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan

BAB

1

*summa insita in natur quae jubet ea,  
qual facienda sunt, prohibetque contraria*

hukum merupakan nalar tertinggi, yang melekat dalam alam, yang memerintahkan apayang harus dilakukan dan melarang yang sebaliknya

- Cicero

Romli Atmasasmita mengingatkan, “sejak peradaban masa lampau sampai dengan tingkat peradaban masyarakat masa kini, penegakkan hukum sering dirumuskan sebagai menegakkan keadilan dan menjauhi ketidakadilan”<sup>1</sup> Senada dengan pandangan diatas, Komariah E. Sapardjaja<sup>2</sup> mempertanyakan: untuk siapakah hukum itu? Siapakah yang menjadi *adressat* dari hukum pidana? Apakah si pelanggar atau juga penegak hukum dalam lalu lintas penegakkan hukum?

---

<sup>1</sup> Romli Atmasasmita, *Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Binacipta, Jakarta, 1997, halaman 27.

<sup>2</sup> Komariah E. Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, halaman 1.



Aristoteles sejak lama telah mengingatkan suatu negara yang baik adalah yang diatur oleh hukum, negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan kedaulatan hukum<sup>3</sup>. Terhadap hal ini Socrates mengingatkan negara bukanlah suatu organisasi yang didirikan manusia untuk kepentingan pribadinya melainkan merupakan suatu susunan yang obyektif yang didasarkan kepada sifat hakikat manusia. Oleh karena itu negara berkewajiban untuk melaksanakan dan menerapkan hukum dan keadilan sesuai dengan kesadaran hukum dan rasa keadilan setiap orang<sup>4</sup>.

Berkaitan dengan konsep hukum negara atau pemerintahan itulah Cicero yang mengutip Chrysippus mengatakan: *lex ratio summa insita in natura, quae jubet ea, qual facienda sunt, prohibetque contraria* (hukum merupakan nalar tertinggi, yang melekat dalam alam, yang memerintahkan apa yang harus dilakukan dan melarang yang sebaliknya)<sup>5</sup>. Dengan demikian negara atau pemerintah (dalam arti luas) harus menjamin tertib hukum, menjamin tegaknya hukum dan menjamin tercapainya tujuan hukum. Tertib hukum (*rechtsorde*) di sini adalah suatu kekuasaan negara yang didasarkan pada hukum dan keadaan

---

<sup>3</sup> Nukthoh Afrawie Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005, halaman 14.

<sup>4</sup> Muchtar Affandi, *Ilmu-ilmu Kenegaraan Suatu Studi Perbandingan*, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, UNPAD, Bandung, 1982, halaman 156.

<sup>5</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, halaman 36.



masyarakat yang sesuai dengan hukum yang berlaku<sup>6</sup>. Diantara berbagai cabang hokum yang ada, Hukum Pidana menjadi adressat yang kuat dalam menjamin tegaknya hokum dan tercapainya tujuan hokum melalui norma dan sanksi yang dimiliki hokum pidana. Meskipun seperti telah dicatat dalam sejarah bahwa praktek hukum pidana itu hingga akhir abad delapan belas telah dipengaruhi oleh ide pembalasan yang secara bersama-sama dengan usaha menakut-nakuti menjadi tujuan dari penghukuman.

Para ahli mazhab hukum alam menganggap perlu untuk memberikan dasar penghukuman, yang oleh *de Groot* dikatakan untuk menjawab pertanyaan mengapa seseorang menundukkan dirinya pada hukum sebagai akibat dari tindakannya telah mendasarkan dirinya pada syarat ilmiah, barang siapa yang telah melakukan sesuatu yang jahat, haruslah ia menderita karena sesuatu yang jahat pula. Dengan demikian hukuman dipandang sebagai “*mallum passionis, quod infligitur propter malum actionis*”. Selain *Rousseau* yang mencari dasar membenaran pidana pada *contrat social*, lalu *Hebart*, dengan teori *Pembalasan Aestetis*, Kant dengan *Kategorischen Imperativ* melengkapi teori absolute yang menghendaki setiap perbuatan melanggar hukum yang telah terjadi mendapat pembalasan<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Adytia Bakti, Bandung, halaman 2.

<sup>7</sup> P.A.F. Lamintang, D.Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek van Het Nederlanches Strafrecht)*, Pionir Jaya, Bandung, 1992, hlm 9-10). Lihat juga Sofyan Sastrawijaya, *Hukum Pidana, Asas Hukum Pidana Sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Amrico, Bandung, 1995, hlm.22-28. Hal .yang sama dibahas pula Pontang

Tujuan untuk semata-mata memberikan pembalasan inilah yang kemudian dalam proses tujuan pemidanaan lebih terfokus pada pelaku kejahatan.

Perkembangan yang cukup menarik adalah ketika kemudian lahir dan berkembang teori-teori tentang dasar penghukuman seperti *afschrikkingstheorieën* dari Filangieri dan Gmelin, juga *theorie van de psychologische dwang* dari Anselm von Feurbach<sup>8</sup>. Oleh teori ini tekanan diletakkan pada ancaman hukumannya yang harus memberi tekanan psikologis terhadap maksud orang yang dapat menjurus dilakukannya kejahatan.

Dari teori ini Feurbach menurunkan tiga buah asas dasar yang sangat terkenal yaitu *nulla poena sine lege*, *nulla poena sine crimine* dan *nullum crimen sine lege poenali* serta teori yang menghubungkan hukuman dengan pencegahan yang bersifat khusus ditinjau dari segi pelakunya; juga lahirnya **teori relatif** yang beranggapan hukuman harus memiliki kegunaan bagi masyarakat dari Von Liszt yang menunjukkan kegunaan penghukuman adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan hidup manusia yang diakui oleh hukum yang harus dianggap sebagai kepentingan hukum. Untuk dapat melaksanakan tugasnya, hukum telah memberi norma-norma berupa larangan dan keharusan yang wajib dipelihara oleh negara. Bagi Von Liszt ancaman

---

Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, halaman 71-75.

<sup>8</sup> Lamintang dan Simons, *Ibid*, halaman 12-13.



hukuman mempunyai pengaruh yang bersifat mengingatkan dan menakut-nakuti, hukuman itu berlaku untuk setiap anggota masyarakat, untuk kepentingan dari pihak yang dirugikan yang berusaha untuk memulihkan kerugiannya itu dan ditinjau dari sudut si pelaku yaitu untuk menakut-nakuti, untuk memperbaiki atau untuk membuat ia tidak berbahaya.

Pada perkembangan berikutnya lahir teori gabungan yang meletakkan pembenaran pidana dari dua teori sebelumnya yaitu teori absolute dan teori relative, melihat sebab pidana bukan hanya penderitaan tetapi juga harus seimbang dengan kejahatannya<sup>9</sup>.

Menurut Muladi apabila dikaitkan dengan hakekat tujuan pemidanaan maka yang pertama-tama harus dihayati adalah pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak tindak pidana. Atas dasar kerangka pemikiran sosiologis ideologis maka tindak pidana harus dipandang sebagai gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan baik yang bersifat individual maupun yang bersifat sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Dalam kerangka ini maka tujuan pemidanaan harus

---

<sup>9</sup> Sofyan Sastrawijaya, *Op-cit*, halaman 30.

berorientasi pada pandangan yang *integratif*<sup>10</sup>, yang terdiri dari dari seperangkat tujuan pemidanaan: *pertama* adalah perangkat tujuan pemidanaan tersebut harus harus sedikit banyak menampung aspirasi masyarakat yang menuntut pembalasan; *kedua*, perangkat tujuan pemidanaan tersebut harus tercakup pula tujuan pemidanaan berupa memelihara solidaritas masyarakat.

Secara mendasar pemidanaan berhubungan erat dengan *subjectieve strafrecht (ius puniendi)* yaitu hak atau wewenang untuk menentukan dan menjatuhkan pidana terhadap *objectieve strafrecht (ius poenale)* sebagai peraturan hukum positif yang merupakan hukum pidana<sup>11</sup>.

Nampaknya hingga sekarang sudah diterima umum, subjek hukum satu-satunya yang mempunyai *ius puniendi* ialah negara, dan hal ini menurut Pontang Moerad<sup>12</sup> bukan masalah lagi meskipun terhadap alasan pembenaran *ius puniendi* tersebut diserahkan kepada negara masih banyak pendapat yang berbeda. Seperti yang dikemukakan oleh tokoh Teori Kedaulatan Negara (*Staats Souverainity*) George Jellinek yang menyatakan hukum adalah penjelmaan daripada

---

<sup>10</sup> Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, Semarang, Universitas Diponegoro, 1990, halaman 10-11.

<sup>11</sup> Wirjono Prdjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 1967, halaman 22.

<sup>12</sup> Pontang Moerad, *Op-cit*, halaman 54.



kemauan negara, negara satu-satunya sumber hukum, oleh sebab itu kekuasaan tertinggi harus dimiliki negara<sup>13</sup>.

Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri dalam perjalanan sejarah panjang pemidanaan, fokus perhatian masih pada si pelaku atau pelanggar hukum. Meskipun sedikit disinggung dalam teori relatif yang ternyata telah merespon kepentingan orang yang dirugikan namun masalah korban kejahatan baru benar-benar mendapat perhatian setelah lahirnya viktimologi<sup>14</sup> yang secara khusus mempelajari tentang korban kejahatan.

Benjamin Mendelsohn dianggap sebagai orang yang pertama kali menggunakan istilah *victimology* melalui artikelnya *New-Bio/psycho-Social Horizon: victimology* sebagai *applied science* bagi hukum pidana dan kriminologi yang terus berkembang yang kemudian melahirkan *special viktimology* yang khusus mempelajari korban kejahatan dan *new victimology* yang mengkaji korban yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan kekuasaan dan HAM.

Meskipun timbul polemik tentang kedudukan Viktimologi sebagai ilmu yang mandiri atau hanya sebagai bagian

---

<sup>13</sup> Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, halaman 71.

<sup>14</sup> Muladi, *Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, artikel dalam buku Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1997, hlm 175; Lihat juga Mardjono Reksodiputro, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, tulisan dalam buku *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Univ.Indonesia, Jakarta, 1994, halaman 103.

dari Kriminologi namun studi tentang korban ini telah banyak membantu pemahaman tentang Sistem peradilan pidana khususnya dari perspektif korban<sup>15</sup>, sehingga secara keseluruhan viktimologi bertujuan untuk menganalisis a) pelbagai aspek yang berkaitan dengan korban, b) berusaha memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi, dan c) mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia<sup>16</sup>.

Munculnya perhatian terhadap korban dapat dikatakan sebagai reaksi perimbangan terhadap perhatian yang selama ini selalu ditujukan kepada pelaku kejahatan, padahal bagaimanapun pertumbuhan dan perkembangan kejahatan tidak dapat dilepaskan dari korban sebagai pihak yang mengalami kerugian atas terjadinya kejahatan.

Secara khusus masalah korban menjadi perhatian dalam Kongres PBB ke-7 tahun 1985 di Milan dengan topik “*New Dimension of Criminality and Crime Prevention in The Context of Development*” dan “*Victim of Crime*” yang pada intinya membahas berbagai upaya dalam rangka pemulihan, perlindungan korban dan pencegahan terjadinya korban. Pada 15 Desember 1985, kemudian Sidang Umum PBB telah menerima resolusi tentang *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*” (Resolusi No.40/34).

---

<sup>15</sup> Mardjono Reksodiputro, *Ibid.*

<sup>16</sup> Muladi, *op-cit.*, halaman 175.



Barda Nawawi Arief menegaskan sebenarnya masalah perlindungan HAM dan perlindungan korban merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama, keduanya tidak bisa dipisahkan. Mengutip pendapat Zvonimir-Paul Separovic: “*the rights of the victim are a component part of the concept of human rights*”<sup>17</sup>. (Hak-hak korban adalah bagian dari konsep hak asasi manusia). Dari pendapat ini dapat dikatakan hak-hak korban adalah bagian dari hak asasi manusia, yang seperti dikatakan Scott Davidson bersifat kodrati inheren, tidak dapat dicabut, dimiliki oleh individu semata-mata karena mereka manusia dan bukan karena mereka adalah kawula hukum suatu negara, sehingga perlindungan terbaik terhadap hak-hak asasi terdapat dalam kerangka demokratis dan batas-batas pelaksanaan hak tersebut hanya dapat ditetapkan atau dicabut dengan undang-undang<sup>18</sup>.

Hal ini sesuai dengan pendapat dari kaum positivis bahwa hak asasi manusia hanya ditemukan dalam pelaksanaan sistem hukum beserta sanksi yang mengikutinya<sup>19</sup>. Berlainan dengan hal ini, Janusz mengutip Jerome, melihat dari sisi filosofis sebenarnya Hak Asasi Manusia merupakan

---

<sup>17</sup> Dalam bukunya *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, halaman 49.

<sup>18</sup> Scott Davidson, *Human Rights*, Open University Press, Buckingham, diterjemahkan oleh A. Hadyana Pudjaatmaka, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994, halaman 7.

<sup>19</sup> Janusz Symonides, *Human Rights: concept and standards*, UNESCO Publishing, 2000, halaman 17.

seperangkat prinsip-prinsip moral dan justifikasi-fikasinya terletak pada bidang filosofi moral<sup>20</sup>. James W Nickel nampaknya sepaham dengan pendapat Janusz dan secara tegas menyebutkan hak asasi manusia merupakan hak moral. Sebagai hak moral, HAM dapat dipilah menjadi: hak-hak yang eksis di dalam moralitas yang sesungguhnya (*actual moralities*); hak-hak yang eksis sebagai bangunan teoritis di dalam moralitas kritis atau yang telah dijustifikasi (*critical or justified moralities*) dan hak-hak moral yang dijustifikasi (*justified moral rights*) .

Dengan demikian perlindungan terhadap hak-hak korban harus menjadi sebuah asas yang layak diperhatikan dan sebagai suatu asas menjadi hal yang penting seperti dikatakan Romli Atmasasmita:

“unsur mutlak dalam hukum adalah asas atau kaedah; kekuatan jiwa hukum terletak pada dua unsur tersebut. Asas hukum merupakan jantung pertahanan hidup hukum dalam masyarakat. Semakin dipertahankan asas hukum, semakin kuat dan bermakna kehidupan dan pelaksanaan hukum dalam masyarakat, sebaliknya semakin diingkari penegakkan asas hukum pidana terhadap perbuatan yang merugikan atau membahayakan anggota masyarakat, dan semakin ditinggalkan atau

---

<sup>20</sup> James W. Nickel (*Making Sense of Human Rights, Refleksi Filosofis Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, halaman 55-5



diabaikan asas hukum pidana dalam praktik, hukum pidana seakan hidup tak mau matipun enggan<sup>21</sup>.

Kekerasan terhadap perempuan menjadi sebuah issue yang hangat didunia, bahkan WHO merilis pernyataan, satu dari tiga perempuan di dunia mengalami kekerasan atau pelecehan seksual, Kepala WHO Margaret Chan mengatakan kekerasan terhadap perempuan adalah "masalah kesehatan global yang sudah menjadi epidemi". Data yang dirilis WHO tentang kekerasan terhadap perempuan menunjukkan gambaran sebagaimana diuraikan berikut:

- kekerasan yang dilakukan pasangan merupakan kasus pelecehan yang paling umum terjadi, mempengaruhi 30% perempuan di dunia.
- 38% pembunuhan perempuan, dilakukan oleh pasangannya.
- korban serangan seksual dan kekerasan (yang dilakukan bukan oleh pasangan) akan mengalami depresi dan kegelisahan 2,6 kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang tidak mengalami kekerasan.
- korban pelecehan (dengan pelaku pasangan sendiri) mengalami depresi dan kegelisahan dua kali lebih besar.

---

<sup>21</sup> Romli Atmasasmita, *Artikel Terobosan Dalam Hukum*, Pikiran Rakyat, 29 Juli 1997,halaman 2.

- korban cenderung memiliki masalah dengan alkohol, aborsi, dan penyakit yang dibawa dalam hubungan seksual, dan HIV.

Data tentang KDRT di Indonesia, seperti yang disampaikan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) terus meningkat dari tahun ke tahun. Dalam Lembar Fakta Catatan Tahunan 2016 dari 321.752 jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol sama seperti tahun sebelumnya adalah kekerasan yang terjadi di ranah personal. Sebanyak 11.207 kasus di ranah KDRT/RP, 60% atau 6.725 kasus berupa Kekerasan terhadap istri, 24% atau 2.734 kasus kekerasan dalam pacaran, dan 8% atau 930 kasus Kekerasan terhadap anak perempuan. Komnas Perempuan kemudian membagi persoalan KtP menjadi tiga ranah, yakni ranah personal, ranah komunitas, dan ranah negara.

Berdasarkan jumlah kasus yang telah diterima dan diolah, sebanyak 321.752 jenis kasus KtP yang paling menonjol ialah kekerasan yang terjadi di ranah personal. Oleh karena itu, terjadi kenaikan data kasus kekerasan seksual yang dilaporkan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di tahun 2015, kekerasan seksual berada pada tingkat ketiga. Namun di tahun 2016 berada di peringkat kedua, yaitu dalam bentuk perkosaan sebanyak 72% atau 2.399 kasus. Sedangkan dalam bentuk pencabulan sebanyak 18% atau 601 kasus, dan pelecehan seksual sebesar 5% atau 166 kasus. Peningkatan angka sangat tinggi terjadi antara tahun 2011-2012 yang mencapai hingga 35%. Di tahun 2015 jumlah

kasus kekerasan kembali meningkat sebesar 9% dari tahun 2014.

Amnesti Internasional dalam laporan tahun 2013 menilai kekerasan terhadap perempuan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling komprehensif dan mendunia. Mereka juga menyebut kasus itu sebagai skandal pelanggaran HAM terbesar di dunia. PBB memberikan respon positif dalam sebuah pernyataan terkait perempuan mengatakan, "70 persen perempuan dalam hidupnya menghadapi kekerasan fisik atau mental oleh laki-laki. Oleh karena itu, pada tahun 2009, PBB memutuskan untuk membentuk jaringan internasional memerangi kekerasan terhadap perempuan."

Deklarasi Universal Majelis Umum PBB tentang perempuan menyatakan bahwa segala bentuk kekerasan terhadap perempuan menghambat peluang mereka untuk mencapai kesetaraan hukum, sosial, politik dan ekonomi dalam masyarakat. Deklarasi ini menegaskan kembali bahwa istilah kekerasan terhadap perempuan akan mengacu pada tindakan yang membahayakan fisik, seksual atau psikologis, baik dalam kehidupan publik atau pribadi. Pada dasarnya, segala bentuk kekerasan mulai dari fisik hingga intimidasi, pelecehan, dan penghinaan atau bahkan melarang mereka berpartisipasi dalam lingkungan sosial, dikategorikan sebagai kekerasan terhadap perempuan.

Bentuk-bentuk kekerasan itu mungkin saja terjadi di berbagai lingkungan sosial, termasuk lingkungan keluarga, tempat



kerja, lembaga pendidikan dan atau bahkan secara lebih tampak dan terorganisir dalam perdagangan perempuan atau pemaksaan menjual diri. Selain itu, pemerintah mungkin juga terlibat dalam kekerasan terhadap perempuan melalui perang dan konflik bersenjata atau melalui undang-undang diskriminatif dan keras<sup>22</sup>.

Meski adanya deklarasi universal, berbagai konvensi, dan juga usaha beberapa organisasi internasional untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan, namun hingga sekarang kekerasan terhadap perempuan masih terjadi. Para peneliti Barat berdasarkan statistik dan dokumen, telah sering mengakui kondisi tragis dan memilukan perempuan di Barat. Saat ini perdagangan perempuan, persepsi perempuan sebagai instrumen, dan krisis runtuhnya rumah tangga, termasuk masalah paling serius di tengah masyarakat Barat. Perdagangan perempuan menunjukkan bukti lain atas sebuah fakta bahwa saat ini perempuan di Barat tidak diperlakukan layaknya manusia. Sungguh ironis bahwa kekerasan seksual di Barat, merupakan ancaman serius bagi perempuan Barat.

Berbagai laporan menyebutkan bahwa tingkat kekerasan terhadap perempuan di Amerika Serikat menempati peringkat pertama. Di negara maju itu, wanita yang berpendapatan rendah, paling rentan terhadap kekerasan di tengah keluarga dan pelecehan seksual. Anehnya, kurang dari 5 persen pelaku kekerasan terhadap perempuan dinyatakan bersalah dan hanya 3 persen dari mereka mendekam di penjara. Dengan

---

<sup>22</sup> [mediaindonesia.com/index.php/.../pbb...kekerasan-terhadap-perempuan.../2016-03-1...](http://mediaindonesia.com/index.php/.../pbb...kekerasan-terhadap-perempuan.../2016-03-1...)

kata lain, 15 dari 16 pelaku kekerasan terhadap perempuan divonis bebas.

Menurut laporan PBB pada tahun 2010, 40 persen remaja putri AS mengalami kekerasan fisik dan mental yang dilakukan pacarnya. Masalah itu di Barat mengindikasikan penurunan usia kekerasan terhadap perempuan. Di militer AS, sepertiga serdadu perempuan juga menjadi korban pelecehan seksual. Senator AS dari Negara Bagian Missouri, Claire McCaskill mengatakan, "Pada tahun lalu terjadi sekitar 3.000 kasus serangan seksual terhadap serdadu perempuan AS. Orang tua mereka secara sadar mengizinkan putri-putrinya untuk menghadapi bahaya di medan perang, namun hal yang tidak bisa diterima bahwa putri-putri mereka berada di lingkungan yang tidak sehat. Dengan kata lain, serdadu perempuan AS menghadapi bahaya di lingkungan militer."

Masyarakat Eropa dengan segudang klaimnya untuk membela hak-hak perempuan, juga tidak mampu menjaga perempuan terhadap pelecehan-pelecehan di tengah masyarakat. Jumlah perempuan dalam sebuah keluarga Eropa yang mengalami kekerasan fisik dan mental, sangat mengkhawatirkan. Di Inggris ada banyak kasus kekerasan terhadap perempuan. Peningkatan eksploitasi wanita telah menjadi masalah serius bagi masyarakat Inggris. Di negara pemuja HAM itu, hampir setiap menit, wanita menghubungi polisi karena berada dalam bahaya akibat kekerasan di keluarga.

Di Bahrain, kaum perempuan yang berpartisipasi dalam kebangkitan Islam di negara itu harus menanggung penindasan dan pelecehan terburuk. Pelecehan seksual terhadap perempuan Bahrain oleh tentara Arab Saudi di penjara-penjara rezim Al Khalifa, adalah bukti penindasan itu. Aktivis HAM Bahrain, Yahya Al Hadid membeberkan dokumen-dokumen akurat tentang kekerasan terhadap perempuan Bahrain selama revolusi. Dikatakannya, "Setelah revolusi dan kebangkitan Islam di Bahrain, perempuan menerima pelecehan seksual dan kekerasan fisik. Selain itu, dokter dan perawat perempuan juga dikurung di tempat kerjanya dan menghadapi kekerasan fisik dan mental. "

Di Arab Saudi, kondisi perempuan sangat memilukan. Mereka dianggap strata kedua dan tidak dapat menikmati hak-hak paling mendasar. Perempuan Saudi dilarang berpartisipasi dalam berbagai bidang sosial dan politik dan bahkan hak untuk mengemudi kendaraan. Perempuan Saudi dapat disebut sebagai korban terbesar atas persekutuan Riyadh dengan Washington, sehingga masyarakat internasional tidak dapat mengambil langkah-langkah serius untuk memperbaiki keadaan mereka.

Berdasarkan sejumlah laporan, lebih dari separuh perempuan yang telah menikah di India pernah mengalami kekerasan fisik. Riset lainnya menunjukkan bahwa lebih dari 30 persen perempuan tersebut terancam mendapat kekerasan seksual. Menurut laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang tengah berusaha keras memerangi kekerasan berumah tangga, kekerasan terhadap istri dan pemaksaan seksual

termasuk kekerasan yang biasa dialami kaum hawa. Misalnya menurut data terbaru yang dirilis WHO, di Ethiopia, angka kekerasan dalam rumah tangga menembus angka di atas 71 persen. Biasanya perempuan yang mendapat perlakuan keras mengalami stres, gangguan dalam makanan serta permasalahan lainnya. Sementara korban kekerasan rumah tangga di Cina 90 persennya adalah kaum perempuan. Menurut laporan Federasi Wanita Cina (CWF), dari tiga perempuan di negara ini, salah satunya menjadi korban kekerasan berumah tangga.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan kekerasan fisik dan seksual terhadap perempuan telah mencapai tingkat epidemi, mempengaruhi lebih dari sepertiga perempuan secara global.

Sebuah penelitian yang diluncurkan oleh WHO menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan bersifat meluas dan merasuk, menembus wilayah yang berbeda-beda dan semua tingkat pendapatan dalam masyarakat. Studi tersebut menemukan bahwa satu dari tiga perempuan di dunia akan mengalami kekerasan fisik atau seksual dalam hidupnya oleh seseorang yang ia kenal, bisa suami, pacar, anggota keluarga atau teman. Laporan itu mengatakan bahwa perempuan segala umur, tua atau muda, rentan terhadap kekerasan. WHO menyebut kekerasan terhadap perempuan itu merupakan masalah kesehatan global dengan



tingkat epidemi<sup>23</sup>. Dalam sebuah analisis statistik pembunuhan internasional, studi tersebut menemukan bahwa suami atau pasangan dekat bertanggung jawab dari 38 persen pembunuhan perempuan di dunia.

Claudia Garcia-Moreno, kepala spesialis gender, hak reproduksi, kesehatan seksual dan remaja di WHO yang juga salah satu penyusun laporan tersebut, mengatakan kekerasan fisik dan seksual terhadap perempuan sangat berdampak pada kesehatan perempuan. Ia mengatakan 42 persen perempuan yang dipukuli pasangannya mengalami luka-luka. Dampak perempuan yang mengalami kekerasan fisik atau seksual berisiko dua kali lebih tinggi untuk mengalami depresi atau bermasalah dengan penggunaan alkohol dibandingkan mereka yang tidak pernah mengalami kekerasan. Perempuan ini juga dua kali lebih mungkin mengalami aborsi. Risiko mendapatkan infeksi menular seksual dan HIV naik satu atau satu setengah kali lipat, dan mereka juga lebih berisiko melahirkan bayi-bayi berberat badan rendah. Studi ini merupakan penelitian sistematis pertama atas data global mengalami prevalensi kekerasan terhadap perempuan oleh pasangan dekat atau non-pasangan. WHO, bekerja sama dengan London School of Hygiene & Tropical Medicine dan Dewan Riset Medis Afrika Selatan, mengumpulkan data dari 81 negara pada 2010.

---

<sup>23</sup> <https://www.voaindonesia.com/a/who-kekerasan-terhadap-perempuan.../1686309.htm...>

Studi tersebut menemukan bahwa daerah yang paling terkena dampaknya adalah Asia Tenggara, wilayah Mediterania timur dan Afrika, dengan persentase kekerasan terhadap perempuan oleh pasangan intim sekitar 37 persen. Untuk kekerasan yang dilakukan oleh kombinasi pasangan dekat dan kekerasan seksual non-pasangan, data menunjukkan Afrika memiliki rekor terburuk pada 45,6 persen, diikuti Asia Tenggara, dengan 40,2 persen. Namun laporan tersebut menghilangkan anggapan bahwa kekerasan adalah masalah negara berkembang, dengan menunjukkan bahwa 32,7 persen kekerasan fisik dan seksual terhadap perempuan terjadi di negara-negara berpendapatan tinggi.

KDRT merupakan masalah yang cukup menarik untuk diteliti mengingat angka KDRT yang dilaporkan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Komisi Nasional (Komnas) Perempuan memaparkan catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan menunjukkan peningkatan jumlah kasus secara konsisten dan signifikan.

KDRT merupakan suatu batasan yang mengacu pada kekerasan yang terjadi pada lokus atau wilayah keluarga yang dalam pengertian luas siapapun yang dikategorikan sebagai anggota keluarga dapat menjadi pelaku atau korban

KDRT<sup>24</sup>. Senada dengan hal ini, Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (*gender-based violence*) yang berakibat atau mungkin kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Keluarga bukanlah sekedar kelompok kecil yang menggambarkan adanya kedekatan hubungan yang terbangun baik di antara individu yang tinggal bersama ataupun karena interaksi yang berbasis intensitas frekuensi diantara mereka. Keluarga terkait dengan relasi keberlanjutan yang terbangun karena hubungan darah, perkawinan, ataupun adopsi. Hubungan suami isteri yang berlangsung dalam rumah tangga dilandasi dilandasi oleh lembaga perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga yang bahagia. Dasar perkawinan adalah saling cinta mencintai, saling menghargai, saling membantu dan bertanggung jawab. Kedudukan suami isteri menurut Undang-Undang Perkawinan adalah seimbang sehingga masing-masing pihak tidak diizinkan saling mengekang, menghalangi satu sama lain

---

<sup>24</sup> Klein and White, *Family Theories, second Edition. United State of America: Sage Publication, Inc.* 2002 seperti dikutip Erni Agustini, *Metode Reflexive Self sebagai Metodologi Penelitian Feminis pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Tesis Program Pasca Sarjana Program Studi Kajian Wanita, UI, 2006, halaman 47

dalam kehidupan rumah tangga maupun sosial<sup>25</sup>. Konstruksi keluarga dalam bentuk ideal, minimal terdiri atas suami, isteri dan anak-anak yang diikat secara lahir batin dalam sebuah perkawinan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Pasangan suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Suasana seperti ini menunjukkan ada relasi personal yang intim ini lebih bersifat altruistik dan ketergantungan satu sama lain cukup tinggi di antara pasangan suami isteri. KDRT memiliki keunikan dan kekhasan karena kejahatan ini terjadi dalam lingkup rumah tangga dan berlangsung dalam hubungan personal yang intim, yaitu antara suami dan isteri, orang tua dan anak, atau antara anak dengan anak atau dengan orang yang bekerja di lingkup rumah tangga yang tinggal menetap. Hal yang sangat spesifik dari KDRT justru terletak pada relasi personal yang intim antara pelaku dan korban, yang sejatinya memiliki hubungan emosional yang sangat dekat. Kekhasan relasi ini yang kemudian menyebabkan terjadinya bisa persepsi dalam penanganan KDRT, baik oleh penegak hukum maupun masyarakat. Dalam kenyataannya, seringkali kejahatan ini terjadi tanpa saksi karena berlangsung dalam sebuah interrelasi yang sangat intim.

---

<sup>25</sup> Mr. Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, Cetakan Kedua, 2007, halaman 31



Lahirnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan buah perjuangan berbagai kalangan yang peduli dengan masalah kekerasan terhadap perempuan yang tergabung dalam Jangka PKTP atau Jaringan Kerja Advokasi Kebijakan Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan. Melalui Rapat Paripurna DPR-RI pada tanggal 13 Mei 2003 memutuskan membahas RUU Anti KDRT ke dalam Bamus DPR. Setelah melalui proses panjang akhirnya RUU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disahkan oleh paripurna DPR RI pada tanggal 14 Oktober 2004 menjadi undang-undang.

Dengan disahkannya RUU ini menjadi UU maka siapapun warga negara Indonesia akan mendapatkan perlindungan secara hukum dari segala tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, baik itu fisik, psikis, seksual dan ekonomi. Dalam pandangan umum hampir semua fraksi menyatakan bahwa UU Penghapusan KDRT ini sangat dibutuhkan untuk mencegah, menangani dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Bermula dari desakan aktivis perempuan, legislasi Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan bentuk tanggung jawab Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi beberapa konvensi internasional tentang perempuan, seperti Anggota Konvensi CEDAW (*Convention on the Elimination of All forms of Discrimination against women*) atau Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk

Diskriminasi Terhadap Perempuan melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984. Sebagai konsekuensi dari ratifikasi ini Indonesia harus melakukan:

1. Pembentukan hukum dan atau harmonisasi hukum sesuai kaidah hukum yang terdapat dalam konvensi tersebut. Kewajiban ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundangan atau membuat perundangan baru berdasarkan konvensi yang telah diratifikasi.
2. Penegakan hukum mengenai hak-hak perempuan melalui pengadilan nasional dan lembaga pemerintah lainnya.

Undang-undang P-KDRT memiliki nilai strategis bagi upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan, yaitu: **pertama**, dengan diundangkannya UU P-KDRT akan menggeser isu KDRT dari isu privat menjadi isu publik. Dengan demikian diharapkan dapat meruntuhkan hambatan psikologis korban untuk mengungkapkan kekerasan yang diderita dengan tanpa dihantui perasaan bersalah karena telah membuka aib. **Kedua**, UU KDRT akan memberi ruang kepada negara untuk melakukan intervensi terhadap kejahatan yang terjadi di dalam rumah sehingga negara dapat melakukan perlindungan lebih optimal terhadap warga negara yang membutuhkan perlindungan khusus (perempuan dan anak) dari tindak kekerasan. **Ketiga**, U P-KDRT akan berpengaruh pada percepatan perwujudan kebijakan toleransi nol kekerasan terhadap perempuan yang digulirkan pemerintah beberapa tahun lalu.

Dengan kehadiran UU P-KDRT tersebut diharapkan proses perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dilaksanakan oleh seluruh aparat penegak hukum. Komariah E Sapardjaja<sup>26</sup> melihat sampai saat ini penegakkan hukum dalam kasus-kasus KDRT masih sangat lemah karena kebijakan hukum pidana masih berorientasi pada si pelaku sehingga sistem peradilan pidana tidak berpihak pada perempuan sebagai korban apalagi peraturan perlindungan korban dan saksi tidak berjalan. Kasus selesai ketika pelaku di jatuhi hukuman sedangkan hak-hak korban tidak mendapatkan perhatian karena ketiadaan peraturan.

Namun paling tidak dengan kehadiran UU-PKDRT telah terjadi pergeseran pandangan masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan, yang semula hanya menyangkut urusan keluarga menjadi urusan negara. Lebih dari itu kekerasan terhadap perempuan juga dipandang bukan hanya persoalan yuridis belaka namun di belakangnya ada suatu spirit yang besar, berkaitan dengan perlindungan HAM<sup>27</sup>.

---

<sup>26</sup> Makalah “Tantangan di Indonesia” disampaikan dalam diskusi publik tentang Impunitas dan Kejahatan Kemanusiaan, di Hotel Syahid, Jakarta, 10 Mei 2006.

<sup>27</sup> *Ibid*, halaman 62





## A. Kebijakan Hukum Pidana dan Politik Hukum Pidana

Kebijakan pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana yang salah satu pilarnya adalah pembedaan, di samping pilar yang lain yaitu subyek dan perbuatan (tindakan). Apabila dilihat lagi lebih jauh, kebijakan hukum pidana sendiri merupakan bagian dari kebijakan kriminal dan merupakan bagian integral dari kebijakan sosial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “kebijakan” didefinisikan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak<sup>28</sup>. Istilah asing sebagai padanan dari kata “kebijakan” adalah “*policy*”, yaitu “*the general principles*

---

<sup>28</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua cet. Keempat, Balai Pustaka, Jakarta, halaman 442

*by which a government is guided in its management of public affairs on the legislature in its measures*"<sup>29</sup>.

Penggunaan kata kebijakan atau *policy* bisanya diikuti oleh kata lain, seperti kebijakan publik (*public policy*), kebijakan sosial (*social policy*), dan kebijakan kriminal (*criminal policy*). Menurut Solichin Abdul Wahab, kebijakan publik ialah tindakan (politik) apapun yang diambil oleh pemerintah (pada semua level) dalam menyikapi suatu permasalahan yang terjadi dalam konteks atau lingkungan politiknya<sup>30</sup>. Sedangkan kebijakan sosial adalah kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan (*welfare*) baik dalam arti luas, yang menyangkut kualitas kehidupan manusia, maupun dalam arti sempit, yang menunjuk pada beberapa jenis pemberian pelayanan kolektif tertentu guna melindungi kesejahteraan rakyat<sup>31</sup>.

Menurut Sudarto, kebijakan kriminal yang disebut juga dengan politik kriminal (*criminal policy*) adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan<sup>32</sup>. Menurut Barda Nawawi

---

<sup>29</sup> Bryan A. Garner, ed *Black's Law Dictionary*, St. Paul, Minn, 1999, hlm, 1157

<sup>30</sup> Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, halaman 38

<sup>31</sup> Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2005, halaman 10

<sup>32</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, halaman 38

Arief, definisi ini diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*”.<sup>33</sup>

Menurut Sudarto ada 3 (tiga) arti mengenai kebijakan kriminal yaitu :<sup>34</sup>

1. dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk diantaranya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan bahan-bahan resmi, yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.

Menurut G.P. Hoefnagels, kebijakan hukum merupakan bagian tidak terpisahkan (*integral*) dari kebijakan sosial (*social policy*); atau dengan kata lain, kebijakan sosial mencakup di dalamnya kebijakan hukum, yang selengkapnyanya dikatakan kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan sosial (*social policy*)

---

<sup>33</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, halaman 24.

<sup>34</sup> halaman *Ibid*,

menurut Barda Nawawi Arief, adalah segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi dalam pengertian “*social policy*” sekaligus tercakup di dalamnya “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”. G.P. Hoefnagels menyebutkan, kebijakan hukum atau kebijakan penegakkan hukum (*law enforcement policy*) ini meliputi juga kebijakan penang-gulangan kejahatan (*criminal policy/politik kriminal*). Hoefnagels mendefinisikan *criminal policy* sebagai *the rational organization of social reaction to crime*. Beberapa ilustrasi tentang *criminal policy* juga diberikan oleh Hoefnagels, seperti : (a) *criminal policy is the science of responses*; (b) *Criminal policy is the science of crime prevention*; (c) *Criminal policy is a policy of designating human behavior of crime*; (d) *Criminal policy is a rational total of responses to crime*.<sup>35</sup>

Berkaitan dengan istilah *criminal policy* yang dapat diartikan sebagai politik hokum, menurut Sudarto<sup>36</sup> meliputi usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat; dan kebijakan dari Negara melalui badan-badan

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, halaman 30

<sup>36</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Penerbit: Sinar-Baru, Bandung, tanpa tahun, halaman 93-94



yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicitak-citakan. Apabila dikaitkan dengan politik hukum yang lebih luas menurut Mahfud MD, politik hukum merupakan kebijaksanaan hukum (*legal policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah.<sup>36</sup>

Menurut A.Mulder, bahwa “*strafrechts politiek*” ialah garis kebijakan untuk menentukan:

1. seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui;
2. apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
3. cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dijalankan.<sup>37</sup>

Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian ini terlihat pula dalam definisi “*penal policy*” dari Marc Ancel sebagai “suatu ilmu sekaligus seni yang

---

<sup>36</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 1998, halaman 7-9

<sup>37</sup> *Ibid*, halaman 25-26.

bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik”. Dengan demikian yang dimaksud dengan “peraturan hukum positif” (*the positif rulers*) dalam definisinya Marce Ancel adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana. Sehingga istilah “*penal policy*” menurut Marce Ancel adalah sama dengan istilah “kebijakan atau politik hukum pidana”.

Definisi Mulder di atas berawal dari pengertian “sistem hukum pidana” menurut Marc Ancel yang menyatakan bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari :

- a. Peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya;
- b. Suatu prosedur hukum pidana, dan;
- c. Suatu mekanisme pelaksanaan (pidana).<sup>38</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan politik hukum nasional adalah pernyataan kehendak masyarakat melalui mekanisme kenegaraan, dalam penentuan kebijakan hukum yang berlaku sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pemerintah dan negara yang telah dan akan dilaksanakan dalam suatu pemerintahan. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi

---

<sup>38</sup> *Ibid*, halaman 153

kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.

## B. Sistem Peradilan Pidana

### a. Pengertian dan ruang lingkup sistem peradilan pidana

Istilah sistem dalam sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) sudah terkandung makna keterpaduan (*integration/coordination*), serta *fixed control arrangement* (tertata). Beberapa pakar memberi pengertian sistem sebagai berikut. Shrode William A and Voich, sistem ialah *whole compound of several parts*, Elias M. Awad, sistem ialah “*an organized group of components/subsystem linked together according to a plan to achieve a specific objective; an organized, functioning relationship among units or components*”. Johnson, Kast, Rosenzweig, mengartikan sistem ialah suatu kebulatan/keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, atau suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan yang utuh.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Tatang M. Arifin, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, Rajawali Press, Jakarta, 1992, halaman 10

Lili Rasjidi mengatakan system adalah suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi (proses). Masing-masing elemen terikat dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung sehingga membentuk satu kesatuan yang lebih besar<sup>40</sup>.

Sistem peradilan pidana atau *criminal justice system*, kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Tentang hal tersebut di atas Remington dan Ohlin menjelaskan:

*“Criminal Justice system dapat diartikan sebagai penggunaan pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan*

---

<sup>40</sup> Dalam bukunya Hukum Sebagai Suatu Sistem, Mandar Maju, Bandung, 2003, halaman 65

cara efisiensi untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.<sup>41</sup>

Mardjono Reksodipoetro mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah:

Sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi persoalan kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Untuk itu, tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumsukan : (1) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan (2) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan (3) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>42</sup>

Agar tujuan sistem peradilan pidana dapat tercapai, maka empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan

---

<sup>41</sup> Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada kejahatan dan penegakan hokum dalam batas-batas toleransi*, Pidato Pengukuhan penerimaan Jabatan Guru Besar tetap dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, halaman 1

<sup>42</sup> *Ibid.*, halaman 84-85

lembaga permasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu “*integrated criminal justice system*”. Apabila keterpaduan dalam bekerja sama tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian sebagai berikut :

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing interaksi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana); dan
3. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.<sup>43</sup>

Sistem peradilan pidana dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana akan melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri, bekerja dalam kerangka sistematis yaitu tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Sudarto mengatakan:

---

<sup>43</sup> *Ibid*, halaman 86



“Instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnyanya. Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memberi peringatan pada orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka pengadilan. Ini semua adalah bagian-bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut “*crime control*” suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.<sup>44</sup>

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum

---

<sup>44</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung , 1981, halaman 121.

pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian, apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Demikian pula dalam kelembagaan yang bersifat struktural harus ada konsistensi terhadap pandangan, sikap dan bahkan falsafah yang mendasari sistem peradilan pidana. Idiologi yang sering disebut “model” ini harus tegas-tegas dinyatakan.<sup>45</sup>

Menurut W.A. Shroda dan D. Voich, “Sistem mempunyai dua pengertian yang penting. *Pertama*, sistem sebagai jenis satuan yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu ini menunjukkan kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian. *Kedua*, sistem sebagai suatu rencana, metode atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu.”<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, halaman 4.

<sup>46</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 48

Wagiono Ismangil mengatakan, sistem merupakan suatu kesatuan usaha yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan (interrelated) satu sama lain yang berusaha mencapai suatu tujuan dalam suatu lingkungan yang kompleks”.<sup>47</sup>

Peradilan pidana sebagai suatu sistem (*criminal justice system*), merupakan suatu rangkaian proses untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam mencapai tujuannya, sub-sub sistem yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan saling berhubungan dan bekerja bersama. Adanya hubungan dan kerjasama antar sub-sub sistem menunjukkan adanya suatu pengertian dasar sebagai berikut:

1. Sistem itu berorientasi pada tujuan.
2. Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagiannya.
3. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, yakni lingkungannya (keterbukaan sistem).
4. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga (transformasi).

---

<sup>47</sup> Wagiono Ismangil, *Pendekatan Sistem dalam Management Organisasi*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Univ. Indonesia, Jakarta, 1984, halaman 5

5. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (keterhubungan).
6. Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (mekanisme kontrol).

Menurut Sudarto pentingnya kesatuan proses dalam setiap sistem peradilan pidana adalah citra kesatuan dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana. Hal itu harus merupakan benang sutera yang menelusuri segala fase dari pemeriksaan perkara pidana sejak awal pemeriksaan pendahuluan (penyidikan), sampai akhir proses (pelaksanaan pemidanaan), bahkan sesudah selesainya perjalanan pidana oleh narapidana.<sup>48</sup>

Lebih tegasnya dijelaskan oleh Muladi, bahwa makna *intergrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

1. Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
2. Sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horisontal dalam kaitannya dengan hukum positif.

---

<sup>48</sup> Sudarto, *Uraian Pokok-Pokok Permasalahan Dalam Seminar Kriminologi ke IV*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1980, halaman 14.

3. Sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam maghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistim peradilan pidana.<sup>49</sup>

Dalam sistim peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan, yaitu: pendekatan normatif, administratif dan sosial. *Lebih* lanjut menurut Romli Atmasasmita, ciri pendekatan sistim dalam peradilan pidana, ialah :

1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan);
2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana;
3. Efektifitas sistim penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara;
4. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan “*The administration of justice*”<sup>50</sup>

## **b. Komponen Sistem Peradilan Pidana**

---

<sup>49</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Bina Cipta, Bandung, 1996, halaman 17.

<sup>50</sup> *Ibid*

Penegakan hukum yang baik ialah apabila sistem peradilan pidana bekerja secara obyektif dan tidak memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Seperti yang pernah dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro dalam pelaksanaan Peradilan Pidana, semua pihak yang terlibat harus mengarah pada apa yang disebut sebagai proses hukum yang adil dan layak<sup>51</sup>.

Mardjono Reksodiputro, memakai istilah ini sebagai terjemahan dari *“due process of law”*, yang tidak saja melihat penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara secara formal belaka namun mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak yang dipunyai warga masyarakat sekalipun ia adalah pelaku kejahatan. Seseorang yang telah melakukan kejahatan tidak kehilangan hak-haknya sebagai manusia.

Implementasinya paling tidak terdapat sepuluh asas yang melindungi hak-hak individu dalam diberlakukannya proses hukum yang adil dan layak ini, yaitu:

1. Perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi

---

<sup>51</sup> Mardjono Reksodiputro *Bunga Rampai Permasalahan,...Op. Cit*, halaman 8-9



2. Asas Praduga tak bersalah
3. Pelanggaran atas hak-hak individu warganegara (dalam hal penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada Undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah.
4. Seseorang tersangka berhak diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan atas dirinya.
5. Berhak mendapat bantuan penasihat hukum.
6. Seorang terdakwa hadir di muka pengadilan.
7. Adanya peradilan yang bebas, dan dilakukan dengan cepat serta sederhana.
8. Peradilan harus terbuka untuk umum.
9. Tersangka maupun terdakwa berhak memperoleh kompensasi dan rehabilitasi.
10. Adalah kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak tersebut ialah sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang menghormati hak-hak warga masyarakat. Walaupun dalam kenyataan praktik peradilan pidana, asas

tersebut hanya merupakan retorika belaka dan bukanlah sebuah realita.<sup>52</sup>

Pelaksanaan dan penegakan terhadap hak-hak individu ini sangat berkaitan dengan design prosedur, sistem peradilan pidana yang telah ditata dalam KUHAP. Sistem ini telah terbagi dalam 3 tahap, yaitu: (a) tahap pra adjudikasi, (b) tahap sidang pengadilan atau tahap adjudikasi dan (c) tahap purna adjudikasi.

Pandangan di atas, menggambarkan bahwa terdapat komponen dalam penegakkan hukum sebagai suatu sistem yaitu adanya substansi hukum yang baik serta peran serta kultur hukum. Namun demikian, dalam penegakan hukum (pidana) yang baik ialah apabila sistem peradilan pidana bekerja secara obyektif dan tidak bersifat memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap setiap kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparaturnya penegak hukum.

Dalam konteks penegakan hukum yang memerlukan pendekatan sistim, terdapat hubungan pengaruh timbal balik yang signifikan antara per-

---

<sup>52</sup> *Ibid*, halaman 6

kembangan kejahatan yang bersifat multidimensi dan kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparaturnya penegak hukum. Sedangkan dalam sistem peradilan pidana yang lazim, selalu melibatkan dan mencakup sub-sistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana sebagai berikut :

1. Kepolisian, dengan tugas utama: menerima laporan dan pengeduan dari publik namakala terjadi tindak pidana; melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; melakukan penyingkapan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan; melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana;
2. Kejaksaan dengan tugas pokok: menyaring kasus-kasus yang layak diajukan ke pengadilan; mempersiapkan berkas penuntutan; melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan;
3. Pengadilan yang berkewajiban untuk: menegakan hukum dan keadilan; melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana; melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif; memberikan putusan yang adil dan berdasar hukum; dan menyediakan area publik untuk persidangan sehingga public

dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan di tingkat ini;

4. Lembaga pemasyarakatan, yang berfungsi untuk: menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan; memastikan terlindunginya hak-hak narapidana; menjaga agar kondisi LP memadai untuk menjalankan pidana setiap narapidana; melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana; mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat;
5. Pengacara/Advokat, dengan fungsi: melakukan pembelaan bagi klien; dan menjaga agar hak-hak klien dipenuhi dalam proses peradilan pidana.

Di Indonesia yang mendasari sub sistem-sub sistem sebagaimana diatas, dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka peradilan pidana Indonesia didasarkan pada undang-undang tersebut, yang prosesnya dibagi dalam empat bagian, yaitu: Tahap pertama adalah proses pemeriksaan pendahuluan, meliputi penyelidikan dan penyidikan dilanjutkan dengan penangkapan dan penahanan, penggeledahan atau penyitaan. Tahap kedua, adalah penuntunan dan tahap ketiga pemeriksaan di sidang pengadilan, serta keempat adalah proses pelaksanaan putusan pengadilan. Namun ada pula yang membagi

proses tersebut dalam 2 bagian, yaitu pemeriksaan penyidikan atau pemeriksaan pendahuluan atau pemeriksaan sebelum di depan persidangan pengadilan dan pemeriksaan di depan persidangan pengadilan yang berakhir dengan putusan hakim.

### c. Teori Hukum Acara Pidana

Menurut Bambang Poernomo, mempelajari dan menetapkan suatu teori dalam hukum acara pidana tidak dapat terlepas dari sistem hukum atau tata hukum yang berlaku dalam masyarakat termasuk perubahan-perubahan mengenai struktur, substansi dan kultur hukumnya. Selanjutnya teori dalam hukum acara pidana terkait dengan kesadaran hukum yang akan menentukan sikap kepatuhan terhadap pelaksanaan hukum yang berlaku<sup>53</sup>.

Dengan demikian, hukum pidana berhubungan erat dengan hukum acara pidana, oleh karena hukum acara pidana merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana Polisi, Jaksa, Hakim, dan Pengacara juga rakyat harus bertindak menerapkan hukum pidana. Jika suatu perbuatan seseorang menurut hukum pidana merupakan suatu

---

<sup>53</sup> Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakkan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1993, halaman 34-35

perbuatan yang melanggar hukum pidana, maka bagaimana cara penyidikan, pemberkasan penuntutannya, bagaimana cara mengadilinya serta bagaimana cara menjatuhkan putusan terhadap seseorang yang dianggap telah melakukan perbuatan pidana. Dengan kata lain hukum acara pidana ialah suatu rangkaian peraturan yang mengatur mengenai hal-hal bagaimana penerapan hukum pidana tersebut.<sup>54</sup>

Dengan alasan keterkaitan di atas, maka hukum acara pidana harus integral antara teori hukum dengan praktek hukum dan kesadaran masyarakat, landasan pola perilaku bagi para petugas pelaksana penegak hukum dan para pihak yang berkepentingan dalam penerapan hukum pidana harus berdasarkan keterpaduan antara teori paksaan (*dwang theorie*) dan teori persetujuan (*consensus theorie*).<sup>55</sup>

Teori paksaan dan teori persetujuan sebagai landasan hukum, maka hukum acara pidana menjadi sarana (instrumen) untuk mengendalikan masyarakat dan sekaligus penggerak sosial (*social engineering by law*) sesuai dengan tujuan hidup bermasyarakat. Teori

---

<sup>54</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sumur Bandung, 1985, halaman 21.

<sup>55</sup> Bambang Poernomo, *Op. Cit.*, halaman 35



paksa berhubungan dengan hukum pengendalian sosial yang melibatkan wewenang dan kekuasaan oleh hukum acara pidana yang tujuannya ke arah ketenangan dan ketertiban masyarakat yang terganggu akibat perbuatan melanggar hukum pidana. Teori persetujuan berhubungan dengan hukum untuk perlindungan bagi masyarakat dan sekaligus melindungi manusia sebagai individu yang melibatkan hak asasi manusia yang harus terjamin dalam penerapan hukum pidana, sebagaimana terdapat di dalam tata kaidah yang dideskripsikan berupa rumusan “*rule of law*”.<sup>56</sup>

Berdasarkan kedua teori di atas, maka J de Bosch Kemper mendefinisikan hukum acara pidana yaitu sejumlah asas-asas dan peraturan-peraturan undang-undang yang mengatur wewenang negara untuk menghukum bilamana undang-undang pidana dilanggar.<sup>57</sup> Dari pengertian ini, D Simon menyatakan bahwa hukum acara pidana bertugas mengatur cara-cara negara dengan alat pelengkapanya mempergunakan wewenangnya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, halaman 35

<sup>57</sup> Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Diponegoro, 1991, halaman 2

<sup>58</sup> *Ibid.*

Selanjutnya Sudarto menyatakan bahwa hukum acara pidana ialah aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pihak-pihak atau orang lain yang terlibat di dalamnya, apabila ada persangkaan hukum pidana dilanggarnya.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum acara pidana merupakan hukum formil yang mengatur mengenai cara penerapan hukum pidana materiil. Dengan demikian antara hukum acara pidana dengan hukum pidana saling berhubungan erat. Norma yang diatur dalam hukum acara pidana adalah cara-cara yang harus dilakukan dalam menegakan ketertiban hukum dalam masyarakat, tetapi sekaligus juga bertujuan untuk melindungi hak-hak azasi tiap-tiap individu baik yang menjadi korban maupun orang yang didakwa karena dianggap telah melakukan tindak pidana.

Tujuan hukum acara pidana yaitu untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil. Artinya suatu kebenaran yang lengkap dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu perbuatan hukum pidana, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan

putusan dari Pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.<sup>59</sup>

Hukum Acara Pidana atau yang disebut dengan hukum formil, secara keseluruhan mengatur mengenai:

- a. cara bagaimana negara melalui alat-alat per-lengkapannya menemukan kebenaran tentang terjadinya suatu pelanggaran terhadap hukum pidana;
- b. usaha-usaha yang dijalankan untuk mencari si pelanggar hukum;
- c. tindakan-tindakan yang dijalankan untuk menangkap si pelanggar hukum tersebut dan jika perlu menahannya;
- d. usaha-usaha menyerahkan alat-alat bukti yang dikumpulkan dalam hal mencari kebenaran tersebut di atas dan selanjutnya mengajukan si pelanggar hukum ke sidang Pengadilan;
- e. cara bagaimana hakim menjalankan pemeriksaan terhadap terdakwa di depan sidang Pengadilan dan menjatuhkan putusan tentang

---

<sup>59</sup> Departemen Kehakiman RI, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, 1982, halaman 3.

salah atau tidaknya terdakwa tersebut melakukan tindak pidana yang didakwakan;

- f. upaya-upaya hukum yang dapat dijalankan terhadap putusan hakim;
- g. cara bagaimana putusan hakim tersebut dilaksanakan dan cara pengawasan serta pengamatannya.<sup>60</sup>

Dengan melihat ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka M. Prodjohamidjojo<sup>61</sup>, mengatakan bahwa hukum acara pidana itu menganut beberapa asas yaitu:

- a. Asas persamaan di muka hukum, artinya setiap orang diperlakukan sama dengan tidak membedakan tingkat sosial, golongan, agama, warna kulit, kaya-miskin, dan lain-lainnya dihadapan hukum;
- b. Asas perintah tertulis dari yang berwenang, artinya segala tindakan mengenai penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang berwenang menurut undang-undang;

---

<sup>60</sup> Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana,...Op. Cit.*, halaman 9.

<sup>61</sup> M. Prodjohamidjojo, *Penjelasan Sistematis dalam Bentuk Tanya Jawab KUHAP*, Cahalia Indonesia, Jakarta, 1982, halaman 13

- c. Asas praduga tak bersalah artinya setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan dan dituntut dan atau dihadapkan dimuka Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan tetap;
- d. Asas pemberian ganti rugi dan rehabilitasi atas salah tangkap, salah tahan dan salah tuntutan, mengadili tanpa alasan undang-undang, kekeliruan dalam orang atau kekeliruan dalam penerapan hukum, artinya ganti rugi dan rehabilitasi akan diberikan kepada orang, yang atas kesalahan pejabat penyidikan, para penegak hukum yang melanggar asas hukum tersebut, dan pejabat penyidikan, penegak hukum dikenakan pidana dan atau hukuman administrasi;
- e. Asas memperoleh bantuan hukum seluas-luasnya, artinya bahwa setiap orang wajib diberikan kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum pada tiap tingkatan pemeriksaan, guna kepentingan pembelaan;
- f. Asas wajib diberitahukan dakwaandan dasar hukum dakwaan, serta hak-haknya termasuk hak menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum;

- g. Asas hadirnya terdakwa, artinya pengadilan akan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa dan asas in absentia ditinggalkan;
- h. Asas pemeriksaan di muka umum, artinya khalayak ramai harus diberi kesempatan untuk menyaksikan jalannya pemeriksaan perkara pidana dan meniadakan persangkaan bahwa Hakim akan bertindak tidak adil;
- i. Asas pengawasan pelaksanaan putusan, artinya dalam menjalankan putusan pidana, Ketua Pengadilan Negeri mengawasi jalannya pelaksanaan putusan tersebut.

Dapat disimpulkan hukum acara pidana secara garis besar mempunyai tiga tugas pokok yaitu. *Pertama*, hukum acara pidana merupakan ketentuan hukum untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil. *Kedua*, Hukum acara pidana mengatur mengenai suatu putusan hakim. *Ketiga*, Hukum acara pidana mengatur tentang cara bagaimana setelah adanya putusan hakim. Adapun yang dimaksud dengan kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa karena telah melanggar hukum



pidana, dan selanjut-nya minta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.<sup>62</sup>.

## C. Viktimologi

### 1. Pengertian Viktimologi

Viktimologi secara etimologis, berasal dari kata "*Victim*" ( Latin ) yang berarti korban dan "*Logos*" yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Dengan demikian, viktimologi adalah suatu pengetahuan atau ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang korban. Menurut Separovic, viktimologi merupakan bagian dari kriminologi dan hanya sebagian dari kajian masalah kejahatan., karena yang menjadi objek viktimologi hanyalah korban akibat kejahatan saja. Ruang lingkup inilah yang membedakan antara viktimologi dengan kriminologi, dimana kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Menurut Separovic ( 1985 ), viktimologi dapat dibagi menjadi tiga jenis. Pembagian tersebut adalah sebagai berikut :

---

<sup>62</sup> Suyono Sutarto, *Op. Cit.*, halaman 9

- a. Viktimologi dalam arti sempit. Adalah suatu ilmu pengetahuan empiris yang berkaitan dengan korban dari kejahatan yang dapat dihukum. Viktimologi dalam arti sempit ini disebut juga sebagai viktimologi penal, yang contoh objek kajiannya antara lain meliputi korban pemerkosaan, korban pembunuhan dan korban penculikan;
- b. Viktimologi dalam arti luas. Adalah mencakup keseluruhan ilmu pengetahuan tentang korban pada umumnya. Disebut juga sebagai viktimologi umum yang contoh objek kajiannya antara lain korban dari perbuatan yang dapat dihukum atau kecelakaan, korban dari masyarakat, korban dari negara atau korban dari kelompok yang representatif;
- c. Viktimologi baru. Adalah ilmu pengetahuan tentang korban yang mencakup korban penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM serta korban tindak pidana yang dilakukan oleh kelas yang berkuasa terhadap kelas yang kurang mampu. Namun demikian, yang paling menonjol adalah korban dari pelanggaran HAM.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Mr. W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghlmia Indonesia, Jakarta, 1981, halaman 78

Harus diakui bahwa perkembangan konsep keadilan restoratif tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan (*victimology*), yang dipelopori oleh Von Hentig, seorang ahli kriminologi pada tahun 1941 dan Mendelsohn pada tahun 1947. Perkembangan ini melalui beberapa tahap<sup>64</sup>. *Tahap pertama (Penal Victimology/Interactionist Victimology)* yang melekat pada hukum pidana dan kriminologi melihat korban sebagai par-tisipan dan penyebab terjadinya suatu kejahatan karena kesalahannya, sehingga hal ini merupakan hal yang harus dipertimbangkan dalam pemidanaan pelaku;

*Tahap kedua (General Victimology)* yang berkembang setelah Perang Dunia II (1956), merupakan studi tentang viktimitas dalam rangka untuk mencegah terjadinya korban melalui tindakan pencegahan dan bantuan pada korban (*victim assistance*). Dalam kerangka ini pemahaman korban diperluas mencakup korban- korban kecelakaan, bencana alam dan korban tindakan lain karena kehendak Tuhan. Tahap kedua ini bersifat independen terhadap hukum pidana dan kriminologi, yang tujuannya adalah membantu pemerintah mengurangi penderitaan manusia, termasuk pelanggaran HAM pada masa perang. Dalam hal ini

---

<sup>64</sup> Made Darma Weda, *Beberapa Catatan Tentang Korban Kejahatan Korporasi: Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995, halaman 199

terjadi pergeseran dari *victimology of act* menjadi *victimology of action (applied victimology)*, yang menumbuhkan gerakan advokasi terhadap korban dan pelayanan terhadap korban. Salah satu dampaknya adalah terjadinya manipulasi politik dalam bentuk pemberatan pidana terhadap pelaku (*offender bashing*) demi pelayanan terhadap korban kejahatan;

*Tahap ketiga* berkembang pada tahun 1970-an menandai viktimologi sebagai suatu disiplin penelitian. Hal ini erat kaitannya dengan aktivitas the *World Society of Victimology (WSV)*. Pada tahap ini viktimologi diartikan sebagai suatu studi ilmiah tentang tingkat, hakikat dan kausa viktimisasi kriminal, konsekuensinya terhadap orang-orang yang terlibat dan reaksi yang ditimbulkan melalui masyarakat, khususnya polisi dan sistem peradilan pidana maupun para pekerja sosial dan profesional. Pemahaman ini sekaligus mencakup baik pengertian viktimologi tahap pertama (penal victimology) yang cenderung bersifat ilmiah maupun viktimologi tahap kedua (assistance-oriented victimology) yang cenderung merupakan tindakan pelayanan atau kebijakan yang berorientasi pada korban. Hal inilah yang merupakan penggerak diadopsinya *UN General Assembly's Declaration on the Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* pada tahun 1987 beserta panduan pelaksanaannya bagi pengambil kebijakan.

*Tahap keempat* dipelopori oleh Separovic pada tahun 1987, yang memperluas jangkauan definisi viktimologi sehingga mencakup korban pelanggaran HAM (*victims of human rights abuses*) sebagai isu sentral viktimologi dan mengeluarkan dari definisi, korban bencana alam dan kecelakaan karena dipandang terlalu luas dari sisi ilmiah. Deklarasi Sidang Umum PBB di atas dijadikan acuan utama. Dalam hal ini korban diartikan sebagai orang-orang yang secara individual atau kolektif telah menderita kerugian, termasuk penderitaan fisik atau mental, emosional, kerugian ekonomi atau pelanggaran substansial terhadap hak-hak fundamentalnya, melalui perbuatan-perbuatan atau sikap tidak berbuat (*omissions*) yang telah melanggar hukum pidana, termasuk penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

## 2. Tujuan Viktimologi

Menurut Zvominir Paul Separovic, viktimologi mempunyai tiga tujuan, yaitu :

1. *To analyze the manifold aspects of the victim's problems;*
2. *To explain the causes for victimization, and*

3. *To develop a system of measures for reducing human suffering.*<sup>65</sup>

Tujuan pertama viktimologi yaitu menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, yang meliputi kerugian atau penderitaan korban. Tujuan kedua, berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi, meliputi suatu analisis serta penjelasan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya korban. Dalam kajian viktimologi akan tampak, bahwa timbulnya korban tidak mutlak disebabkan oleh kesalahan korban. Tujuan ketiga, yaitu menciptakan suatu sistem kebijakan dalam upaya mengurangi penderitaan manusia, dapat berupa kebijakan perlindungan hukum bagi korban berupa pemberian hak dalam sistem peradilan pidana maupun kebijakan lain berupa restitusi dan / atau kompensasi.

Tujuan untuk membuat kebijakan guna mengurangi penderitaan bagi korban, oleh Mandelshon dikatakan sebagai tujuan viktimologi yang terpenting. Argumentasinya berpijak pada suatu pemikiran, bahwa semua masyarakat berkaitan dengan permasalahan tersebut. Dengan mengurangi penderitaan

---

<sup>65</sup> Iswanto dan Angkasa, *Viktimologi*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2005, halaman 24

atau kerugian korban, akan dapat lebih memberdayakan masyarakat serta menjamin kehidupannya<sup>66</sup>.

### 3. Perlindungan Hukum Terhadap Korban

Kata korban (*Victim*) awalnya merupakan istilah dari bahasa Latin yaitu “*Victima*” – dalam bahasa Yahudi “*Korban*” – yang aslinya berkaitan dengan konsep pengorbanan (*Sacrifice*) muncul dalam kitab (*Bible*) dan mempunyai arti suatu persembahan di candi. Dalam konsep yang sekarang, kata korban maknanya sudah bergeser ke arah suatu penderitaan manusia akibat tindakan yang dilakukan oleh seseorang penyerang atau pelaku kejahatan.<sup>67</sup> Dalam kamus *Petit Larousse* kata korban diartikan sebagai “seseorang yang secara suka rela mengorbankan hidup dan kebahagiaannya”, “seseorang yang menderita karena kesalahan orang lain atau kesalahannya sendiri”, “seseorang yang mati dalam suatu bencana

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, halaman 24-25

<sup>67</sup> Benjamin Mendelsohn, 1976. *Victimology and contemporary Society's Trends. Dalam victim and Society Part I (Conceptual Issues)* Emilio C. Viano (ed). Visage. Inc / Washington D.C. 1976. halaman 9.

atau karena sakit, atau dalam kecelakaan, pemberontakan atau perang“.<sup>68</sup>

Dalam kamus *Webster* pengertian korban dirumuskan sebagai : (1) suatu makhluk hidup yang dikorbankan kepada dewa atau dalam melaksanakan upacara keagamaan; (2) seseorang yang dibunuh, dianiaya, atau didenda oleh orang lain; seseorang yang mengalami penindasan, kerugian, atau penderitaan; (3) seseorang yang mengalami kematian, atau luka-luka dalam berusaha menyelamatkan diri; (4) seseorang yang diperdaya, ditipu, atau mengalami penderitaan; seseorang yang dipekerjakan atau dimanfaatkan secara sewenang-wenang dan tidak layak.<sup>69</sup>

Rincian tentang pengertian korban tersebut dalam *Webster* nampaknya terdapat kesamaan dengan pengertian korban dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, korban diartikan sebagai; (1) pemberian untuk menyatakan kebaktian (kerelaan hati, dsb); (2) orang yang menderita kecelakaan karena perbuatan (hawa nafsu, dsb) sendiri atau orang lain, misalnya banyak orang yang menjadi korban *roulet*; (3) orang yang mati; (4) orang yang mati

---

<sup>68</sup> Iswanto, dan Angkasa, *Op. cit.*halaman 27

<sup>69</sup> Zvonimir Paul Separovic., *Viktimology Studies of Victims, Publishers* “ Zagreb “, Samobor Novaki by Pravni Fakultet, Zagreb. 1985, halaman 8



karena menderita kecelakaan, karena tertimpa bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan sebagainya.<sup>70</sup> Pengertian tentang korban khususnya korban kejahatan juga dirumuskan dalam instrumen internasional meliputi berbagai aspek sebagaimana tertuang dalam *The Protection of Human Rights in the Administration of Criminal Justice A Compendium of United Nations Norms and Standards*.<sup>71</sup>

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, karena tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja tetapi juga korban kejahatan. Korban menderita jasmaniah dan rohaniyah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau

---

<sup>70</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, diolah kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dengan Departemen P dan K, Cetakan ke VI, Penerbit PN. Balai Pustaka, Jakarta. 1983, halaman 523

<sup>71</sup> M. Cherif Bassiouni, *The Protection of Human Rights in the Administration of Criminal Justice A Compendium of United Nations Norms and Standards*. Transnational Publishers, Inc. Irving-on-Hudson, New York. 1994.

orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

Menderitanya korban bisa disebabkan murni karena pihak lain, tetapi tidak menutup kemungkinan timbul karena keterlibatan korban di dalamnya, misalnya kedudukan korban dalam tindak pidana narkoba, perjudian, prostitusi. Namun demikian secara umum korban merupakan individu atau kelompok yang menderita secara fisik, mental dan sosial karena tindakan kejahatan<sup>72</sup>, bahkan korban dapat menderita ketakutan berkepanjangan jika ia melaporkan perbuatan pelaku dan memberikan kesaksian yang memberatkan pelaku di pengadilan<sup>73</sup>. Sampai saat ini Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil (KUHP dan KUHP) lebih menitikberatkan perhatian pada pelaku kejahatan daripada korban, seolah-olah terdapat suatu perbedaan atau pemisahan yang tajam antara si pembuat korban dengan si korban, walaupun keduanya memiliki peranan yang fungsional dalam terjadinya tindak

---

<sup>72</sup> Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjianto. RS., dan G. Wiratama, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya, 2001: Edisi Pertama: Cetakan Pertama, halaman135.

<sup>73</sup> Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Op. Cit.*, halaman48.

pidana.<sup>74</sup> Korban hanyalah pelengkap atau sebagian dari alat bukti, bukan pencari keadilan. Bahkan Geis berpendapat: “*Tend to be treated like pieces of evidence than like human beings*”.

Dalam setiap penanganan perkara pidana aparat penegak hukum (polisi, jaksa) seringkali diperhadapkan pada kewajiban untuk melindungi dua kepentingan yang terkesan saling berlawanan, yaitu kepentingan korban yang harus dilindungi untuk memulihkan penderitaannya karena telah menjadi korban kejahatan (secara mental, fisik, maupun material), dan kepentingan tertuduh/tersangka sekalipun dia bersalah tetapi dia tetap sebagai manusia yang memiliki hak asasi yang tidak boleh dilanggar. Terlebih apabila atas perbuatannya itu belum ada putusan hakim yang menyatakan bahwa pelaku bersalah. Maka dari itu pelaku harus dianggap sebagai orang yang tidak bersalah (asas praduga tidak bersalah).

Dalam penyelesaian perkara pidana, seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang

---

<sup>74</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Op. Cit., halaman 93

berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan hak-hak para korban”<sup>75</sup> Banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immateriil maupun materiil sebagaimana Geis “*to much attention has been paid to offenders and their rights, to neglect of the victims*”.<sup>76</sup>

Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan yaitu hanya sebagai saksi, sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil<sup>77</sup>. Rendahnya kedudukan korban dalam penanganan perkara pidana dikemukakan pula oleh Prassell yang menyatakan:

*“Victim was a forgotten figure in study of crime. Victims of assault, robbery, theft, and other offences*

---

<sup>75</sup> Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung, 1986, halaman33.

<sup>76</sup> Gilbert Geis, “*Victims and Witness Assistance Program*”, dalam: Sanford H. Kadish (ed.), *Encyclopedia of Crime and Justice*, New York: The Free Press: A Division of Macmillan Inc., 1983: Volume 4, halaman1600.

<sup>77</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1989: Edisi Pertama – Cetakan Kedua, halaman94.

*were ignored while police, courts, and academicians concentrated on known violators”.*<sup>78</sup>

Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan, sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaanya akibat suatu kejahatan<sup>79</sup>. Dalam kasus kejahatan keke-rasan terhadap perempuan, dengan penderitaannya sangat beragam, baik secara fisik, secara ekonomi, tetapi juga secara medis dan psikis. Dalam kaitan pemeriksaan suatu tindak pidana, seringkali korban hanya diposisikan sebagai pemberi kesaksian sebagai pelapor dalam proses penyidikan dan sebagai sumber informasi atau sebagai salah satu kunci penyelesaian perkara. Sebaliknya, pada saat korban tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai saksi di persidangan, ia dikenakan sanksi sebagaimana Geis berpendapat: *“If Victims complain that they cannot afford the loss of wages or work time to keep returning to court, prosecutors may threaten with fine or jail”*.

---

<sup>78</sup> Dikutip oleh Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Vikimologi Dan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Grhlm.ia Press, Juli 2004: Cetakan Pertama, halaman47.

<sup>79</sup> Frank R. Prassel, *Criminal Law, Justice, and Society*, Santa Monica – California: Goodyear Publishing Company Inc., 1979, halaman65.

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional, oleh karena itu masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Masalah pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari dibentuk-nya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa-bangsa, sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Itali, September 1985, yang dalam salah satu rekomendasinya menyebutkan:

*“Offenders or third parties responsible for their behaviour should, where appropriate, make fair restitution to victims, their families or dependants. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of the victimization, the provision of services and the restoration of rights”*

Dalam Deklarasi Milan 1985 tersebut, bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan (*victims*)

*of crime*), tetapi juga perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakkan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah, padahal sangat jelas dalam Pancasila, sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, masalah perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat sangat penting sebagai perwujudan dari Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Perlindungan korban menurut Barda Nawawi Arief, dapat dilihat dari 2 (dua) makna. *Pertama*, dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana” (berarti perlindungan Hak Asasi Manusia atau kepentingan hukum seseorang). *Kedua*, dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana” (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan maafan) pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/

santunan kesejahteraan sosial) dan sebagainya.<sup>80</sup>Perlindungan korban dalam proses peradilan pidana tidak terlepas dari perlindungan korban menurut ketentuan hukum positif yang berlaku. Dalam hukum pidana positif yang berlaku saat ini, perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung. Dikatakan demikian, karena tindak pidana menurut hukum pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang/melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma/ tertib hukum *in abstrakto*. Akibatnya, perlindungan korbanpun “tidak secara langsung dan *in concreto*, tetapi hanya *in abstrakto*.”<sup>81</sup> Kondisi kebijakan legislatif mengenai perlindungan korban menurut hukum pidana positif adalah sebagai berikut:

1. Hukum pidana positif saat ini lebih menekankan pada perlindungan korban *in abstrakto* dan secara tidak langsung;
2. Perlindungan korban secara tidak langsung masih terbatas dalam bentuk pemberian ganti rugi oleh si pelaku tindak pidana. Belum ada

---

<sup>80</sup> Barda Nawawi Arief., *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, ... Op. Cit.*, halaman 56

<sup>81</sup> *Ibid.*, halaman 56.



ketentuan ganti rugi yang diberikan oleh negara kepada korban tindak pidana;

3. Ada empat kemungkinan pemberian ganti rugi kepada korban dalam perkara pidana, yaitu :
  - a. Pemberian ganti rugi sebagai syarat khusus dalam pidana bersyarat (KUHP);
  - b. Memperbaiki akibat-akibat dalam tindak pidana ekonomi, sebagai tindakan tata tertib (Undang-Undang No. 7 Drt. 1995);
  - c. Pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi, sebagai pidana tambahan;
  - d. Penggantian biaya yang telah dikeluarkan, dalam proses penggabungan perkara gugatan ganti rugi (perdata) dalam perkara pidana (KUHP).<sup>82</sup>

Restitusi dan kompensasi adalah salah satu bagian dalam upaya mengurangi kerugian dan atau penderitaan korban. Oleh *Karmen* dikatakan “*Restitution and compensation are alternative methods of repaying losses*”.<sup>83</sup> Restitusi dan kompensasi merupakan suatu istilah yang sering dipakai secara bergantian, yang sebenarnya menggambarkan dua titik pandang

---

<sup>82</sup> *Ibid*, halaman 58

<sup>83</sup> Iswanto, dan Angkasa, *Viktimologi*, ...halaman 76

yang berbeda.<sup>84</sup> Restitusi dalam perspektif viktimologi berkaitan dengan perbaikan atau restorasi perbaikan atas kerugian fisik, moral maupun harta benda, kedudukan dan hak-hak korban atas serangan pelaku tindak pidana (penjahat).

Restitusi merupakan indikasi pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Restitusi merupakan suatu tindakan restitutif terhadap pelaku tindak pidana yang berkarakter pidana dan menggambarkan suatu tujuan koreksional dalam kasus pidana. Kompensasi dalam perspektif viktimologi berkaitan dengan keseimbangan korban akibat dari perbuatan jahat.

Karena perbuatan jahat tersebut merugikan korban, oleh karena itu dapat disebut kompensasi atas kerugian fisik, moral, maupun harta benda yang diderita korban atas suatu tindak pidana. Kompensasi juga merupakan suatu indikasi pertanggungjawaban masyarakat atas tuntutan pembayaran kompensasi yang berkarakter perdata. Dengan demikian ter-

---

<sup>84</sup> Stephen Schafer, 1968. *The Victim and his Criminal a Study in Functional Responsibility*. Published by Random House Inc, in New York and simultaneously in Toronto, Canada, by Random House of Canada Limited, halaman 112.

gambar suatu tujuan non pidana dalam kasus pidana.<sup>85</sup>

Stephen Schafer dalam bukunya “*The Victim and His Criminal*” sebagaimana dikutip Angkasa, mengemukakan adanya 5 (lima) sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yaitu:

1. Ganti rugi (*damages*) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana;
2. Kompensasi yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses pidana. Pemeriksaan tuntutan kompensasi yang demikian dalam proses pidana di Jerman disebut dengan istilah “*Adhasion prozess*”;
3. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi di sini bersifat keperdataan, namun tidak diragukan sifat pidananya (punitif). Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini ialah denda kompensasi (*compensatory fine*) yang dikenal dengan istilah

---

<sup>85</sup> Angkasa. *Kedudukan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana. (Pendekatan Viktimologis terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan)*. Disertasi. Universitas Diponegoro. Semarang, 2004, halaman 119

“*busse*” (di Jerman dan Swiss). Denda ini merupakan “kewajiban yang bernilai uang” (*monetary obligation*) yang dikenakan kepada terpidana sebagai suatu bentuk pemberian ganti rugi kepada korban di samping pidana yang seharusnya diberikan;

4.           Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan disokong oleh sumber-sumber penghasilan negara. Di sini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun, walau-pun diberikan dalam proses pidana. Jadi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negara yang memenuhi/menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan kepada pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan pengakuan, bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban, dan gagal mencegah terjadinya kejahatan.
5.           Kompensasi yang bersifat netral, diberikan melalui prosedur khusus. Sistem ini berlaku di Swiss sejak tahun 1937, New Zealand sejak tahun 1963, dan Inggris sejak tahun 1964. Sistem ini diterapkan dalam hal korban memerlukan ganti rugi, sedangkan si pelaku dalam keadaan bangkrut dan tidak dapat memenuhi tuntutan ganti rugi kepada korban. Yang berkompeten memeriksa

bukan peradilan pidana atau peradilan perdata, tetapi prosedur khusus dan independen yang menuntut campur tangan negara atas permintaan korban.<sup>86</sup>

Resolusi Majelis Umum PBB 40/34 menghimbau agar negara memberi restitusi atau kompensasi kepada korban. Dalam butir No. 11, resolusi itu dinyatakan bahwa apabila para aparat/petugas publik dalam melakukan tugasnya melanggar hukum pidana positif nasional, maka para korban seharusnya menerima restitusi dari negara. Pada butir Nomor 12 dinyatakan, bahwa apabila kompensasi tidak sepenuhnya diperoleh dari pelaku tindak pidana atau sumber-sumber lain, maka negara harus berusaha menetapkan kompensasi kepada korban yang menderita luka badan selama-lamanya, atau rusak/melemah kesehatan fisik dan mentalnya, dan kepada keluarga terutama orang-orang yang menjadi tanggungan dari orang yang mati atau cacat fisik/mental sebagai akibat kejahatan berat/serius.

1. Macam-macam kompensasi:

Kompensasi yang diterima korban dapat merupakan pemenuhan atas harapan korban berupa :

- a. Pemberian sejumlah uang;

---

<sup>86</sup> *Ibid*, halaman 59-60

- b. Pemberian informasi tentang kemajuan penyelesaian kasusnya;
  - c. Pengobatan atas luka-luka yang diderita;
  - d. Pemulihan emosional melalui perawatan medik bagi korban yang mengalami kegoncangan mental.
2. Korban yang dapat menerima kompensasi:
- a. Korban tindak pidana yang kasusnya telah terungkap;
  - b. Korban tindak pidana yang pelakunya tidak tertangkap atau melarikan diri;
  - c. Korban tindak pidana yang pelakunya tidak dipertanggungjawabkan secara pidana;
  - d. Korban tindak pidana yang pelakunya meninggal dunia;
  - e. Korban tindak pidana yang pelakunya tidak dalam posisi yang mampu untuk membayar yang disebabkan karena masih muda dan belum berpenghasilan, pelakunya secara ekonomi sangat tidak mampu;
  - f. Korban sangat menginginkan dan membutuhkan mendapat kompensasi;
  - g. Korban tidak dalam posisi mendapat pertanggungan dari program asuransi. Dasar pemikirannya adalah bahwa program kompensasi

tidak dimaksudkan menjadikan seseorang lebih diuntungkan.

Kedudukan korban dalam KUHP tampaknya belum optimal dibandingkan pelaku<sup>87</sup>, belum optimal artinya dalam KUHP sebenarnya sudah terdapat perhatian terhadap korban, namun masih terdapat beberapa aspek kepentingan korban yang belum terakomodir. Perhatian KUHP terhadap korban tampak sebagaimana pendapat Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa dalam hukum pidana positif yang berlaku saat ini, perlindungan korban lebih banyak merupakan “Perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Meskipun demikian Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk memberikan perlindungan terhadap korban suatu tindak pidana. Hal ini dengan telah adanya Undang-Undang yang secara spesifik mengatur mengenai perlindungan hak korban yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Didalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 disebutkan bahwa korban berhak:

---

<sup>87</sup>Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Op-cit, halaman 55

1. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya;
2. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. mendapat penerjemah;
5. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
7. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
8. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
9. mendapat identitas baru;
10. mendapatkan tempat kediaman baru;
11. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
12. mendapat nasehat hukum;
13. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Khusus untuk korban pelanggaran hak asasi manusia berat, selain hak-hak sebagaimana tersebut di atas, korban juga berhak untuk bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. (Pasal 6 UU No. 13



thn 2006). Prosedur pengajuan hak-hak korban sebagaimana tersebut di atas, diajukan korban melalui Lembaga perlindungan Saksi dan Korban ke Pengadilan:

1. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia berat
2. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggungjawab pelaku tindak pidana
3. keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh Pengadilan.

Perlindungan dan hak korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir setelah:

- a. adanya permintaan dari pihak korban
- b. korban melakukan pelanggaran ketentuan sebagai-mana tertulis dalam perjanjian
- c. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ber-pendapat bahwa korban tidak lagi memerlukan per-lindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan.

Menurut Lilik Mulyadi<sup>88</sup>, ada dua model perlindungan terhadap korban, yaitu :

---

<sup>88</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004, halaman122

1. model hak-hak prosedural (*the procedural rights model*) atau di Prancis disebut *partie civil model* (*civil action system*). Secara singkat, model ini menekankan dimungkinkan berperanaktifnya korban dalam proses peradilan pidana seperti membantu Jaksa Penuntut Umum, dilibatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara, wajib didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat, dan lain sebagainya.
2. model pelayanan (*the service model*) yang menekankan pada pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi dan upaya pengambilan kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut dan tertekan akibat kejahatan.

Hal ini sejalan dengan pendapat Muladi yang menyatakan yang kita anut mestinya adalah model yang realistis yang memperhatikan pelbagai kepentingan yang harus dilindungi hukum pidana yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan. Model yang bertumpu pada konsep *daad-dader-strafrecht* ini saya sebut Model Keseimbangan Kepentingan.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, ...Op. Cit.*, halaman 5

Menurut Zvominir Paul Separovic, untuk mencapai keseimbangan diatas, harus dikaji hak dan kewajiban korban, dengan cara pemenuhan kebutuhan korban antara lain :

- a. Kebutuhan keamanan sehingga kejahatan tidak terulang lagi ;
- b. Kebutuhan restitusi dan kompensasi, baik dirinya sendiri maupun untuk orang-orang yang ter-gantung hidupnya dari korban;
- c. Kebutuhan pelayanan kesehatan, konseling dan pelayanan lainnya;
- d. Kebutuhan partisipasi aktif dalam proses peradilan pidana, yaitu peran korban tidak hanya sebagai saksi, tetapi juga sebagai pihak yang ber-kepentingan dalam kasus yang melibatkan korban;
- e. Kebutuhan untuk menghilangkan rasa takut terhadap kejahatan;
- f. Kebutuhan perlindungan dari pemerintah/ negara.<sup>90</sup>

Menurut Arif Gosita, hak dan kewajiban korban secara rinci dapat meliputi :

Hak-hak korban adalah :

---

<sup>90</sup> Zvominir Paul Separovic, *Victimology,...Op. Cit.*, halaman 23

- a. Korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaan sesuai dengan kemampuan memberi kompensasi dari si pembuat korban, taraf keterlibatan/partisipasi/peran si korban dalam terjadinya kejahatan;
- b. Berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat (tidak mau diberi kompensasi karena tidak memerlukannya) ;
- c. Berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya bila si korban meninggal dunia karena tindakan tersebut;
- d. Berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi;
- e. Berhak menolak menjadi saksi bila hal ini akan membahayakan dirinya;
- f. Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman dari pihak pembuat korban bila melapor menjadi saksi;
- g. Berhak mendapatkan bantuan Penasihat Hukum;
- h. Berhak mempergunakan upaya hukum.

Sedangkan Kewajiban-kewajiban korban adalah:

- a. Tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan;

- b. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih banyak lagi;
- c. Mencegah kehancuran sipembuat korban baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain;
- d. Ikut serta membina korban;
- e. Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi;
- f. Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban;
- g. Memberi kesempatan kepada pembuat korban untuk memberi kompensasi pada pihak korban sesuai dengan kemampuannya (misalnya dengan cara mencicil, imbalan atau jasa);
- h. Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan, Kumpulan Karangan*, Akademika Presindo, Jakarta, 1983, halaman5-53





# HAK-HAK KORBAN KDRT DALAM PUTUSAN HAKIM

BAB

3

## A. Memahami Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan batasan yang menunjukkan terhadap bentuk kekerasan yang terjadi pada *locusdomain* keluarga. Batasan ini mengandung arti, siapapun yang diaktegorikan sebagai anggota keluarga dapat menjadi pelaku atau sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.



Konstruksi keluarga selama ini ditampilkan dalam bentuk ideal, minimal terdiri atas suami, isteri dan anak-anak yang diikat secara lahir batin dalam sebuah perkawinan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasangan suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati dan member bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Suasana seperti ini menunjukkan ada relasi personal yang intim ini lebih bersifat altruistik dan ketergantungan satu sama lain cukup tinggi diantara pasangan suami isteri. Hal yang sangat spesifik dari KDRT justru terletak pada relasi personal yang intim antara pelaku dan korban, yang sejatinya memiliki hubungan emosional yang sangat dekat. Kekhasan relasi ini yang kemudian menyebabkan terjadinya bias persepsi dalam penanganan KDRT, baik oleh penegak hukum maupun masyarakat. Dalam kenyataannya, seringkali kejahatan ini terjadi tanpa saksi karena bersifat interrelasi yang sangat dekat antara pelaku dan korban.

Dari segi politik kriminal, maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dapat dikatakan sebagai perlindungan masyarakat terhadap kejahatan atau dengan istilah “social defence”. Konsep social defence ini terlihat yaitu dengan adanya keinginan untuk menghapus segala bentuk kekerasan, terutama kekerasandalam rumah tangga, yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta

bentuk diskriminasi. Tujuan *social defence* dalam UU No. 23 thn. 2004 yaitu :

1. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
2. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
3. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
4. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Konsep perlindungan secara riil juga terlihat yaitu dengan adanya komitmen pemerintah untuk memberi perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga, terutama perempuan agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Dari aspek kebijakan pidana/politik kriminal yaitu usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan berupa kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, maka Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penang-

gulangan kejahatan), yaitu dengan upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum, antara lain melalui upaya kriminalisasi beberapa perbuatan dalam lingkup rumah tangga menjadi kejahatan.

Perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. Kejahatan kekerasan ini mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu, dalam hal ini adalah subyek pidana kejahatan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap orang dalam lingkup rumah tangga.

Sanksi Pidana yang diancam dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu adanya pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berupa pidana penjara dan denda. Sedangkan pidana tambahan berupa pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku; dan penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

#### a. KDRT menurut KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan mengenai pengertian kekerasan, akan tetapi ada 2 (dua) kriteria yang disebut dengan kekerasan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 KUHP yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi.

Menurut R. Sughandi, “melakukan kekerasan” ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah. Misalnya, memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena kekerasan itu merasa sangat sakit.<sup>92</sup>

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terdapat di dalam ketentuan Pasal 356 KUHP, yaitu mengenai tindak pidana penganiayaan yang ancaman hukumannya diperberat sepertiga dari ancaman hukuman yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan Pasal 355 KUHP. Objek yang dilindungi oleh ketentuan Pasal 356 KUHP yaitu ibunya, ayahnya yang sah, istrinya atau anaknya (Pasal 356 ayat {1} KUHP). Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa kata

---

<sup>92</sup> *Ibid*, hlm, 106-107

“penganiayaan” tidak menunjuk pada perbuatan tertentu, seperti misalnya kata “mengambil” dari pencurian, maka dapat dikatakan, bahwa kini pun nampak ada perumusan secara “materiil”, tetapi tidak nampak secara jelas apa wujud akibat yang harus disebabkan.<sup>93</sup>

Beberapa tentang penafsiran penganiayaan biasa menurut:

1. Doktrin

Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Adapun yang dimaksud dengan luka itu adalah apabila terjadi perubahan dalam bentuk badan manusia, yang berlainan dengan bentuknya semula. Sedangkan yang dimaksud rasa sakit atau *pijn* adalah perubahan dalam bentuk dari badan tidak menjadi syarat mutlak, cukup jika menimbulkan sakit<sup>94</sup>.

2. Yurisprudensi

- a. *Arrest* Pengadilan Tinggi tanggal 10 Desember 1902 merumuskan penganiayaan

---

<sup>93</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco Jakarta-Bandung, 1981, halaman 67

<sup>94</sup> Mr. M.H. Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, 1955, halaman 509

ialah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan bukan sebagai akal untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan seperti memukul anak dan lain-lain, batas yang dianggap perlu ialah yang dilakukan oleh orangtua anak itu atau gurunya;

- b. *Arrest* Pengadilan Tinggi tanggal 20 April 1925 menyatakan penganiayaan ialah secara sengaja melukai tubuh manusia. Tidak dianggap penganiayaan jika maksudnya hendak mencapai tujuan lain, dan dalam menggunakan akal itu tidak sadar bahwa ia melewati batas-batas yang wajar;
- c. *Arrest* Pengadilan Tinggi tanggal 11 Februari 1929 menyatakan penganiayaan bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh. Menyebabkan perasaan tidak enak pada tubuh atau bagian-bagian dalam dari tubuh dapat menjadikan penganiayaan.

Setiap tindak pidana yang dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya terbagi menjadi dua macam unsur yakni unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu

yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan unsur obyektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan mana tindakan si pelaku harus dilakukan.<sup>95</sup>

Dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP terkandung unsur utama yaitu penganiayaan (*mis-handeling*). Mengacu pada yurisprudensi, maka kata penganiayaan diartikan sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijin*), atau luka. Masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang.

- a. Perasaan tidak enak, mendorong orang terjun ke kali (sungai), sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari dan sebagainya;
- b. Rasa sakit misalnya menyubit, mendupak (menendang), memukul, menempeleng;
- c. Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
- d. Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin.

Penganiayaan lainnya dirumuskan dalam Pasal 354 ayat (1) KUH Pidana yang bunyinya: “Barang

---

<sup>95</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1984, hlm. 184

siapa sengaja melukai berat orang lain diancam, karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun”. Menurut R. Soesilo Pasal 354 ayat (1) ini dinamakan penganiayaan berat. Supaya dapat dikenakan pasal ini, maka niat si pembuat harus ditujukan pada melukai berat, artinya luka berat harus dimaksud oleh si pembuat, apabila tidak dimaksud dan luka berat itu hanya merupakan akibat saja, maka perbuatan itu masuk penganiayaan biasa yang berakibat luka berat (Pasal 351 ayat 2). Untuk mengetahui jelas perumusan luka berat itu dapat dilihat dalam Pasal 90 KUH Pidana yang bunyinya sebagai berikut :

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk melakukan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- c. Kehilangan salah satu panca indera;
- d. Mendapat cacat berat (*verminking*);
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
- g. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.



Tindak pidana penganiayaan ringan dirumuskan dalam Pasal 352 ayat (1) KUH Pidana yang bunyinya : “Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”. Wirjono Prodjodikoro mengatakan yang dimaksud dengan penganiayaan ringan adalah :

1. yang tidak mengakibatkan sakit atau terhalangnya orang menjalankan jabatannya atau mata pencahariannya;
2. yang tidak direncanakan terlebih dahulu;
3. yang tidak menggunakan benda yang membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain;
4. yang tidak dilakukan terhadap orangtuanya, isterinya atau suaminya, anak-anaknya atau pegawainya yang sedang atau karena melakukan kewajibannya.<sup>96</sup>

Dari berbagai jenis tindak pidana penganiayaan yang dirumuskan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana, jenis tindak pidana penganiayaan ringan adalah yang paling ringan ancaman pidananya. R.

---

<sup>96</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, Hlm. 136

Soesilo menjelaskan bahwa peristiwa pidana ini disebut penganiayaan ringan dan masuk kejahatan ringan. Yang masuk dalam pasal ini ialah penganiayaan yang tidak menjadikan sakit (*ziek* bukan *pijn*) atau terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.

Dalam Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana tentang tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan mati adalah berbeda dengan yang dimaksudkan dalam Pasal 338 KUH Pidana tentang tindak pidana pembunuhan biasa (*doodslag*). Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana menyatakan, “Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun”. Pasal 338 KUH Pidana “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Dalam Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana maksudnya bukan merupakan kesengajaan atau kehendak, melainkan merupakan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh si pembuat atau pelaku tindak pidana ini. Sebab bisa saja kejahatan itu terjadi tanpa ada rencana terlebih dahulu di dalam batin pelakunya, yaitu dalam hal penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain maka niat disini tidak meliputi

bentuk kesengajaan. Menurut Sudarto,<sup>97</sup> ada beberapa jenis kesengajaan yang meliputi:

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan, disini si pembuat bertujuan menimbulkan yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian.

Dalam hal ini si pembuat mempunyai dua akibat, yaitu :

- a. Akibat yang memang dituju si pembuat;
- b. Akibat yang tidak diinginkan akan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan diatas akibat ini pasti terjadi.
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan, disini ada ketentuan yang semula mungkin terjadi kemudian terjadi.

#### **b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004**

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis yang dan/atau pene-lantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk

---

<sup>97</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cetakan ke II, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang, hlm, 102

melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Pasal 5 UU P-KDRT merumuskan “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau pene-lantaran rumah tangga.

Pengertian kekerasan fisik dijelaskan dalam Pasal 6 UU-PKDRT adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Dalam prakteknya, untuk menentukan berat ringan rasa sakit yang dialami oleh korban, diperlukan visum dokter. Pasal 7 UU P-KDRT merumuskan Kekerasan Psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan ini lebih pada aspek psikologis seperti melukai perasaan, batin atau mental korbannya. Tindakan kekerasan psikologis dapat pula mem-pengaruhi fisik korbannya menjadi lemah atau sakit.

Dalam praktiknya hampir tidak ada kejahatan kekerasan psikis yang dapat di proses secara hukum karena membutuhkan visum dari psikiater yang ada di rumah sakit jiwa. Hal ini sangat merugikan korban karena kekerasan psikis merupakan jenis KDRT yang

paling banyak dialami perempuan, namun tidak dapat dibuktikan sebagai bentuk kekerasan sebagai fakta hukum khususnya kekerasan psikis yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Pasal 8 UU P-KDRT merumuskan tentang kekerasan seksual yaitu:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Seksual memiliki arti hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan<sup>98</sup>. Dengan demikian, kekerasan seksual berarti suatu perbuatan yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin yang mengarah pada pemaksaan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, yang mengakibatkan penderitaan.

---

<sup>98</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990

Menurut Mboiek, dan Stanko pengertian kekerasan seksual adalah suatu perbuatan yang biasanya dilakukan laki-laki dan ditujukan kepada perempuan dalam bidang seksual, yang tidak disukai oleh perempuan sebab ia merasa terhina, tetapi kalau perbuatan itu ditolak ada kemungkinan ia menerima akibat buruk lainnya<sup>99</sup>. Di dalam penjelasan Pasal 8 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Dalam praktik pengertian kekerasan seksual dalam rumah tangga hampir hampir dianggap tidak mungkin terjadi. Apalagi kalau hal tersebut menimpa isteri. Hubungan intim suami isteri – betapapun keras dan pemaksaan – masih dianggap hubungan yang wajar terjadi. Akibatnya kasus *marital rape* sangat jarang dilaporkan.

Pasal 9 UU P-KDRT merumuskan larangan melantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau

---

<sup>99</sup> Sri Endah Kinasih, *Perlindungan dan Penegakan HAM terhadap Pelecehan Seksual*, Makalah, diakses dalam situs : <http://www.yahoo.com> , tanggal 2 Nopember 2009

karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Penelantaran dapat terjadi dalam bentuk tidak memberi nafkah pada isteri, membiarkan isterinya bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai suami, bahkan mempekerjakannya sebagai isteri dan memanfaatkan ketergantungan isteri secara ekonomi untuk mengontrol kehidupannya.

Penelantaran juga terjadi apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal-hal di luar kemampuannya. Termasuk juga tidak memberikan penghidupan, perawatan, pemeliharaan kepada setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan secara ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Sehubungan dengan penelantaran dalam rumah tangga yang tersebut pada Pasal 9 UU Nomor 23 tentang Penghapusan KDRT, yang mayoritas korbannya adalah perempuan (isteri) dan anak-anak, secara fakta hukum yang kelak dipakai sebagai alat bukti, agak kesulitan membuktikan unsur kesalahan telah menelantarkan keluarga karena kesengajaan. Namun terjadi progress yang cukup menggembirakan, kasus penelantaran dapat diproses hukum, seperti yang tercantum dalam Putusan Kasasi Penelantaran dalam Rumah Tangga 307 K/Pid.Sus/2010 atas perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam bentuk penelantaran rumah tangga.

Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil menikah dengan korban pada tahun 1978 dan dikaruniai 5 (lima) orang anak. Pada tahun 1997 terdakwa meninggalkan rumah dan menikah dengan perempuan lain. Selama meninggalkan istri dan anak terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin. Terhadap perkara ini JPU menuntut terdakwa dengan Pasal 49 huruf a UU No. 23 tahun 2004 tentang KDRT dengan tuntutan pidana penjara 8(delapan) bulan. PN Tanjung Karang memutuskan dengan pidana penjara 6(enam) bulan. Terhadap putusan PN tersebut JPU dan Terdakwa mengajukan banding ke PT. Adapun PT dalam amar putusannya berbunyi menguatkan putusan PN Tanjung Karang.



Terhadap putusan tersebut Terdakwa mengajukan kasasi. Alasan-alasan terdakwa mengajukan kasasi adalah karena JPU tidak memenuhi syarat sahnya alat bukti dan PN mengabaikannya. Alasan terdakwa selanjutnya bahwa saksi yang dihadirkan patut diragukan karena mereka adalah anak-anak dan saksi yang tidak mendengar dan melihat langsung.

Mahkamah Agung dalam perkara ini mempertimbangkan alasan-alasan Kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan. Selain itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa Terdakwa telah menelantarkan korban dan saksi-saksi juga telah kawin dengan perempuan lain hal ini agar dapat menjadi pelajaran dikemudian hari bagi Terdakwa sehingga pantas diberi hukuman pidana sebagai pelajaran.

Dalam perkara ini MA merasa perlu memperbaiki putusan *judex facti* karena tidak cukup hanya dengan pidana percobaan saja, namun perlu dengan syarat khusus. Dalam Putusannya, MA menolak Kasasi terdakwa dan memperbaiki Amar Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, yaitu menyatakan terdakwa secara sah telah melakukan penelantaran dalam rumah tangga karena itu dipidana penjara selama 6 (enam) bulan dan menetapkan **syarat khusus** terdakwa harus memberi nafkah pada istri dan anak-anaknya sebesar Rp 1.000.00,- setiap bulannya.

## B. Kendala Pelaksanaan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Ada beberapa faktor yang menyebabkan lemahnya sistem hukum yaitu substansi hukum (*legal substances*), struktur (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).

1. Substansi hukum mengacu pada materi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanganan KDRT.
2. Struktur hukum yaitu menyangkut sikap perlakuan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan khususnya KDRT yang masih bias.
3. Budaya hukum yaitu menyangkut pemahaman masyarakat mengenai akar masalah kekerasan terhadap perempuan. Faktor penyebab kesenjangan gender yaitu tata nilai sosial budaya masyarakat, umumnya lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan (*ideology patriarki*);

Ketiga faktor di atas, menyebabkan kondisi sistem penegakan hukum masih belum mampu memberikan rasa aman, keadilan, dan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan.<sup>207</sup> Undang-Undang P-KDRT

---

<sup>207</sup> Tim SCRIPT, *Penegakan Hukum yang Berkeadilan Jender: Setahun Program Penguatan Penegak Hukum*, Komnas Perempuan-LBH APIK Jakarta-LBPP DERA-Warapsari-Convention Watch-PKWJ UI, 2005, hlm. 9-11

dianggap masih setengah hati dalam melindungi korban KDRT, terlihat dalam perumusan ketentuan pidana yang masih menguntungkan pelaku (Pasal 44 ayat 4, Pasal 45 ayat 2) juga dalam Pasal 55 yang menyebutkan keterangan saksi korban sudah cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah apabila disertai alat bukti sah lainnya. Disamping itu hak-hak korban untuk mendapatkan kompensasi dan restitusi sebagai akibat kekerasan yang dialami secara fisik maupun psikis belum terakomodir dalam UU P-KDRT.

Artinya sistem hukum nampaknya belum berperspektif hak-hak perempuan. Banyak kasus kekerasan yang berbasis gender yang gagal diproses sampai ke pengadilan karena kesulitan pembuktian. Selain itu, banyak juga perempuan yang memilih untuk tidak melapor karena takut ancaman fisik, psikis, seksual, dan kehilangan sumber penghasilan dari pelaku, sehingga korban cenderung diam bahkan acuh terhadap segala bentuk kekerasan yang terjadi. Hal lainnya adalah perlakuan aparat yang masih terkesan diskriminatif dan sensitif pada saat proses pemeriksaan perkara seringkali membuat korban menjadi korban untuk sekian kalinya.

Keengganan melapor ke pihak yang berwajib bukan hanya disebabkan perasaan malu, namun juga kurangnya kepercayaan kepada lembaga penegak hukum. Karena faktanya, dari sejumlah kasus kekerasan dalam rumah

tangga yang menimpa perempuan, yang dilaporkan kepada polisi, tidak seluruhnya bisa diteruskan sampai ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau disidangkan di pengadilan. Bahkan banyak kasus yang dihentikan penyidikannya dengan alasan tidak cukup bukti atau harus dihentikan demi hukum atau pelapor mencabut kembali pengakuannya.

Permasalahan tidak cukup bukti biasanya terjadi karena korban umumnya melapor setelah bekas-bekas tindak kekerasan tidak ada lagi pada tubuh korban atau tidak ada saksi yang melihat tindak kekerasan terkait.

Salah satu substansi yang paling penting dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah perlindungan dan pendampingan yang merupakan hak-hak korban yang harus diberikan, disamping hak-hak lainnya seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi, Korban berhak mendapatkan:

1. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
2. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
3. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;

4. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. pelayanan bimbingan rohani.

Adanya perlindungan terhadap korban merupakan prinsip yang sangat mendasar dan yang harus segera diambil untuk menyelamatkan korban dari tindakan kekerasan yang berkelanjutan dalam rumah tangga, baik itu kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran. Kemudian dapat diikuti langkah selanjutnya berupa pendampingan korban, yang bertujuan antara lain:

1. agar korban dalam setiap tingkat pemeriksaan (penyidikan, penuntutan, persidangan) dapat memaparkan KDRT yang sedang dialaminya;
2. untuk memulihkan rasa trauma yang terjadi dalam diri korban;
3. memberikan rasa percaya diri kepada korban;
4. menanamkan keberanian bagi korban untuk memberikan keterangan yang lengkap kepada petugas dalam setiap tingkat pemeriksaan.

Perlindungan yang harus diberikan oleh kepolisian kepada korban cakupannya lebih luas jika dibandingkan dengan perlindungan yang diberikan oleh pihak-pihak terkait lainnya, antara lain harus:

1. Mengamankan korban dari ancaman atau tindakan kekerasan lebih lanjut dari tersangka/pelaku kekerasan dalam rumah tangga;
2. Mengawal/mengantarkan korban pulang ke rumahnya jika korban mau kembali ke rumahnya setelah selesai diperiksa;
3. Merujuk/mengirimkan korban ke Pusat Pelayanan Terpadu (PPT ) atau Rumah Sakit terdekat
4. Mengantarkan korban ke rumah sakit untuk berobat dan meminta Visum et Repertum;
5. Segera memproses tersangka, karena tindakan itu merupakan shock terapi untuk tersangka kekerasan dalam rumah tangga;
6. Menjamin kerahasiaan informasi yang diperoleh;
7. Menjamin keamanan dan keselamatan pelapor maupun korban.
8. Segera menghubungi berbagai pihak untuk mendampingi korban.

Namun terdapat berbagai kesulitan yang sering dijumpai oleh kepolisian dalam rangka memberikan perlindungan atau penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga antara lain:

1. adanya keengganan dari korban (utamanya korban wanita) untuk meneruskan proses tindak pidana yang terjadi, karena ada rasa kasihan

- terhadap tersangka utamanya apabila tersangka adalah suaminya;
2. kekhawatiran sang istri atau korban untuk melapor atau mengadu, karena sifat ketergantungan yang tinggi terhadap suami sebagai tersangka kekerasan dalam rumah tangga;
  3. pengaruh budaya dan agama yang masih kuat yang mengharuskan ketaatan kepada suami dalam keadaan bagaimanapun;
  4. adanya rasa malu terhadap keluarga/orang lain, karena masalah kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah yang bersifat private (domain private);
  5. penempatan korban dalam suatu tempat khusus pada kepolisian belum tersedia, yang ada hanya Ruang Pelayanan Khusus (RPK), yang sifatnya sementara dan juga belum semua Polres memiliki RPK, karena keterbatasan keuangan negara (kalau untuk memberikan pelayanan dilakukan di rumah aman milik Pemerintah, Pemda, atau masyarakat).

Beberapa persoalan praktis yang terjadi dalam proses penegakan hukum adalah:

- a. *mindset* perlindungan korban belum menjadi perhatian bagi penegak hukum, sehingga tak jarang posisi perempuan sebagai pelapor justru tidak mendapat perhatian. Dalam beberapa kasus

pelapor KDRT dilaporkan kembali oleh suaminya dan kemudian menjadi tersangka.

- b. banyak penegak hukum yang menangani kasus-kasus KDRT masih melihat KDRT merupakan urusan privat sehingga penyelesaiannya diarahkan pada keutuhan keluarga.
- c. Dalam lingkaran penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga, terdapat persoalan lain yaitu munculnya praktek kriminalisasi dan diskriminasi terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Komnas Perempuan 60 persen korban kekerasan dalam rumah tangga mengalami kriminalisasi, 10 persen diantaranya dikriminalkan melalui undang-undang penghapusan kekerasan di dalam rumah tangga. Praktek kriminalisasi dan diskriminasi terhadap korban KDRT mencederai konsep dasar Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menghendaki struktur dapat melindungi perempuan dan anak, karena mereka merupakan pihak yang paling rentan menjadi korban kekerasan.

Tim SCRIPT membuat parameter wujud penegakkan hukum yang berkeadilan gender sebagai berikut:

1. Dari segi substansi hukum, terdapat aturan-aturan yang mendukung penegakkan hukum yang menge-



depankan kepentingan dan kebutuhan perempuan korban kekerasan, diantaranya :

- a. Mengubah aturan dasar yang berkaitan dengan materi kekerasan terhadap perempuan, hukum acara, dan lain-lain. Misalnya, perubahan atas hukum acara pidana berkaitan dengan pengaturan hak-hak korban dan pembuktian kasus kekerasan terhadap perempuan;
- b. Mengembangkan pemikiran tentang kebutuhan penafsiran pasal-pasal yang ada, termasuk perumusan perubahan hukum;
- c. Menempatkan korban sebagai subyek dalam proses pemeriksaan perkara dan bukan obyek seperti yang terjadi selama ini;
- d. Menyediakan pendampingan bagi korban dalam setiap pemeriksaan perkara;
- e. Mempertimbangkan hukuman alternatif yang diatur secara tegas dalam perundang-undangan bagi perempuan yang dianggap “pelaku” kejahatan karena sesungguhnya ada dimensi jender dalam kasus-kasus itu. Misalnya, pada kasus kekerasan terhadap seorang laki-laki dimana perempuan yang menjadi terdakwa, melakukan “tindak kriminal” tersebut karena selama bertahun-tahun sebelumnya ia menjadi obyek kekerasan si laki-laki.

2. Dari aspek struktur hukum, tersedianya infrastuktur yang melayani kebutuhan perempuan korban kekerasan, di antaranya :
  - a. Penanganan secara khusus bagi perempuan korban kekerasan. Ini bisa dicapai dengan alokasi prasarana dan anggaran yang memadai;
  - b. Penyediaan informasi dan pelayanan pemeriksaan yang cepat dan nyaman serta peka jender, yang dapat diakses oleh korban, pendamping maupun yang berkepentingan;
  - c. Wewenang dan peran yang jelas dalam upaya memberi perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan.
3. Dari segi budaya hukum, yaitu kesiapan aparat penegak hukum yang memiliki pemahaman yang memadai mengenai permasalahan kekerasan terhadap perempuan. Ini dapat ditempuh melalui usaha-usaha penyuluhan misalnya pelatihan jender bagi aparat penegak hukum, termasuk memasukkan materi ke dalam kurikulum pendidikan, serta dibukanya keran partisipasi masyarakat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Termasuk di dalamnya, upaya membangun kesadaran masyarakat terhadap persoalan kekerasan terhadap perempuan.<sup>208</sup>

---

<sup>208</sup> Tim SCRIPT, *Op. Cit.*, hlm, 11-12

Beberapa kendala dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga, meliputi:<sup>100102</sup>

1. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan korban, kerap kali tidak ditindaklanjuti karena korban ragu-ragu atau tidak mengerti bahwa hal yang dilaporkan itu adalah tindak pidana. Demikian halnya terhadap kasus yang telah diproses pihak Kepolisian pun acapkali ditarik kembali dengan berbagai macam alasan, misalnya karena korban merasa sudah memaafkan pelaku, ketergantungan ekonomi terhadap pelaku, kekerasan dalam rumah tangga masih dianggap sebagai aib keluarga;
2. Beda pemahaman antar penegak hukum terhadap bentuk kekerasan dalam rumah tangga tentang mekanisme pemberian perlindungan dan belum semua pihak mendukung upaya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga;
3. Lamanya rentang waktu antara kejadian dan visum, sehingga hasil visum menjadi kurang mendukung terhadap proses hukum;

---

<sup>102</sup> Mudjiati, *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Suatu Tantangan Menuju Sistem Hukum Yang Responsif Gender*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 5 No. 3 - September 2008, hlm. 65

4. Masalah penganggaran untuk sosialisasi ke daerah yang sulit dijangkau, sehingga frekuensi tidak memadai, dan pendanaan shelter baik untuk bangunan maupun operasionalnya;
5. Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga belum dianggap prioritas, sehingga pembentukan PPT masih tersendat;
6. Substansi pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 dan Pasal 49 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum mengandung efek jera. Dalam beberapa kasus (khususnya KDRT psikis) hakim menjatuhkan pidana cukup ringan karena melihat hanya melihat kondisi luar korban tanpa mencoba menggali penderitaan korban (di dalam).

Dari aspek formil sebenarnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberi kemudahan terhadap penegak hukum untuk menjamin kepentingan korban yaitu dalam hal alat bukti. Alat bukti dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga ini sangat sederhana. Sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa alat bukti yang sah salah satunya dengan “keterangan saksi korban” saja sudah cukup untuk

membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya<sup>103</sup>.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang KDRT, maka alat bukti dalam hal tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terdiri dari:

1. Seorang saksi;
2. Alat bukti lainnya

Pembuat undang-undang sengaja menyederhanakan sistem pembuktian pada kejahatan terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), mengingat *tempus delicti* dan rumah kejahatan itu sendiri berada dalam rumah tangga atau disebut dengan *Local Violence*, karena memiliki sekat yang bersifat psikologis terhadap dunia luar karena adagium urusan rumah tangga. Karena tidak mungkin sangat banyak kejahatan atau kekerasan yang terjadi dalam suatu rumah tangga yang orang lain tidak mengetahuinya atau enggan mengetahuinya. Banyak keluarga juga masih meragukan sistem pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini, karena mempunyai sifat yang khusus sekali bila dibandingkan dengan apa yang dianut oleh

---

<sup>103</sup> Dalam penjelasan Pasal 55 dijelaskan, alat bukti yang sah lainnya dalam kekerasan seksual yang dilakukan selain dari suami isteri adalah pengakuan terdakwa

KUHAP sendiri, dimana keterangan satu orang saksi saja sudah cukup.

Sistem alat bukti dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga yang diusung oleh Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004, memang tidak tegas meniadakan asas umum yang berlaku dalam hukum acara pidana yakni “*unus testis nullus testis*”, yaitu satu saksi adalah bukan saksi, keterangan hanya dari seorang saksi tidak merupakan bukti sempurna. Maka dalam praktek hukum selama ini adalah keterangan saksi minimal dua orang saksi. Hal ini untuk menghindari suatu keterangan saksi yang sengaja direkayasa. Semua bermuara sebagai atau yang disebut mencapai kebenaran materiil.

### C. Hak-Hak Korban KDRT

Dalam rangka pemberdayaan korban dalam sistem peradilan pidana maka secara mendasar dikenal dua model.<sup>104</sup>

1. Model Hak-hak Prosedural (*The Procedural Rights*)
2. Model Pelayanan (*The Servis Model*)

Model yang pertama penekanan diberikan pada dimungkinkannya si korban untuk memainkan peranan

---

<sup>104</sup> Muladi dan Barda Nawai Arief, Loc-cit

aktif di dalam proses kriminal atau di dalam jalannya proses peradilan. Dalam hal ini si korban kejahatan diberi hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau untuk membantujaksa atau hak untuk dihadirkan dan didengar disetiap tingkatan sidang pengadilan yang kepentingannya terkait di dalamnya, termasuk hak untuk diminta konsultasi oleh lembaga pema-syarakatan sebelum diberikan lepas bersyarat, dan pada akhirnya hak untuk mengadakan perdamaian atau peradilan perdata.

Pendekatan semacam ini melihat si korban sebagai seorang subjek harus diberi hak-hak yuri-dis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingan-kepentingannya. Selanjutnya, pada model pelayanan (*Services model*) penekanan diletakkan pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan, yang dapat digunakan, oleh polisi, misalnya dalam bentuk pedoman dalam rangka notifikasi kepada korban dan atau kejaksan dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif dan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan. Pendekatan ini melihat korban kejahatan sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan polisi dan pars penegak hukum yang lain.

Kedua model di atas mempunyai kelemahan maupun keuntungannya sendiri. Model hak-hak prosedural dianggap dapat memenuhi perasaan untuk membalas si korban maupun masyarakat. Dalam model ini fungsi pidana dan hukum pidana dapat berjalan dengan baik sehingga dapat menciptakan kerjasama antara polisi, jaksa dan si korban. Di samping itu si korban melalui cara ini dimungkinkan untuk memperoleh kembali harga diri dan rasa percaya diri. Keuntungan lainnya adalah hak-hak yang diberikan pada korban untuk dapat berperan secara aktif dalam proses peradilan.

Selain itu dalam model ini, hakim dapat memperoleh informasi secara langsung dari korban. Model hak prosedural dianggap memiliki beberapa kerugian diantaranya, **Pertama**, model ini dianggap dapat menciptakan konflik antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Sistem peradilan pidana harus berlandaskan pada kepentingan umum. Partisipasi si korban dalam administrasi peradilan pidana dapat menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan individu korban. **Kedua**, dapat terjadi timbulnya beban , berlebihan bagi administrasi peradilan pidana, hal ini tentu bertentangan dengan usaha untuk lebih menyederhanakannya sebagaimana kecenderungan dewasa ini. **Ketiga**, suasana asas praduga tidak bersalah mungkin akan terganggu oleh pendapat korban yang emosional.



Model kedua yaitu model pelayanan (*the servis model*), ada beberapa keuntungan yang dapat dikemukakan. **Pertama**, model ini dapat digunakan sebagai sarana pengembalian *Integrity of the system of institutionalized trust*, dalam kerangka perspektif komunal. Dalam hal ini korban akan merasa dijamin kembali kepentingannya dalam suasana tertib sosial yang adil. Suasana tertib, terkendali dan saling mempercayai dapat diciptakan kembali. **Kedua**, model ini dianggap pula dapat menghemat biaya, sebab dengan bantuan pedoman yang baku, peradilan pidana dapat mempertimbangkan kerugian-kerugian yang diderita oleh si korban dalam rangka menentukan kompensasi bagi si korban.

Kedua model di atas sebetulnya bisa dijalankan dalam *restorative justice*, mengingat dalam *restorative justice* ada 3 (tiga) isu utama, pertama memperbaiki dan memuaskan korban dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana. Kedua, memperbaiki dan memuaskan pelaku. Ketiga, memperbaiki dan memuaskan masyarakat setelah proses sistem peradilan pidana<sup>105</sup>. Dengan demikian terlihat bahwa dua model pemberdayaan korban paralel dengan tiga isu utama dari konsep *restorative justice*.

---

<sup>105</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Bandung, 2009, hlm. 161.

Dalam putusan hakim yang diteliti, tidak ditemukan adanya pemberian hak-hak korban baik berupa ganti rugi atau kompensasi dalam bentuk materi kepada korban atas *harm* yang mereka alami. Berkaitan dengan masalah kompensasi ini Victimologi melihat salah satu tujuan pengaturan ganti kerugian adalah mengem-bangkan keadilan kesejahteraan mereka yang menjadi korban, menderita mental, fisik, sosial. Hal ini menjadi obyek studi, fokus perhatian victimologi dan Ilmu Hukum Pidana, oleh karena hal ini merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial maka dalam mengevaluasinya sebaiknya harus juga berdasarkan pandangan berbagai disiplin, berbagai bidang ilmu pengetahuan, seperti ilmu-ilmu hukum, ekonomi, politik, psikologi, sosiologi, kedokteran, teknik, dan lain-lain.

Pelaksanaan peraturan ganti kerugian yang baik itu memberikan kemungkinan kepada pihak korban untuk secara leluasa ikut serta menyatakan pendapatnya.

Hal ini adalah sangat penting karena menyangkut nasibnya.<sup>106</sup> Menurut Angkasa, restitusi perlu diintegrasikan dalam sistem peradilan pidana, dengan pertimbangan bahwa restitusi merupakan lembaga pidana yang

---

<sup>106</sup> Ika Nurdevi Wibawanti, *Relevansi Victimologi Dengan Evaluasi Pengaturan Ganti Kerugian Terhadap Korban*, [www.google.com](http://www.google.com)

dapat memberikan manfaat bagi korban, pelaku, negara dan masyarakat.<sup>107</sup>, karena restitusi:

1. Sebagai penggantian kerugian finansial, perbaikan dan/atau pengobatan atas luka-luka fisik maupun penderitaan psikologis sebagai korban tindak pidana yang telah menyimpannya;
2. Restitusi akan sangat berarti, korban tindak pidana saat ini cenderung menjadi korban ganda; Pertama, menjadi korban atas tindak pidana yang menyimpannya; *Kedua*, menjadi korban ketika memasuki sistem peradilan pidana yang paradigmanya masih berorientasi terhadap pelaku.

Lebih lanjut Angkasa mengutip Schneider<sup>108</sup>, prosedur restitusi terdapat 5 (lima) cara:

1. Model “*basic restitution*” dengan prosedur pelaku membayar kepada pengadilan, dan pengadilan kemudian memberikan uang tersebut kepada korban;
2. Model “*expanded basic restitution*” dengan prosedur pelaku dicarikan pekerjaan (bagi pelaku yang berpenghasilan rendah dan pelaku berusia muda);

---

<sup>107</sup> *Ibid.*, hlm, 244

<sup>108</sup> Andrew Karmen, *Crime Victim An Introduction to Victimology*, Books/Cole Publishing Company Monterey, California, 1984, hlm, 182

3. Model “*victim assistance*” dengan prosedur pelaku diberi kesempatan membantu korban sehingga korban dapat menerima ganti rugi secara penuh;
4. Model “*victim assistance-offender accountability*” demi penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak, dilakukan dengan negoisasi dan kadang-kadang dengan mempertemukan kedua belah pihak;
5. Model “*community accountability-deterrence*” dengan prosedur permintaan ganti rugi dimintakan oleh sekelompok orang sebagai wakil dari masyarakat. Permintaan ganti rugi meliputi jenis pekerjaan yang harus dilakukan, maupun jadwal pembayaran ganti rugi.

Model “*basic restitution*” tampaknya yang paling selaras dan tepat untuk dipakai putusan hakim perkara KDRT, dengan membayar melalui pengadilan akan lebih terkontrol, dalam arti menghindarkan dari resiko pemerasan yang dilakukan korban terhadap pelaku maupun pengingkaran kewajiban pelaku untuk membayar restitusi, serta lebih memudahkan dalam penegakkan hukumnya apabila terdapat pihak-pihak yang menyalahi. Sistem restitusi, yang dalam pengertian viktimologi adalah berhubungan dengan perbaikan atau restorasi atas kerugian fisik, moril, harta benda dan hak-hak korban yang di akibatkan oleh tindak pidana, merupakan pertanggungjawaban pembuat atas tuntutan

tindakan restitutif yang bersifat pidana dalam kasus pidana, yang dalam pengertian viktimologi adalah berhubungan dengan perbaikan atau restorasi atas kerugian fisik, moril, harta benda dan hak-hak yang di akibatkan oleh tindak pidana.

Berbeda dengan kompensasi, yang diminta atas dasar permohonan, dan jika di kabulkan harus dibayar oleh masyarakat atau negara, sedangkan restitusi di tuntutan oleh korban agar di putus pengadilan dan jika diterima tuntutananya, harus dibayar oleh pelaku tindak pidana itu. Karena hakikat perbedaan demikian masih belum di realisasikan dalam kenyataan, maka sering kali tidak ada bedanya antara kedua pembayaran itu, karena yang terpenting, perhatian terhadap korban lebih dahulu, kemudian menyusul bentuk pembayaran atas kerugian korban.

Kompensasi merupakan sistem alternatif lain selain restitusi yang dapat dipakai oleh Pemerintah dalam rangka rehabilitasi atas kerugian dan/atau penderitaan untuk membantu warganya yang menjadi korban tindak pidana. Berdasar kontrak sosial (social contract), pemerintah memberikan kompensasi kepada warga negaranya karena mereka telah melaksanakan kewajiban membayar pajak dan pungutan lainnya. Dengan demikian setiap warga negara berhak mendapat perlindungan keamanan dan jaminan hidup dari pemerintah. Apabila

warga masyarakat menjadi korban tindak pidana maka pemerintah dianggap telah gagal dalam memenuhi kewajibannya yakni mencegah atau melindungi warganya dari kejahatan sehingga pemerintah memiliki tanggung-jawab moral untuk memberikan kompensasi.

Sampai saat ini praktek penanganan perkara pidana di Inonesia tidak mengenal pemberian santunan terhadap korban tindak pidana. Praktek peradilan di Indonesia mengenal adanya tuntutan ganti kerugian baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana. Khususnya di dalam perkara pidana, praktek tuntutan ganti kerugian hanya diperuntukkan bagi tersangka, terdakwa atau terpidana yang dilandaskan kepada ketentuan Pasal 95 yang menetapkan antara lain tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Tuntutan ganti kerugian yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, diputus di sidang pra peradilan Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 (Bab XII, Ganti Kerugian dan Rehabilitasi);

Tuntutan ganti kerugian didalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat dilakukan juga oleh pihak ketiga yang menderita kerugian karena perbuatan

seorang tersangka atau terdakwa (Pasal 98). Namun demikian, permintaan tuntutan ganti kerugian dimaksud baru dapat dilakukan dalam hal adanya penggabungan antara perkara perdata dengan perkara pidana. Adanya ketentuan tersebut menunjukkan bahwa upaya pembentuk Undang-Undang untuk melindungi pihak ketiga atau korban sudah ada, walaupun tidak disebut secara tegas sebagai santunan, melainkan disebut ganti kerugian.

Dari bunyi tuntutan Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 81 khususnya Pasal 98, nampak masih adanya keraguan pada pembentuk UU untuk menetapkan bahwa persoalan tuntutan ganti kerugian oleh pihak ketiga dalam suatu perkara pidana adalah sepenuhnya merupakan wewenang hukum acara pidana (hakim pidana). Menurut Romli, sesungguhnya disinilah letak kelemahan sistem hukum Eropa daratan yang dianut sampai saat ini di Indonesia sehingga baik teoritis maupun praktisi hukuman di Indonesia masih terpaku pada pemisahan secara tegas antara hukum publik dan hukum privat.

Muzakir<sup>43</sup> melihat tuntutan ganti kerugian melalui prosedur perdata tidak efisien karena memerlukan waktu

---

<sup>43</sup> Poisisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Disertasi Program Pascasarjana UI, Jakarta, 2001, hlm 309-310

yang relatif lama dan biaya relatif mahal, sedangkan ganti kerugian yang dapat dituntut melalui prosedur penggabungan dengan proses pidana, meskipun jangka waktunya relatif lebih cepat, tetapi jumlah yang dapat dituntut sangat terbatas dan sebagai perkara *assevoir*. Pelaksanaan putusan ganti kerugian menjadi tanggung jawab korban selaku penggugat dan pembayaran ganti kerugian menjadi tanggung jawab pribadi terpidana selaku tergugat. Keberhasilan tuntutan ganti kerugian karena kejahatan sangat tergantung kepada kemampuan polisi dan jaksa untuk memastikan adanya pelanggaran hukum pidana (perbuatan melawlan hukum) sebagai dasar gugatannya. Korban tidak memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum sendiri terhadap perkara ganti kerugian tersebut.

Kaitannya dengan perlindungan korban KDRT, sebenarnya korban KDRT dapat menggunakan Pasal 98 KUHP ini sebagai dasar untuk mengajukan ganti rugi atas penderitaan secara materil yang dialami korban. Namun sampai saat ini upaya mendapatkan ganti rugi melalui Pasal 98 KUHP belum pernah di ajukan korban. Untuk melindungi korban KDRT dan memberikan kesempatan untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi harus melalui perubahan UU-PKDRT dengan menambahkan Pasal tentang kompensasi dan restitusi seperti halnya yang terdapat dalam *Domestic Violence Act* no 521 Malaysia.



Upaya lain untuk memberikan kompensasi kepada korban dapat dijumpai dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan Saksi dan Korban, melalui Pasal 5 dirumuskan (1) Seorang Saksi dan Korban berhak.....(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam *kasus-kasus tertentu* sesuai dengan keputusan LPSK. Dalam Penjelasan Pasal 5 Ayat (2) dijelaskan” Yang dimaksud dengan ”kasus-kasus tertentu”, antara lain, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Apabila dikaitkan dengan tindak pidana KDRT, Pasal ini nampaknya memberi peluang kepada korban KDRT untuk meminta perlindungan sekaligus hak-hak sebagai korban apabila kondisi korban berada dalam situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Selanjutnya, di samping mengatur mengenai kompensasi, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006, juga mengatur mengenai restitusi dari pelaku kepada korban, yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b. Korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, berhak mengajukan ke pengadilan, berupa hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 13 Tahun 2006 telah mengatur

adanya tanggung jawab pelaku terhadap korban, namun penerapan jika pengadilan telah memutuskan bahwa pelaku wajib memberikan restitusi kepada korban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) ternyata kemudian tidak dilaksanakan atau tidak dipatuhi oleh pelaku. Sayangnya, Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tidak mengatur mengenai hal itu, sehingga melemahkan apa yang sudah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b.

Dalam prakteknya, masalah ganti rugi dalam kasus KDRT adalah sesuatu yang sulit karena dalam Undang-Undang P-KDRT hal tersebut tidak diatur sehingga tidak memiliki dasar hukum untuk memberikan keputusan mengenai hal tersebut. Selain itu, masalah KDRT adalah masalah yang khas karena menyangkut hubungan *person* yang sangat intim yaitu suami isteri, yang menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang tidak dapat di intervensi orang luar. Seandainya Hakim menjatuhkan keputusan memberikan ganti rugi atau kompensasi dan pelaku tidak mau membayar lalu korban lalu diadakan penyitaan terhadap barang-barang terdakwa bagaimana melaksanakannya, mengingat harta benda suami isteri tersebut merupakan juga harta gono gini/ harta bersama. Kalau hal tersebut merupakan tanggung jawab negara, instansi mana yang diberi tugas membayar ganti rugi tersebut? Hal lainnya ditemukan juga faktor yang menyulitkan bagi korban KDRT untuk mendapat perlindungan hukum berkaitan

dengan status perkawinan mereka. Misalnya, dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 956/Pid/B/2005/PN.Bdg, meskipun hidup serumah dan memiliki anak, namun korban yang tidak memiliki surat nikah, hakim tidak mempertimbangkan “*de facto*” tetapi lebih ke bukti formal berupa surat nikah, sehingga terdakwa dibebaskan dari dakwaan dengan menggunakan UU P-KDRT dan hakim menggunakan KUHP Pasal 351 tentang penganiayaan, yang sanksinya lebih rendah dari UU P-KDRT.

Meskipun sebagian kasus KDRT diselesaikan melalui jalur penegakan hukum pidana namun masih terlalu banyak perbedaan persepsi antar penegak hukum yang mengakibatkan terhambatnya penerapan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perbedaan persepsi ini menyangkut pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan dan elemen-elemennya, cakupan 'rumah tangga', serta pengelolaan dana denda yang harus dibayarkan pelaku. Hal ini disebabkan belum adanya payung peraturan-peraturan pelaksanaan dari UU P-KDRT sehingga mempersulit penanganan yang sesuai dengan apa yang dimandatkan dalam UU No. 23 Tahun 2004 ini. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tidak memperjelas isi UU Nomor 23 Tahun 2004 secara substansial namun lebih kepada kerjasama pemulihan korban saja.

Kendala budaya juga masih amat besar bagi para korban KDRT untuk menjalankan proses hukum sampai tuntas. Untuk itu suatu hal yang penting bagi keberhasilan pelaksanaan Undang-undang P-KDRT ini adalah pergeseran *mindset* pada dasarnya berfokus pada rekonstruksi budaya yakni pemaknaan ulang tentang keluarga yang selama ini dipandang sebagai institusi yang tak tersentuh dalam hal relasi suami isteri-isteri-anak dan pekerja rumah tangga. Ada transformasi pemahaman secara fundamental dalam urusan-urusan yang selama ini dianggap privat dan tersimpan rapi menjadi soal public.<sup>44</sup>

Salah satu contoh belum berfungsinya undang-undang tersebut adalah vonis yang dijatuhkan hakim dalam kasus pembakaran Rika Juanita, tidak menggunakan UU No. 23 Tahun 2004 namun menggunakan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 356 dan Pasal 354. Inilah tantangan sesungguhnya, yaitu agar peraturan hukum yang ada ditegakkan agar perempuan dan anak terbebas dari berbagai kekerasan di berbagai tempat beraktivitas dan di rumah mereka.

---

<sup>44</sup> Dede Mariana, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Sarana dan Fasilitas bagi Perlindungan dan Pelayanan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, makalah dalam Seminar Implementasi UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bandung, 2005, hlm. 3.

Disamping itu bunyi amar putusan hakim kasus-kasus KDRT hanya berisi penghukuman terhadap si pelaku tanpa sama sekali menyentuh hak-hak korban untuk mendapatkan pemulihan, apalagi ganti rugi. Disisi lain *Vonnis* yang diputuskan oleh hakim, sampai saat ini masih sangat ditentukan oleh dakwaan jaksa meskipun sebenarnya Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum Pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk penyempurnaan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya (Pasal 144 ayat (1) KUHAP)<sup>45</sup>. Padahal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia kepentingan korban kejahatan diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai bagian perlindungan masyarakat sesuai teori kontrak sosial (*social contract argument*) dan teori solidaritas sosial (*social solidary argument*).

Sesuai dengan model hak-hak prosedural (*the procedural rights model*) atau di Perancis disebut *partie civile model (civil action system)*, peran aktif korban dalam proses peradilan pidana dapat membantu jaksa

---

<sup>45</sup> Pasal 144 KUHAP menyatakan :

- (1) Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum Pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk penyempurnaan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya;
- (2) Pengubahan surat dakwaan tersebut hanya dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya 7 hari sebelum sidang dimulai;
- (3) Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan, ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik.

penuntut umum dalam mengungkapkan kejahatan yang terjadi, apalagi kalau sejak awal dilibatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara. Selain itu, dengan turut sertanya secara aktif dalam proses peradilan pidana, korban bisa mendapatkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya, sedangkan model pelayanan (*the services model*) yang menekankan pada pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi dan upaya pemulihann kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut dan tertekan akibat kejahatan.

Hal lainnya, yang kelak menjadi rekomendasi untuk diteliti lebih lanjut, adalah keberadaan lembaga Pengadilan Agama yang kewenangannya terletak pada hukum privat, khususnya berkaitan dengan kewenangan Peradilan Agama, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 49 Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah. Komnas Perempuan mencatat bahwa jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang ditangani melalui Pengadilan Agama adalah sangat signifikan.

Kompilasi data yang dilakukan Komnas Perempuan tentang penanganan kekerasan terhadap perempuan

pada tahun 2013, jumlah kasus yang ditangani oleh 359 Pengadilan Agama mencapai 263.285 kasus. Ini merupakan 78,5% dari total kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat ditangani. Pengadilan agama adalah salah satu institusi penegak hukum yang sangat berhubungan dengan penegakan berbagai perundang-undangan di atas. Meskipun untuk kategori kejahatan atau tindak pidana tetap menjadi kewenangan pengadilan negeri, tetapi laporan Tahunan Komnas Perempuan yang salah satunya dihimpun dari pengadilan agama, menunjukkan bahwa pengadilan agama adalah pintu pertama terkuaknya berbagai kekerasan dalam rumah tangga yang sebelumnya tertutup rapi di tengah rumah tangga. Karena itu, meskipun tidak langsung mengadili tindak pidananya, pengadilan agama memiliki peranan strategis dalam mengungkap peristiwa kekerasan yang terjadi.

Sebagai contoh dapat dikemukakan Putusan No: 2731/Pdt.G/2007/PA.Sby yang dalam salah satu alasan perceraian hakim mengakui adanya kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi disebabkan :

1. Tergugat tidak cocok dengan keluarga Penggugat.
2. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga misal memukul, menendang.

3. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak 11 Desember 2007 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan gugatan ini sudah berjalan selama kurang lebih 1 minggu dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir bathin

Majelis Hakim juga memberikan pertimbangan, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka sulit digambarkan bahwa Penggugat dan Tergugat akan dapat melanjutkan pembinaan rumah tangga mereka dengan sebaik-baiknya seperti yang dicita-citakan dalam agama Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Bahkan patut dikira bila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dilanjutkan, justeru akan dapat menimbulkan banyak kemudlorotan bagi keluarga mereka, karena masing-masing pihak tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik sebagai suami/isteri. Gugatan penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang No.1 tahun 1974 berikut penjelasannya, jo.Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jo.Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memberikan pertimbangan, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka sulit digambarkan bahwa Penggugat dan Tergugat akan dapat melanjutkan pembinaan rumah tangga mereka dengan sebaik-baiknya seperti yang dicita-citakan dalam agama Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Bahkan patut dikira bila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dilanjutkan, justeru akan dapat menimbulkan banyak kemudlorotan bagi keluarga mereka, karena masing-masing pihak tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik sebagai suami/isteri. Oleh karena itu majelis hakim memutuskan:

1. Mengabulkan seluruh gugatan;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat kepada Penggugat
3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukun tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah perkawinan dan domisili Penggugat dan Tergugat
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 306.000,00

Pada kasus di atas penggunaan dalil gugatan dan pemeriksaan materi gugatan sudah dikombinasikan antara

hukum yang lazim digunakan pada peradilan agama dengan hukum atau peraturan perundangan yang bersifat umum. Misalnya penerapan pasal 5 UU PKDRT tentang kekerasan, memberikan gambaran yang sangat jelas pelaku (Tergugat) benar-benar melakukan berbagai tindak kekerasan sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut. Hal ini sesuai dengan KHI Pasal 116 yang menyebutkan salah satu alasan perceraian adalah karena adanya penganiayaan suami.

Penggunaan UU tersebut menghasilkan putusan yang lebih memihak kepada yang berhak, lemah, rentan, dalam hal ini korban yang berjuang keras untuk mendapatkan hak-haknya. Penerapan pasal-pasal UU Perlindungan Anak juga membawa dampak positif terhadap perkembangan anak, walaupun sebuah perceraian tetap akan menyisakan dampak kurang baik pada mereka. Akan tetapi dampak positif ke depan jauh lebih menjanjikan dengan penghentian situasi penuh kekerasan dengan putusan perceraian tersebut. Perceraian memang merupakan perbuatan halal yang tidak disukai Allah SWT, akan tetapi diperkenankan dalam upaya untuk mencari keadilan. Maka, asas memberikan bantuan yang selama ini dipedomani hakim dapat dijalankan dengan niatan untuk memberikan bantuan bagi para pencari keadilan, dalam hal ini korban KDRT.

#### **D. Adakah hak-hak Korban KDRT Dalam Putusan Hakim**

Penulis tampilkan beberapa putusan Hakim di beberapa pengadilan negeri sebagai bahan untuk menelaah lebih lanjut tentang hak-hak korban KDRT.

##### **1) Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 238/Pid.B/2004/PN.Klt**

Pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2004 sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa Irwan Anis Mahsun, telah menyiram isterinya (saksi korban) Rikha Nia Januanita, dengan minyak tanah. Terdakwa kemudian mengambil korek api yang selanjutnya korek api yang telah menyala tersebut disulutkan pada tubuh Rikha Nia Januanita. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Rikha Nia Januanita mengalami luka bakar di seluruh tubuhnya selanjutnya dibawa ke ICU Rumah Sakit Islam Klaten. Atas perbuatannya ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan terdakwa di persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 356 ayat (1) KUHP, dengan tuntutan: menyatakan terdakwa (Irwan Anis Mahsun), terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap isteri sebagaimana dalam dakwaan Pasal 356 ayat (1) KUHP, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun.

Keputusan Majelis Hakim di atas, didasarkan atas beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- (1) Menimbang, bahwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukan serta diatur menurut ketentuan Pasal 356 ayat (1) KUHP adalah mengenai adanya perbuatan hukum atas suatu perbuatan pidana yang melanggar pasal 351. 354 dari KUHP;
- (2) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan maka terhadap keten-tuan pasal 356 ayat (1) KUHP tersebut maka Majelis Hakim, akan mempertimbangkan pasal 354 (1) KUHP yang menjadi dasar atas ketentuan hukum yang berlaku seluruhnya dengan per-buatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
  - a. Barang siapa  
Barang siapa adalah tiap orang sebagai subyek hukum (*Naturlijke persone*) dan kepada subjek hukum tersebut dapat diminta bertanggung jawabnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya, dalam hal ini adalah terdakwa bernama Irwan Anis Mahsun.
  - b. Dengan sengaja melukai berat:

- (a) Berdasarkan fakta-fakta diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa serta barang bukti yang diajukan Sdr. Penuntut Umum terungkap fakta-fakta, pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2004 sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa Irwan Anis Mahsun, telah membakar saksi korban Rikha Nia Januanita, dengan minyak tanah.
- (b) Berdasarkan hasil Visum et Repertum serta melihat keadaan korban Rikha Nia Januanita, sebelum dibakar dan sesudah dibakar, benar saksi korban Rikha Nia Januanita mengalami luka berat akibat perbuatan terdakwa. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan besar dengan sengaja menganiaya berat telah terbukti terpenuhi secara sah dan meyakinkan
- (c) Pertimbangan subyektif: Perbuatan terdakwa sangat merugikan orang lain yaitu terhadap istrinya sendiri; perbuatan terdakwa dilakukan tanpa rasa manusiawi dan terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan di persidangan

dan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam putusannya menyatakan terdakwa Irwan Anis Mahsun, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Kejahatan” dengan sengaja melukai berat istrinya dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irwan Anis Mahsum, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun. Namun putusan ini tidak hanya menghukum pelaku tanpa memberikan kompensasi apaun untuk korban, padahal penderitaan korban akibat kekerasan tersebut telah menyebabkan cacat permanen.

## **2) Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 956/Pid/B/2005/PN.Bdg**

Terdakwa Dadang Iskandar, di ajukan ke Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa tindak pidana “Penganiayaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia” berdasarkan Pasal 351 KUHP, meskipun pada awalnya terdakwa diajukan dengan menggunakan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan fakta di persidangan:

- (a) dari bukti-bukti yang diajukan dalam Persidangan tidak satu alat bukti yang menunjukkan bahwa antara terdakwa dengan korban terikat secara hukum dan sah sebagai suami istri, sebagaimana dikemukakan penuntut umum dalam dakwaannya sehingga karena unsur ini tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu primair;
- (b) terhadap dakwaan pertama subsidair di mana terdakwa didakwa melanggar pasal 338 KUHP, karena tidak ditemui satu alat bukti tentang niat terdakwa membuat korban meninggal dunia dan tidak pula ditemui alat bukti yang menunjukkan perbuatan terdakwa melempar pisau sangkur ke bagian vital tubuh korban yang dapat menyebabkan korban meninggal dunia, maka unsur inipun tidaklah terpenuhi sehingga unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan ini;
- (c) terhadap dakwaan pertama lebih subsidair yaitu perbuatan terdakwa melanggar pasal 351 ayat 3 berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa dan barang bukti pisau sangkur, serta Visum et Repertum telah ternyata korban mengalami luka dibagian pinggang yang menurut terdakwa luka tersebut adalah akibat

dari pisau sangkur miliknya yang dilemparkannya ke tembok dimana korban berada dibawahnya;

- (d) Menurut Majelis Hakim, seharusnya terdakwa mengerti bahwa akibat pisau yang dilemparkannya ke tembok, besar kemungkinannya akan mengenai korban yang berada di bawahnya dan nyatanya pisau tersebut telah mengenai korban dibagian pinggang sehingga akibatnya korban mengalami luka dan kemudian bahkan meninggal dunia sebagaimana diterangkan terdakwa dan dapat dilihat dari surat bukti Visum et Repertum dalam perkara ini;
- (e) menimbang dengan demikian semua unsur-unsur dalam dakwaan penuntut umum ke satu lebih subsidair telah terpenuhi dan terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia”;
- (f) Pertimbangan subyektif: perbuatan terdakwa dilakukan kepada orang yang dekat kepadanya; akibat perbuatan terdakwa, anak-anak korban kehilangan ibunya dan terdakwa bersikap sopan dalam persidangan; terdakwa membantu biaya pemakaman korban.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam putusannya menyatakan terdakwa Dadang Iskandar



bin Ucup Suryana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia”; dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun.

### **3) Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor : 19/Pid.B/2005/PN.TTN**

Dalam perkara pidana ini, Terdakwa H.T. Arbet Bin T. Banta pada hari Rabu, tanggal 10 Nopember 2004 bertempat dirumahnya di Lr. Mustakim Desa Kimau Purut, Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara, kabupaten Aceh Selatan telah melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap istrinya Hj. Rukmini Binti Hamdani yang dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa memukul kepala istrinya dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa yang sudah dikepal kearah kepala bagian belakang sebelah kiri istrinya, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut isteri terdakwa mengalami luka memar pada bagian kepala.

Majelis hakim menjatuhkan Putusan di atas didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa, menunjuk subyek hukum yaitu orang yang terhadapnya dapat dipertang-

gungjawabkan apabila tindak pidana yang didakwakan kepadanya berdasarkan alat-alat bukti yang sah terbukti bersalah

2. Unsur melakukan Perbuatan kekerasan Fisik. Berdasarkan keterangan saksi yang dihubungkan dengan alat bukti berupa visum et repertum, terdakwa telah memukul kepala bagian belakang isterinya Hj. Rukmini dengan cara melayangkan tangan kanan yang dusah dikepal sehingga mengenai kepala bagian kiri menyebabkan memar. Rukmini tidak bisa melakukan aktifitas selama 3 hari dan mengalami pusing serta mual akibat pemukulan tersebut.
3. Selama pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang menghapus kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun pemaaf dan tidak pula terdapat alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan oleh karenanya terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan dan harus dijatuhi pidana.
4. Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

5. Pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yaitu :
  - a. yang memberatkan, terdakwa sudah pernah dihukum;
  - b. yang meringankan, terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi; terdakwa mempunyai tanggungjawab keluarga.
6. Terdakwa H.T. Arbet Bin T. Banta tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan dalam rumah tangga”;
7. Menghukum terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

**4) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1352/Pid.B/2008/PN.JKT.Sel**

Terdakwa Jeffrey Ruslipada hari Senin tanggal 31 desember 2007 bertempat di Apartemen Senayan Residence Tower 2 Unit 2083 Jl. Patal Senayan I Rt. 003/007 No. 5 Jakarta telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan pidana:

1. Dakwaan Kesatu Subsidair yakni melanggar pasal 44 ayat (4) UU No. 23 tahun 2004 yang unsur-unsurnya terdiri dari :
  - a. Setiap Orang;
  - b. Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik;
  - c. Dalam Lingkup Rumah Tangga;
  - d. Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian, atau kegiatan sehari-hari.
2. Unsur “melakukan perbuatan kekerasan fisik” Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut unsur ini terkait dengan pengertian kekerasan fisik menurut pasal 44 ayat (4). maksud dan rumusan yang diberikan maka kekerasan fisik yang dimaksudkan dalam pasal 44 ayat (4) adalah *kekerasan fisik ringan yang menimbulkan penyakit ataupun halangan bagi korban*.

Menimbang, bahwa telah diutarakan sebelumnya, benar Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik kepada isterinya sanksi Henny Kentjanawati, yang mengakibatkan luka memar dan rasa sakit, namun rasa sakit tersebut ternyata tidak menjadi penghalang bagi saksi Henny Kentjanawati melakukan aktifitasnya. Hal mana terbukti dari masih dapatnya saksi mengantarkan anaknya ke sekolah

serta bertemu dengan saksi N.D. Hariman di Senayan City.

Dengan demikian, dari keadaan dan kondisi diatas, Majelis sampai pada kesimpulan walaupun saksi mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa, namun kekerasan tersebut hanya menimbulkan rasa sakit semata, sehingga klasifikasi tentang kekerasan fisik menurut pasal 44 ayat (4) dari UU No. 23 tahun 2004 telah terpenuhi.

3. Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar ketentuan pasal 44 ayat (4) UU No. 23/2004 maka terdakwa haruslah dihukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pidana mana yang akan dijatuhkan tidak dimaksudkan untuk pembalasan namun untuk semata-mata agar terdakwa dapat memperbaiki sikap sehingga bila tiba saatnya untuk terjun ditengah masyarakat dapat diterima kembali.
4. Sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :
  - a. Hal-hal memberatkan: menimbulkan trauma bagi saksi korban Henny Kentjanawati; terdakwa berbelit di persidangan
  - b. Hal-hal yang meringankan: terdakwa sopan di pengadilan

Terhadap perkara pidana di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan:

- a. Terdakwa Jeffrey Rusli dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” melakukan Perbuatan Kekerasan dalam rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari.
- b. Menghukum terdakwa Jeffrey Rusli dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

#### 5) Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 76/Pid.B/2008/PN.Bkn

Dalam perkara pidana ini, terdakwa **Eston Hasudungan Sianturi**, pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2007 sekitar pukul 17.30 WIB telah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dengan cara terdakwa memukul kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan carta meninjukan tangannya dan ke arah mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, juga memukul punggung saksi korban dengan menggunakan tangkai sapu. Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami sakit dan pusing pada bagian kepala, mata sakit serta kabur saat memandang, sesuai dengan

*visum et repertum* No. 1252/440/VERKS/PKS/2007 tanggal 21 Nopember 2007.

Terhadap perkara pidana ini, majelis hakim telah mempertimbangkan dakwaan jaksa penuntut yang dibuat secara alternatif. Dakwaan yang majelis hakim pertimbangkan yaitu dakwaan pertama bahwa terdakwa Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Unsur Barang siapa:**

Unsur ini mensyaratkan bahwa subyek atau pelaku dalam tindak pidana ini haruslah orang atau manusia, sehingga apabila dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa yang diajukan dan diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang atau manusia yaitu orang yang bersama Eston Hasudungan Sianturi dengan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan;

**2. Unsur melakukan kekerasan fisik**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban Santiyana Br Simatupang saksi Mariati Br. Sianturi dan saksi Rusdi Bin Abdurrahman dihubungkan dengan keterangan terdakwa, fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan terdakwa men-

dorong saksi korban menyuruh saksi korban pergi tetapi saksi korban tidak mau sehingga terjadi saling dorong mendorong selanjutnya terdakwa meraih tangkai sapu plastik yang dipegang oleh saksi korban dengan tangannya kearah kepala saksi korban serta memukul saksi korban dengan tangannya kearah kepala saksi korban sebanyak 3 kali ke bagian mata kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami sakit kepala / pusing dan sakit mata / kabur saat memandang sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 1252/440/VERKS/ PKS/2007 tanggal 21 Nopember 2007, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yunita Rinasari, dokter Puskesmas Siak Hulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan kekerasan fisik pada diri korban yang dilakukan Terdakwa telah terpenuhi;

### **3. Unsur dalam lingkup rumah tangga**

Menimbang, bahwa dari semua keterangan saksi yang diajukan Penuntut Umum yang juga bersesuaian dengan keterangan terdakwa, diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah suami Santiyana Br Simatupang (saksi korban) meskipun sudah tidak



satu rumah dengan terdakwa sejak tahun 2006 akan tetapi tidak ada surat perceraian dan saksi Santiyana Br Simatupang sering datang ke rumah terdakwa untuk melihat anak-anaknya dan sering juga tidur dirumah terdakwa; dengan demikian hubungan antara terdakwa dengan saksi korban masih dalam ruang lingkup rumah tangga, berdasarkan fakta tersebut di atas majelis hakim berpendapat unsur dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi.

4. Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

a.-----  
ang memberatkan: Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban Santiyana Br Simatupang sakit; perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

b.-----  
ang meringankan: terdakwa menyesali perbuatannya; terdakwa belum pernah dipidana; terdakwa memiliki tanggungan anak.

Mendasari beberapa pertimbangan di atas, maka dalam perkara pidana ini majelis hakim mengadili terdakwa dengan :

- a. Menyatakan terdakwa ESTON HASUDUNGAN SIANTURI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan: “Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga :
- b. Memindana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan;

**6) Putusan Pengadilan Negeri Depok Perkara Pidana Nomor : 884/Pid.B/2008/PN.Dpk**

Terdakwa Rudy Hambali pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2008 sekitar jam 16.00 WIB bertengkat hebat dan saling memukul, pada saat korban meludahi muka Terdakwa, kemudian Terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga korban jatuh terlentang lalu sewaktu korban hendak berdiri tangan kanan Terdakwa memegang leher korban sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang tangan korban yang berhasil meraih sebilah pisau dapur lalu dengan kekuatan tangan Terdakwa memutar arah pisau dapur yang dipegang oleh korban ke arah dada korban kemudian Terdakwa memasukkan pisau dapur tersebut ke arah dada korban sebanyak 2 (dua) kali hingga luka mengeluarkan darah, melihat hal

tersebut terdakwa langsung melempa/membuang pisau dapur tidak jauh dari posisi korban.

Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dari keterangan Terdakwa korban Regina Ileana Mailangkey adalah isteri Terdakwa Rudy Hambali yang menikah pada tanggal 02 Nopember 1996 di Gereja Santo Fransiskus Asisi Menteng, Jakarta Selatan, dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Propinsi Jakarta dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2471/I/1996 dan telah mendapat 5 (lima) orang anak masing-masing bernama. Peter berusia 12 tahun, Robert berusia 11 tahun, Rico berusia 10 tahun, Paulina berusia 5 tahun, dan Richard 3 tahun.

Majelis Hakim memberikan pertimbangan:

1. Unsur barang siapa, menunjuk subyek hukum yaitu orang yang terhadapnya dapat dipertanggung jawabkan apabila tindak pidana yang didakwakan kepadanya berdasarkan alat-alat bukti yang sah terbukti bersalah.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga pengertian kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan sakit, berdasarkan fakta

dipersidangan terungkap terdakwa awalnya bertengkar dengan korban dan saling memukul kemudian pada sat korban meludahi muka terdakwa kemudian terdakwa mencekik leher korban dengan kedua tangannya sehingga korban jatuh terlentang lalu terdakwa meraih pisau dan menusuk pisau tersebut ke arah dada korban sehingga korban meninggal dunia.

3. Unsur mengakibatkan matinya korban

Berdasarkan hasil visum et repertum Nomor 985?SK.II/07/2008 terungkap sebab kematian korban adalah akibat kekerasan tajam (luka tusuk) pada dada bagiankiri yang menembus rongga dada serta merobek jantung dan paru-paru sehingga menimbulkan pendarahan dan menyebabkan kematian.

4. Sebelum menjatuhkan putusan, berdasarkan Pasal 197 (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. Hal-hal yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa menyebabkan meninggalnya korban Regina Ileana Mailangkey.
- b. Hal-hal yang meringankan: terdakwa belum pernah dihukum; terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; terdakwa berterus terang dan sopan di

persidangan; terdakwa masih mempunyai tanggung jawab sebagai ayah dari 5 (lima) orang anak-anaknya masih kecil;

Mengingat Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta peraturan-peraturan lainnya, Majelis Hakim mengadili terdakwa dengan :

- a. Menyatakan Terdakwa Rudy Hambali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan mantinya korban.
- b. Menjatuhkan Terdakwa Rudy Hambali atas perbuatan tersebut dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

**7) Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor : 32/Pid.B/2009/PN.Bbs**

Terdakwa Imas Priyadi Bin Suharto diajukan ke pengadilan atas tuduhan “telah melakukan perbuatan kekerasan fisik, dalam lingkup rumah tangga, yang mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat” (Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga);

Pada bulan Oktober 2008, terdakwa Imas menyiram wajah korban dengan bensin dan dinyalakan dengan korek api sehingga bagian wajah dan kepala korban menyala.

Majelis Hakim mempertimbangkan:

1. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta telah mempelajari/memperhatikan barang bukti yang diajukan, jika dihubungkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis berpendapat bahwa semua unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut telah terbukti dengan sah dan meyakinkan, oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum;
2. **Hal-hal yang memberatkan:** perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Sapuroh Binti Kalil mengalami luka bakar  
**Hal-hal yang meringankan :** terdakwa terus terang dan bersikap sopan di persidangan; terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal atas perbuatannya; terdakwa belum pernah dihukum serta adanya surat pernyataan

pencabutan perkara yang dibuat oleh saksi  
SAPUROH

3. Menyatakan bahwa terdakwa Imas Priyadi Bin Suharto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “telah melakukan perbuatan kekerasan fisik, dalam lingkup rumah tangga, yang mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

**8) Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor :  
01/Pid.B/2009/PN.YK**

Yacob Sugiarto, telah melakukan penganiayaan (memukul) terhadap saksi Lina Suryaningsih sebanyak tiga kali, satu kali menggunakan tangan kanan mengenai pipi sebelah kiri, dan dua kali menggunakan tangan kanan mengenai pipi sebelah kanan dan dagu dan menarik atau menjambak rambut saksi Lina Suryaningsih, sehingga Lina Suryaningsih mengalami memar-memar.

Majelis Hakim menjatuhkan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti, telah ditemukan fakta-fakta hukum terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif berlapis Kesatu dan Kedua dan oleh karena itu Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang dakwaan kesatu yang mendakwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam hukum dalam pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
  - a. Unsur barang siapa
  - b. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga
2. Untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah atas perbuatan sebagaimana yang disebutkan dalam terdakwa kesatu tersebut, maka unsur-unsur tersebut harus terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;
  - a. Unsur barang siapa  
barang siapa adalah menunjuk orang atau seseorang sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan dari padanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya. Dalam perkara ini yang



diajukan satu orang Laki-laki bernama Yacob Sugiarto sebagai terdakwa yang telah melakukan tindak pidana dan dari padanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya karena sepanjang persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahannya.

- b. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, pengertian “kekerasan fisik” dalam unsur ini ialah sebagaimana yang diuraikan dalam pasal 5 huruf a Undang-Undang No. 23 tahun 2004, yakni perbuatan mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, luka berat.
  - c. Sesuai dengan fakta hukum, pada hari Rabu, tanggal 17 September 2008 terdakwa telah melakukan penganiayaan yaitu memukul saksi Lina Suryaningsih sebanyak tiga kali, satu kali menggunakan tangan kanan mengenai pipi sebelah kiri, dan dua kali menggunakan tangan kanan mengenai pipi sebelah kanan dan dagu dan menarik atau menjambak rambut saksi Lina Suryaningsih.
3. Pasal 5 huruf a Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah

tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya.

4. Pasal 2 Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 menjelaskan bahwa yang dimaksud lingkup rumah tangga adalah meliputi a. Suami, isteri dan anak; b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwakilan. Yang menetap dalam rumah tangga; dan atau c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;
5. Atas pengertian tersebut di atas, Majelis selanjutnya mempertimbangkan memor yang dialami oleh saksi Lina Suryaningsih adalah akibat kekerasan fisik yang terjadi yang dilakukan oleh terdakwa yang terikat dalam rumah tangga dengan saksi Lina Suryaningsih, yang berdasarkan bukti adalah isteri sah dari terdakwa yang menikah pada tanggal 11 Juni 1997 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 647/ WNI/ 1997 yang dikeluarkan di catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan dari perkawinan antara terdakwa dengan saksi Lina Suryaningsih telah lahir 2 orang anak;

6. Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dengan teliti dan cermat tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang dapat dijadikan alasan pembeda ataupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan kesalahannya;
  7. Hal yang memberatkan: terdakwa berbelit-belit di persidangan  
Hal-hal yang meringankan: terdakwa menyesali perbuatannya; terdakwa belum pernah dihukum
  8. Berdasarkan pertimbangan di atas, secara keseluruhan dalam putusan ini Majelis berkeyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan atas terdakwa telah sesuai dengan rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan terdakwa;
- Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim memutuskan:
- a. Menyatakan terdakwa Jacob Sugiarto tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;
  - b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JACOB SUGIARTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Dari berbagai putusan hakim dalam perkara KDRT, dapat dicatat beberapa hal:

**a. Disparitas pemidanaan dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri**

Dalam hal mengkaji batasan benar atau salahnya suatu putusan hakim, Sabin mengajukan suatu kesulitan dalam mengkaji putusan hakim, yaitu tidak diketahuinya keputusan yang benar dan salah sehingga mungkin hanya Tuhan yang mengetahui apakah suatu keputusan perkara pidana adalah benar atau salah. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh hakim dalam pengambilan keputusan adalah disparitas pemidanaan.

Menurut Barda Nawawi Arief<sup>101</sup>, “Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama, atau terhadap tindak pidana yang bersifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Penyebab disparitas bersumber pada diri hakim, baik internal maupun eksternal. Hood dan Sparks mengungkapkan sifat internal dan eksternal ini kadang sulit dipisahkan, karena sudah terpadu sebagai

---

<sup>101</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm 52

atribut seseorang yang disebut sebagai “*human equation*” atau “*personality of the judge*” dalam arti luas yang menyangkut pengaruh-pengaruh latar belakang sosial, pendidikan, agama, pengalaman, perangai dan perilaku sosial. Selanjutnya disparitas berkaitan dengan persepsi hakim terhadap “*philosophy of punishment*” dan “*the aims of punishment*” yang oleh Molly Chengdikatakan sebagai “*the basic difficult*” sangat memegang peranan penting di dalam penjatuhan pidana.<sup>102</sup>

Disparitas penjatuhan pidana dalam beberapa kasus KDRT terlihat pada tabel dibawah ini:

**Pemidanaan Tindak Pidana KDRT**

Nomer Putusan	Tindak pidana yang terbukti	
1	2	
<i>Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinan Nomor:</i>	Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” ( <i>Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun</i>	pidan selam tahun

---

<sup>102</sup>*Ibid.*, hlm. 58

<i>76/Pid.B/2008/PN.Bkn</i>	<i>2004:Pen)</i>	(enan
<i>Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Pidana Nomor : 301/Pid.B/PN.BKN</i>	Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Korban Jatuh Sakit”; ( <i>Pasal 44 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2003</i> )	pidan selam bulan
<i>Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 1143/Pid.B/2006/PN. BDG</i>	Melakukan kekerasan fisik dalam lingkungan keluarga rumah tangga yang mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat” ( pasal 44 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004)	pidan selam tahun bulan
<i>Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes Nomor : 32/Pid.B/2009/PN.Bbs</i>	telah melakukan perbuatan kekerasan fisik, dalam lingkup rumah tangga, yang mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat”	pidan selam tahun
<i>Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 01/Pid.B/2009/PN.YK</i>	perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” ( <i>Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004</i> )	pidan selam bulan
<i>Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor :</i>	kekerasan dalam rumah tangga” ( <i>Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004</i> )	pidan selam bulan

19/Pid.B/2005/PN.TTN		
----------------------	--	--

Dari tabel diatas, nampak adanya disparitas pemidanaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu pemidanaan terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dan pemidanaan terhadap tindak pidana kekerasan fisik yang mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, disampaikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 11**

**Disparitas Pemidanaan Tindak Pidana Kekerasan Fisik  
yang mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka  
berat**

No	Nomer Perkara	Pertanggungja waban pidana
----	---------------	-------------------------------

1	Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 301/Pid/B/PN.BKN	Pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
2	Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 1143/Pid.B/2006/PN. BDC	Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan
3	Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes Nomor : 32/Pid.B/2009/PN.Bbs	Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun

Dari pertimbangan yang disampaikan dalam putusan hakim terlihat Hakim hanya memutuskan berdasarkan penafsiran pasal seperti yang tertulis dalam undang-undang. Hal ini nampak dalam putusan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1352/Pid.B/2008/PN.JKT.Sel terhadap terdakwa



Jeffrey Rusliyang melakukan perbuatan kekerasan fisik”, hakim mempertimbangkan unsur ini terkait dengan pengertian kekerasan fisik menurut pasal 44 ayat (4). maksud dan rumusan yang diberikan maka kekerasan fisik yang dimaksudkan dalam pasal 44 ayat (4) adalah *kekerasan fisik ringan yang tidak menimbulkan penyakit ataupun halangan bagi korban*, dengan pertimbangan kekerasan fisik terhadap Henny Kentjanawati, yang mengakibatkan luka memar dan rasa sakit, namun rasa sakit tersebut ternyata tidak menjadi penghalang bagi saksi Henny Kentjanawati melakukan aktifitasnya. Hal mana terbukti dari masih dapatnya saksi mengantarkan anaknya ke sekolah serta bertemu dengan saksi N.D. Hariman di Senayan City. Padahal dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan hakim mengakui kekerasan tersebut menimbulkan trauma bagi korban. Faktor ini tidak diperdalam oleh hakim sehingga hakim berkesimpulan kekerasan yang terjadi adalah *kekerasan fisik ringan yang tidak menimbulkan penyakit ataupun halangan bagi korban*. Penafsiran hakim yang demikian ini mengakibatkan putusan pidana yang dijatuhkan sangat ringan (hanya 2 bulan penjara) dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku, seperti yang dikatakan Cesare Beccaria dan Jerome Bentham dalam teorinya yaitu *Deterrence Theory* menekankan pada aspek penghukuman atau

pada aspek sistem peradilan pidana, yaitu mulai dari perumusan ancaman pidana, proses penyidikan, penuntutan, penegakkan hukum, sampai dengan proses penjatuhan hukuman yang kesemuanya diarahkan terjadinya atau timbulnya efek *deterrence* atau jera sebagai tujuan utama, hal ini akan mencegah terjadinya tindak kejahatan yang sama untuk berulang. Lebih lanjut dikatakan oleh Beccaria dan Bentham, aspek penghukuman dan sistem pemidanaan tersebut baru bisa efektif dan menimbulkan efek jera (*deter*) ketika dalam pemidanaan tersebut terdapat unsur-unsur: ancaman sanksi hukuman yang cukup membebani (*severe*); ancaman sanksi hukuman yang seimbang (*fit*) dengan perbuatan jahat yang dilakukan, tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan bila dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukannya dan sanksi hukuman harus diberikan dengan segera, yaitu diberikan ketika setelah perbuatan jahat tersebut dilakukan (*celerity*) serta adanya unsur kepastian dalam pelaksanaan penghukumannya (*certainty*).

Komariah<sup>103</sup> menyebutkan hukum pidana adalah hukum undang-undang, sebagai kesimpulan dari *sine*

---

<sup>103</sup> Dalam bukunya *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia, Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Bandung: Alumni, 2002, hlm. 12-15

*praevia lege poenali*. Lebih lanjut menurut Komariah, dari undang-undang orang dapat melihat apa yang menjadi tujuan hukum dan melihat kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dan *kata-kata dari undang-undang mempunyai arti, arti ini menentukan makna ketentuan yang bersangkutan*.

Berkaitan dengan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pidana sesungguhnya hakim juga memperhatikan kondisi korban sebagai akibat kejahatan yang terjadi, melalui fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan. Namun tentu saja setiap hakim memiliki kepekaan sendiri dalam pertimbangannya, dan hakim memeriksa serta mengadili berdasarkan Surat Dakwaan yang merupakan lingkup perkaranya sehingga sangat tidak mungkin bagi hakim untuk keluar dari *frame work* yang sudah ditentukan tersebut.<sup>104</sup> Masalah penafsiran unsur-unsur perbuatan, yang utama memang *penafsiran otentik* karena lebih dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, sedangkan penggalan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat hanya menyangkut perkara yang tidak ada peraturan yang mengatur atau ada ketidak jelasan dalam perundang-undangan Dalam

---

<sup>104</sup>Wawancara dengan Hakim Gatot Supramono, PT Pekanbaru, 10 Juni 2009

bekerja hakim hanya melaksanakan bunyi undang-undang saja.<sup>105</sup>.

Hal ini membuktikan masih kuatnya pandangan *legal positivistic* yang membelenggu hakim, untuk menegakkan undang-undang dan peraturan yang ada secara tekstual. Padahal “hukum adalah karya manusia yang berupa karya manusia yang berisi petunjuk tingkah laku, merupakan pencerminan dan kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan dibawa ke arah mana. Oleh karena itu hukum mengandung rekaman ide-ide yang dipilih masyarakat dari tempat hukum diciptakan, yaitu ide keadilan<sup>106</sup> Menghadapi sikap hakim yang demikian mungkin perlu dipertanyakan di manakah letak hubungan moral dan hukum?

Komariah<sup>107</sup> menjawab *moral rakyat bersembunyi dalam asas-asas hukum*, seperti yang dikatakan Scholten *asas-asas hukum ada dalam kehidupan batin*. Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang menetapkan asas hukum: penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender,

---

<sup>105</sup> Wawancara dengan Hakim, Aruminingsih, PN Depok, 15 Juli 2009

<sup>106</sup> Satjipto rahardjo, Ilmu Hukum, bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 18

<sup>107</sup> Komariah, Loc-cit.

non diskriminasi serta perlindungan hukum, seharusnya di dalam memutuskan perkara KDRT hakim menerapkan asas tersebut dalam keputusannya untuk memberikan hak-hak korban. Soedarto, pernah mengingatkan ....bagaimanapun rasa keadilan yang tersimpan dalam hati nurani masyarakat harus pula dirasakan hakim dan dipertimbangkan, dalam membuat keputusan, hakim harus meletakkan telinga di dada rakyat agar dapat mendengar detak jantung masyarakat, meskipun tetap harus berada dengan kokohnya di atas landasan hukum.<sup>108</sup>

Lintong O Siahaan mengatakan dalam memutuskan perkara hakim berada di antara 2 titik yaitu kepastian hukum dan keadilan (asas kemanfaatan berada di tengahnya) dengan suatu pertimbangan yang nalar, hakim harus menentukan kapan dia berada dekat dengan titik kepastian hukum dan kapan dia berada dekat dengan titik keadilan, dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan yang ada<sup>109</sup>.

Idealnya putusan harus memuat *idee des Recht*, yang meliputi tiga unsur yaitu keadilan

---

<sup>108</sup>*Dampak Putusan Hakim Pidana bagi Masyarakat*, makalah dalam Seminar "Menuju Sistem Administrasi Peradilan Pidana yang Ideal, Universitas Diponegoro, Semarang, 3 November 2004

<sup>109</sup>Lintong O Siahaan, Loc-Cit.

(*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*). Ketiga unsur tersebut semestinya oleh Hakim dipertimbangkan dan diterapkan secara proporsional, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang benar-benar memenuhi harapan para pencari keadilan. Dalam praktiknya para hakim punya dalih, apabila pencari keadilan (*justiciabellen*) tidak puas dengan putusan yang dijatuhkan, mereka dipersilahkan mengajukan upaya hukum yang ada, banding atau kasasi.

Sebagai perbandingan, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Evi Deliana<sup>110</sup>, tentang Kajian Terhadap Putusan Perkara No. 393/Pid.B/2006/PN.PBR tentang Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga, menunjukkan penafsiran hakim juga tidak menyentuh sampai ke “bagian dalam” (psikis) korban meskipun jelas-jelas hal tersebut terjadi sebagai akibat perbuatan pelaku.

SI dan LS menikah tanggal 13 Nopember 1984 dan mempunyai tiga orang anak yang pertama laki-laki umur 19 tahun, kedua SMA dan yang ketiga kelas V SD. Perkawinan ini telah putus dengan perceraian di Pengadilan Agama. LS menerima perceraian tersebut, tetapi SI tidak mau menyerahkan hak LS, maka LS

---

<sup>110</sup> Jurnal Yudisial Vol-I/No-02/November/2007

banding. Adapun penyebab perceraian mereka adalah karena adanya pihak ketiga yang bernama RN.

Sejak tahun 2003 SI tidak lagi memberikan nafkah bathin kepada LS dan memberikan nafkah lahir yang kurang mencukupi kebutuhan LS beserta anaknya padahal sebelumnya SI menyerahkan seluruh gajinya kepada LS. Pisah ranjang yang dilakukan terjadi atas permintaan SI, karena SI telah berhubungan dengan wanita lain yaitu RN dan sering menelpon wanita tersebut di rumahnya di depan LS dan anak-anaknya, padahal menurut keterangan LS, RN telah mempunyai suami. Akibat perbuatan SI tersebut LS sering merasakan kekecewaan, sering melamun, sering marah-marah tidak menentu dan sering sakit kepala sehingga menjadi halangan bagi LS menjalankan kegiatan sehari-hari.

Berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa No.441.i/RSJPYM.I/81.33 tertanggal 14 Oktober 2005 yang ditandatangani Dr. Maisarah ZAS. Sp.KJ Dokter Rumah Sakit Jiwa Pekanbaru didapat hasil pemeriksaan ditemukan adanya Gangguan Penyesuaian dengan Efek campuran. Bahwa ciri-ciri orang yang terkena efek campuran adalah biasanya penderita akan terganggu melakukan pekerjaan. Gangguan dapat menimbulkan penyakit gangguan itu membuat pekerjaan sehari-hari penderita jadi terhalang dalam

kejiwaannya dan penderita bisa jadi pemarah, pemurung, sedih dan sebagainya. Dalam keputusannya majelis hakim tidak mempertimbangkan keterangan dari saksi ahli sehingga dakwaan primair penuntut umum tidak terpenuhi unsur unsurnya yang seharusnya diancam dengan hukuman maksimal tiga tahun penjara. Disini terdakwa telah melakukan kekerasan psikis lebih kurang waktu 3 tahun, sehingga membuat batin saksi LS menderita secara terus-menerus. Hakim memutuskan yang terbukti adalah tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Atas pertimbangan ini hakim menjatuhkan keputusan pidana selama 3 (tiga) bulan penjara dengan masa percobaan 6 (enam) bulan. Dengan demikian terdakwa tidak perlu menjalani hukuman tersebut.

Mengenai penjatuhan hukuman, sesuai dengan teori pidana nampaknya hakim lebih banyak menggunakan teori relatif dibandingkan Teori absolut. Teori relatif tidak melihat hukuman itu sebagai pembalasan, dan karena itu tidak mengakui bahwa hukuman itu sendirilah yang menjadi tujuan penghukuman, melainkan hukuman itu adalah suatu cara untuk mencapai tujuan yang lain daripada



penghukuman itu sendiri. Hukuman, dengan demikian mempunyai tujuan, yaitu untuk melindungi ketertiban. Namun teori relatif menunjukkan tujuan hukuman sebagai usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Menghindarkan, agar umumnya orang tidak melakukan pelanggaran bahkan ditujukan pula bagi terdakwa agar tidak mengulangi pelanggaran. Dengan demikian maka hukuman itu mempunyai dua sifat, yaitu sifat prevensi umum dan sifat prevensi khusus. Kecuali dalam putusan **Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 238/Pid.B/2004/PN.Klt** menjatuhkan hukuman penjara selama 9 tahun atas terdakwa: Irwan Anis Mahsun, yang telah menyiram isterinya (Saksi Korban) Rikha Nia Januanita dengan minyak tanah lalu membakarnya padahal Jaksa hanya menuntut hukuman 3 tahun. Majelis hakim menilai hukuman 9 tahun setimpal dengan perbuatan yang dilakukan. Pertimbangan hakim ini merujuk kepada Teori Absolut (Pembalasan).

Disisi lain pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah *asas kemanfaatan*, hal ini nampak pada penjatuhan putusan hakim dalam perkara KDRT yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari seperti yang tercantum dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2004 dan Pasal 45 Ayat (2).

Dengan mendasarkan pada asas kemanfaatan ini peneliti menyampaikan konsep dalam penyelesaian kasus KDRT *ringan* dan sebagai delik aduan dapat ditempuh lebih dulu upaya non penal berupa mediasi atau penyelesaian di luar pengadilan. Hal ini dapat dilakukan mengingat salah satu tujuan penghapusan KDRT dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 adalah memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Dalam banyak kasus KDRT berakhir dengan perceraian yang tentunya akan membawa dampak bagi pasangan tersebut khususnya anak-anak.

Selama ini mediasi lebih banyak digunakan oleh pengadilan Agama sebagai upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak atas gugatan perceraian yang dilakukan oleh salah satu pihak. Sebelumnya Pengadilan Agama juga memerintahkan agar pasangan yang mengajukan gugatan perceraian tersebut terlebih dulu konsultasi ke BP4 (Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian).

Penyelesaian perkara di Pengadilan Agama (PA) melalui perdamaian merupakan suatu harapan semua pihak. Berdasarkan Hukum Acara yang berlaku, perdamaian selalu diupayakan di tiap kali

persidangan. Bahkan, pada sidang pertama, suami isteri harus hadir secara pribadi, tidak boleh diwakilkan<sup>3</sup>. Hakim sebelum memeriksa perkara lebih lanjut wajib berusaha mendamaikannya, dengan memberi nasihat-nasihat. Namun karena keadaan hubungan suami isteri yang berperkara di pengadilan sudah sangat parah maka upaya perdamaian selama ini tidak banyak membawa hasil. Dari perkara yang masuk ke PA secara nasional selama tahun 2007, sejumlah 217.084, hanya 11.327 perkara yang dicabut. Ini berarti hanya 5,2% yang berhasil damai atau didamaikan<sup>111</sup>.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 01/2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan yang ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2008, ditentukan beberapa hal:

Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan

---

<sup>111</sup>Wahyu Widiana, Upaya Penyelesaian Perkara Melalui Perdamaian Pada Pengadilan Agama, Kaitannya Dengan Peran BP4, [www.badilag.net](http://www.badilag.net), 15 Agustus 2008.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator (pasal 4).

Mengenai kekuatan berlakunya PERMA, disebutkan antara lain bahwa tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan PERMA ini *mengakibatkan putusan batal demi hukum* (pasal 2).

Mediator dapat dipilih seorang atau lebih dari hakim, advokat atau akademisi hukum, profesi bukan hukum yang dianggap menguasai atau berpengalaman dalam pokok perkara (pasal 8). Mediator pada dasarnya wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Jika di suatu wilayah pengadilan, tidak ada yang memiliki sertifikat, maka hakim di lingkungan pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator (pasal 5). Mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan, mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam mediasi dan mencari pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak. Jika diperlukan, mediator dapat melakukan pertemuan dengan salah satu pihak (pasal 15).

Atas dasar kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya perdamaian, baik di tingkat pertama, banding, kasasi dan PK sepanjang perkara itu belum diputus (pasal 21). Sifat proses mediasi adalah tertutup, kecuali para pihak menentukan lain (pasal 6). Materi kesepakatan perdamaian tidak boleh bertentangan dengan hukum, harus dapat dilaksanakan dan tidak boleh memuat iktikad yang tidak baik (pasal 17).

Permasalahannya apakah mediasi dapat digunakan dalam penyelesaian kasus KDRT?

Kasus pidana pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, namun dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan di luar Pengadilan melalui berbagai diskresi aparat atau melalui mekanisme musyawarah/ perdamaian atau lembaga perdamaian yang ada di dalam masyarakat. Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai (walaupun melalui mekanisme hukum adat), namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku.

Dalam RUU KUHP (Pasal 145) Gugurnya kewenangan penuntutan apabila antara lain:

- ada penyelesaian di luar proses;
- telah dibayarnya maksimum pidana denda untuk tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II;
- telah dibayarnya maksimum pidana denda untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara maksimum 1 tahun atau denda maksimum kategori III.

Menurut Barda Nanawi Arief penyelesaian Mediasi dimungkinkan dalam perkara pidana; namun tetap diberi payung/kerangka hukum (*mediation within the framework of criminal law*), diintegrasikan dalam hukum pidana materiel (KUHP) atau hukum pidana formal (KUHP). Mediasi penal dimungkinkan dalam kasus:

1. tindak pidana anak;
2. tindak pidana orang dewasa (ada yang dibatasi untuk delik yang diancam pidana penjara maksimum tertentu);
3. tindak pidana dengan kekerasan (*violent crime*);
4. kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*). Kasus-kasus KDRT (*domestic violence*) juga dapat di mediasi di United States, Austria, Poland, Denmark and Finland.

5. kasus perbankan yang beraspek hukum pidana.<sup>112</sup>

# PROSPEK PERLINDUNGAN KORBAN DI MASA YANG DATANG

BAB

4

## *A. Penal Law Reform*

Salah satu upaya pembangunan hukum yang saat ini dilakukan adalah upaya pembaruan hukum pidana, yang menurut **Sudarto** memiliki arti strategis "karena hukum pidana merupakan pencerminan dari ideologi politik dari suatu bangsa di mana hukum berkembang. Dengan demikian, upaya pembaruannya pun memiliki karakter yang khusus yang mencakup baik aspek politik maupun politik hukum. Sudut pandang politik adalah alasan pertama yang menjadi legitimasinya. Pertimbangan politik ini berujung



pada signifikansi eksistensi KUHP sebagai lambang/symbol kebanggaan kebangsaan sebagai negara yang telah merdeka dan telah melepaskan diri dari penjajahan politik<sup>113</sup>. Barda Nawawi Arief<sup>114</sup> menggunakan istilah restrukturisasi, dalam arti penataan kembali atau menata ulang bangunan system hukum pidana Indonesia. Restrukturisasi sangat dekat dengan istilah rekonstruksi, yaitu membangun kembali system hukum pidana Indonesia melalui upaya pembaharuan/ pembangunan system hukum pidana (*penal system reform/ development; penal reform*). Pembaharuan hukum pidana adalah membangun atau melakukan pembaharuan hukum pidana berupa membangun/ memperbaharui pokok-pokok pemikiran/ konsep/ide-ide dasar, dan bukan sekedar memperbaharui perumusan pasal-pasal secara tektual. Jadi pembaharuan hukum pidana terdiri dari dua segi yang bersinergi yaitu segi pembaharuan secara konseptual hukum pidana dan segi pembaharuan secara fisik –tektual<sup>115</sup>.

Dilihat dari sudut sistem hukum (*legal system*) yang terdiri dari *legal substance*, *legal structure* dan *legal culture*, pembaharuan sistem hukum pidana meliputi: pembaharuan hukum pidana materil (KUHP dan Undang-Undang di luar KUHP, hukum pidana formal (KUHP) dan hukum pelaksanaan pidana; pembaharuan struktur hukum pidana menyangkut pembaharuan/ penataan institusi/lembaga, system manajemen/ tata-laksana dan mekanisme serta sarana/prasaran pendukung dari system penegakan hukum

---

<sup>113</sup> Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kaftan terhadap Pembaruan Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, 1983, h1m. 60-102.

<sup>114</sup> Dalam RUU *Kuhp Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009, hlm. 1

<sup>115</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998

pidana (system peradilan pidana); pembaharuan budaya hukum pidana melipti masalah kesadaran hukum, prilaku hukum, pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana.

Mengenai hal di atas, penulis mengutip pendapat-nya Barda Nawawi Arief<sup>116</sup> yang menyatakan:

1. Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filisopik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia;
2. Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*).
  - a. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan, maka hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Kebijakan social (*social policy*) menurut Barda Nawawi Arief, adalah segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi dalam pengertian “*social policy*” sekaligus tercakup di dalamnya “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat, khususnya upaya penanggulangan kejahatan. Sebagai bagian dari kebijakan penegakkan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya

---

<sup>116</sup>Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hlm, 19

merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakkan hukum. Menurut G.P. Hoefnagels, kebijakan hukum atau kebijakan penegakkan hukum (*law enforcement policy*) ini meliputi juga kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy/politik kriminal*). Hoefnagels mendefinisikan *criminal policy* sebagai *the rational organization of social reaction to crime*. Beberapa ilustrasi tentang *criminal policy* juga diberikan oleh Hoefnagels, seperti: (a) *Criminal policy is the science of responses*; (b) *Criminal policy is the science of crime prevention*; (c) *Criminal policy is a policy of designating human behavior of crime*; (d) *Criminal policy is a rational total of responses to crime*.<sup>117</sup>

- b. Dilihat dari sudut pendekatan nilai, pembaharuan pidana pada hakekatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (re-orientasi dan re-evaluasi) nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substansif hukum pidana yang dicita-citakan.

Nyoman Serikat Putra Jaya mengatakan “Pembaharuan hukum pidana berarti upaya yang terus menerus dilaksanakan melalui perundang-undangan guna menyerasikan peraturan perundang-undangan pidana dengan asas-asas hukum serta nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat baik ditingkat nasional maupun internasional”.<sup>118</sup>

---

<sup>117</sup> *Ibid.*, hlm, 30

<sup>118</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Op. Cit.*, hlm, 20

Menurut Sudarto, secara dogmatis dapat dikatakan, dalam hukum pidana terdapat tiga pokok permasalahan, ialah: Perbuatan yang dilarang; Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu; Pidana yang diancam terhadap pelanggaran larangan itu.<sup>119</sup> Muladi menegaskan salah satunya tujuan pembaharuan hukum pidana adalah dalam rangka peninjauan kembali 3 (tiga) permasalahan utama dalam hukum pidana tersebut yaitu perumusan perbuatan yang dilarang (*criminal act*), perumusan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) dan perumusan sanksi baik berupa pidana (*punishment*) maupun tindakan (*treatment*).<sup>120</sup>

Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga dirumuskan dalam RUU KUHP Tahun 2012 BAB XXIII tentang TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN diletakkan pada Bagian Ketiga dengan judul Kekerasan Dalam Rumah Tangga, berisi:

**Pasal 587**

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka

---

<sup>119</sup> Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, tanpa tahun, hlm 62

<sup>120</sup> Lihat juga Muladi, *Beberapa Catatan Tentang RUU KHUP*, Jakarta, 21 Juli 2004, [http. www/ bphn-depkeham. com](http://www/bphn-depkeham.com), akses: tanggal 28 Juni 2009

berat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori V.

- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami atau istri.

## **Pasal 588**

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami atau istri.

### **Pasal 589**

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami atau istri.

### **Pasal 590**

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V.

### **Pasal 591**

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 589 dan Pasal 590 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut gugur atau matinya janin dalam kandungan atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.

Pengaturan tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan lompatan *mindset* yang sangat membanggakan, mengingat masih kentalnya persepsi masyarakat tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai persoalan privat yang harus diselesaikan secara internal keluarga. Kriminalisasi Kekerasan dalam Rumah Tangga menjadi kejahatan dalam KUHP menunjukkan adanya *good will* pemerintah untuk melaksanakan amanat Deklarasi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Kriminalisasi (*criminalization*) adalah proses untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. Dalam perkembangan selanjutnya kriminalisasi dapat diartikan pula sebagai mengaktualisasikan peraturan hukum pidana agar lebih efektif. Kriminalisasi dapat pula diartikan sebagai usaha untuk memperluas berlakunya hukum pidana.

Konsep "tindak pidana" yang dianut tetap mempertahankan asas legalitas, dengan pengecualian diakuinya secara positif hukum yang hidup atau hukum adat, walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal I RUU, sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa. Apabila terjadi benturan antara keadilan dan kepastian hukum, hakim sejauh mungkin harus mengutamakan rasa keadilan

di atas kepastian hukum, seperti dilukiskan dalam sebuah adagium: "Penegakan hukum tanpa-moral merupakan kezaliman, sebaliknya penegakan moral tanpa hukum merupakan anarki".

Pembaruan hukum pidana yang berorientasi kepada korban (victim oriented) diperlukan sebagai perwujudan penyelenggaraan negara hukum Indonesia di mana semua orang memperoleh akses keadilan (bukan hanya pelanggar) dan sebagai kebijakan yang seimbang (balance) dalam pembaruan hukum pidana. Jadi pembaruan hukum pidana tidak mengutamakan perlindungan kepentingan pelanggar saja dan mengabaikan kepentingan korban, atau mengutamakan perlindungan kepentingan korban dan mengabaikan kepentingan pelanggar, meminjam istilah Groenhuijsen, kebijakan terhadap korban tersebut bukan sebagai priority kepada korban saja tetapi parity kepada pelanggar dan korban.

Perkembangan orientasi hukum pidana, jika semula hukum pidana berorientasi kepada perbuatan (crime) sasarannya adalah prevention of crime, selanjutnya kepada orang (offender) sasarannya adalah treatment of offender, kemudian berkembang kepada korban (victims) sasarannya adalah treatment of victims. Adanya perhatian terhadap korban, sesuai dengan perkembangan dewasa ini agar hukum pidana menghapuskan kesan seolah-olah hanya memanjakan pelaku ketimbang korban. Hal ini merupakan kebutuhan mengingat penderitaan korban kejahatan tidak dihiraukan oleh sistem peradilan pidana. Sisi lain dalam kebijakan terhadap penanggulangan kejahatan melalui sistem peradilan pidana adalah terlalu memfokuskan kepada pelaku kejahatan (*offender centered*) dan tidak dipikirkannya akibat kejahatan pada diri korban dalam setiap pengambilan keputusan. Korban kejahatan mengalami *viktimisasi sekunder* yang disebabkan oleh reaksi formal terhadap kejahatan oleh otoritas sistem peradilan pidana.

Untuk membangun konsep perlindungan terhadap *korban yang komprehensif, perlu dikaitkan dengan*



*konsep pemidanaan sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief<sup>121</sup>, yang bertolak dari keseimbangan antara dua sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan individu, sehingga melahirkan konsep Daad-dader Strafrecht. Perlindungan individu tersebut menurut diperluas ruang lingkupnya, tidak hanya pada offenders oriented tetapi juga pada victims oriented. Victims oriented ini pun diperluas lagi, tidak hanya berorientasi pada potential victims, tetapi juga pada actual victims atau direct victims, sehingga konsep Daad-dader Strafrecht terimplementasi dalam Penjelasan pasal 11 RUU KUHP 2008<sup>122</sup> sudah seharusnya ditinjau ulang dan dikembangkan dengan konsep Daad-dader-slachtoffer Strafrecht.*

*Beberapa Pasal yang ada dalam RUU KUHP yang menunjukkan perhatian terhadap korban adalah Pasal 55 RUU KUHP tentang Pedoman Pemidanaan yang menyebutkan salah satu pertimbangan adalah pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. Selain itu dalam Pasal 67 RUU KUHP tentang Pidana Tambahan disebutkan pula adanya pembayaran ganti kerugian, hanya saja di dalam penjelasan Pasal 67 RUU KUHP tersebut tidak dijelaskan secara rinci mengenai pembayaran ganti kerugian namun hanya diserahkan kepada hakim untuk dapat mempertimbangkan dikenakan terhadap terdakwa.*

*Lebih jauh mengenai perlindungan terhadap korban, di dalam RUU KUHP<sup>123</sup> Pasal 40 dirumuskan (1)*

---

<sup>121</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 98.

<sup>122</sup> Penjelasan Pasal 11 antara lain menyebutkan: Hukum pidana Indonesia didasarkan pada perbuatan dan pembuat tindak pidananya (*daad-dader-strafrecht*) dan atas dasar inilah dibangun asas legalitas dan asas kesalahan.

<sup>123</sup> [www.legalitas.org](http://www.legalitas.org)

*Setiap pelapor atau pengadu yang mengalami, melihat, menyaksikan, atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada Penyidik baik secara lisan maupun secara tertulis.*

Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya, yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa tindak pidana, wajib melaporkan peristiwa tersebut kepada Penyidik dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak mengetahui terjadinya peristiwa tersebut.

*Perumusan yang lebih konkret tentang perlindungan korban adalah ketentuan Pasal 135 RUU KUHP yaitu: (1) Apabila terdakwa dijatuhi pidana dan terdapat korban yang menderita kerugian materiel akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, Hakim mengharuskan terpidana membayar ganti kerugian kepada korban yang besarnya ditentukan dalam putusannya; (2) Apabila terpidana tidak membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harta benda terpidana disita dan dilelang untuk membayar ganti kerugian kepada korban; (3) Apabila terpidana berupaya menghindar untuk membayar kompensasi kepada korban, terpidana tidak berhak mendapatkan pengurangan masa pidana dan tidak mendapatkan pembebasan bersyarat; (4) Dalam penjatuan pidana bersyarat dapat ditentukan syarat khusus berupa kewajiban terpidana untuk membayar ganti kerugian kepada korban; (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyitaan dan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian, nampaknya "otoritas" yang diberika kepada hakim untuk menetapkan ganti kerugian khususnya dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga nampaknya akan mengalami kesulitan sehubungan dengan relasi personal sebagai suami isteri yang memiliki harta bersama, sehingga kalau terjadi penyitaan dan pelelangan termasuk juga bagian harta isteri.*

Seorang Hakim mengatakan ganti kerugian hanya bisa diberikan dalam tindak pidana umum sedangkan dalam KDRT adalah sesuatu yang mustahil dan sulit untuk dilakukan mengingat adanya harta gono gini antara suami isteri.

## **B. Upaya Perbaikan Sistem Peradilan Pidana**

### **1. Membangun sistem hukum yang sensitif jender**

Penanganan kasus KDRT memberi kesimpulan penyebab lemahnya penegakan hukum terhadap KDRT karena sistem hukum, yang meliputi substansi, struktur (kelembagaan dan orang-orangnya atau para penegak hukumnya yaitu para advokat, polisi, jaksa dan hakim termasuk semua orang yang terkait dengan sistem peradilanannya), maupun kultur hukum (sikap atau perilaku masyarakatnya), belum mengakomodir dan peka terhadap persoalan Kekerasan Terhadap Perempuan. Untuk itu perlu dibangun sebuah sistem hukum yang memperlihatkan hubungan setiap komponen dalam sistem hukum, yang satu sama lain saling berhubungan, menuju sistem hukum yang sensitif jender.

Membangun konsep hukum berbasis jender ini sesuai upaya yang dilakukan KOMNAS Perempuan dengan menawarkan konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Jender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP). Kebutuhan dan kepentingan korban dengan mengacu pada nilai-nilai yang adil jender menjadi dasar dari upaya membangun SPPT-PKKTP. Dengan demikian SPPT-PKKTP bertitik tekan pada perspektif korban yang mensyaratkan 'korban menjadi atau diletakkan pada pusat berjalannya sistem peradilan'.

Dengan SPPT-PKKTP, korban akan diposisikan sebagai pelaku utama (subjek), bukan sebagai pelengkap (objek) yang hanya diambil pengakuannya saja. Sebagai subjek ia berhak didengar keterangannya, mendapatkan informasi atas upaya-upaya hukum yang berjalan, dipertimbangkan rasa keadilan yang ingin diperolehnya dan dipulihkan situasi dirinya atas perampasan hak-haknya dan kekerasan yang dialaminya. Hak-hak inilah yang menurut Van Boven dapat dikategorikan ke dalam tiga bagian yaitu: pertama, hak untuk mendapat informasi, kedua, hak atas keadilan, ketiga, hak untuk mendapat reparasi atau hak untuk mendapatkan pemulihan dan pemuasan yang adil terhadap kerugian yang dideritanya<sup>124</sup>. Memposisikan perempuan korban sebagai subjek pada SPPT-PKKTP diharapkan sudah dilakukan sejak terjadinya kasus pada pendampingan dan penanganan pertama terhadap korban (medis, sosial, dan psikologis), penanganan hukum yang meliputi pelaporan kasus ke kepolisian, penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di tingkat peradilan, putusan peradilan, dan eksekusi putusan peradilan.

#### Prinsip-prinsip yang Terkandung dalam SPPT-PKKTP

##### a. Perlindungan dan penegakan atas Hak Asasi Manusia

Konsep SPPT-PKKPT ini dilandasi oleh semangat untuk pemenuhan hak asasi manusia khususnya HAM yang paling mendasar seperti hak hidup, hak atas kebebasan dan hak atas keamanan. Konsep ini dibuat untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap korban.

##### b. Kesetaraan dan keadilan jender

---

<sup>124</sup>Theo Van Boven, Mereka yang menjadi Korban untuk Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi ELSAM, 2000

Jender adalah suatu konsep yang mengacu pada sistem hubungan sosial yang membedakan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakat yang dibangun atau konstruksikan secara sosial dan kultural. Selama ini dalam pelaksanaannya seringkali perempuan menjadi korban dari ketidakadilan jender ini. Oleh karena itu konsep ini harus didasari oleh semangat utama untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan jender khususnya bagi perempuan korban kekerasan. Keadilan jender merupakan suatu kondisi yang adil bagi perempuan dan laki-laki melalui suatu proses kultural dan struktural yang menghentikan hambatan-hambatan aktualisasi bagi pihak-pihak yang oleh karena jenis kelaminnya mengalami hambatan, baik secara cultural maupun secara struktural.

c. Perlindungan terhadap korban

**C. Konsep Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana KDRT** Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan.

Perkembangan nasional awalnya tidak begitu responsif terhadap masalah kepentingan korban. Tetapi dengan berbagai kongres internasional yang membahas masalah *viktim*, tampaknya perhatian terhadap korban tindak pidana mulai terangkat. Seperti diketahui setidaknya ada 3 pertemuan internasional

mengenai tema yang sama, yakni : Kongres di Geneva membahas “*new form and dimensions of crime*”; Kongres di Caracas Tahun 1980 menindaklanjuti tentang *crime and the abuse of power, offences and offenders beyond the reach of law*; lalu kemudian Kongres di Milan Tahun 1985 yang membicarakan *victim of crime, which it connect the new dimentions of criminality and crime prevention in the context of development, convention and non-conventional crime, illegal abuses of economic and public power*. Ketiga Kongres internasional cukup banyak memperhatikan segi korban yang berkaitan dengan perkembangan baru tentang bentuk tindak pidana dan pembangunan, hal mana diperkirakan berkaitan dengan *Declaration on Justice for Victims*. Sehubungan dengan deklarasi ini, negara diharapkan mengemban berbagai tanggungjawab memikirkan kompensasi seperti antara lain membuat program kompensasi bagi korban seperti program asuransi sosial.

**Bambang Poernomo**<sup>125</sup> mengatakan, bahwa dasar alasan negara memberikan kompensasi pada prinsipnya bertolak kepada :

1. Kewajiban negara melindungi warga negaranya;
2. Kemungkinan ketidakmampuan pelaku tindak pidana memberi ganti rugi yang cukup;

---

<sup>125</sup> Bambang Poernomo, *Hukum dan Viktimologi*; Bahan Kuliah pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Pidana Universitas Padjadjaran Bandung, 2001/2002, hlm, 11

3. Sosiologi hukum berpandangan bahwa tindak pidana yang timbul adalah andil kesalahan masyarakat atau tindak pidana sebagai anak kandung masyarakat.

Dimensi ganti-rugi atas penderitaan korban dikaitkan dengan sistem restitusi, yang dalam pengertian viktimologi adalah berhubungan dengan perbaikan atau restorasi atas kerugian fisik, moril, harta benda dan hak-hak korban yang diakibatkan oleh tindak pidana. karakter utama dari restitusi ini berindikasi pertanggungjawaban pembuat atas tuntutan tindakan restitutif yang bersifat pidana dalam kasus pidana, yang dalam pengertian viktimologi adalah berhubungan dengan perbaikan atau restorasi atas kerugian fisik. Perbedaannya dengan kompensasi adalah bahwa kompensasi diminta atas dasar permohonan, dan jika dikabulkan harus dibayarkan oleh masyarakat atau negara. Sedangkan restitusi dituntut oleh korban agar diputus oleh pengadilan dan jika diterima tuntutananya, harus dibayar oleh pelaku tindak pidana itu. Menurut **Bambang Poernomo**<sup>126</sup> karena hakekat perbedaan demikian masih belum direalisasikan dalam kenyataan, maka seringkali tidak ada bedanya antar kedua pembayaran itu, karena yang terpenting perhatian terhadap korban lebih terdahulu kemudian menyusul bentuk pembayaran atas kerugian korban.

---

<sup>126</sup> *Ibid*,

Hal ini juga terlihat dari putusan-putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang penulis teliti, dimana aspek viktimologi dalam putusan-putusan Majelis Hakim tersebut tidak ada. Hal ini lebih disebabkan karena adanya suatu anggapan bahwa dengan telah memidana si terdakwa, maka kepentingan/perlindungan korban sudah terpenuhi.

Menurut **Barda Nawawi Arief** karena mengandung beberapa kelemahan, antara lain :

- a. penetapan ganti rugi ini tidak dapat diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri di samping pidana pokok; ia hanya dapat dikenakan dalam hal hakim bermaksud menjatuhkan pidana bersyarat, jadi hanya sebagai “syarat khusus” untuk tidak dilaksanakan atau dijalaninya pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana;
- b. penetapan syarat khusus berupa ganti rugi inipun hanya dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan;
- c. syarat khusus berupa ganti rugi inipun menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya bersifat fakultatif, tidak bersifat imperatif.

Menurut **Lilik Mulyadi**<sup>127</sup>, ada dua model perlindungan terhadap korban, yaitu

---

<sup>127</sup> Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, hal 122



3. model hak-hak prosedural (*the procedural rights model*) atau di Prancis disebut *partie civil model (civil action system)*. Secara singkat, model ini menekankan dimungkinkan berperanaktifnya korban dalam proses peradilan pidana seperti membantu Jaksa Penuntut Umum, dilibatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara, wajib didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat, dan lain sebagainya.
4. model pelayanan (*the service model*) yang menekankan pada pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi dan upaya pengambilan kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut dan tertekan akibat kejahatan.

Undang-undang P-KDRT merumuskan hak–hak korban terdapat dalam Pasal 10 sebagai berikut:

- 1) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lain, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- 2) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- 3) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;

- 4) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 5) Pelayanan bimbingan rohani.

Hak-hak korban yang dirumuskan pada pasal di atas merupakan hak khusus yang ditujukan untuk korban KDRT, yang semestinya bisa dinikmati oleh semua korban KDRT, baik yang melaporkan adanya kekerasan maupun yang tidak melaporkan. Hak-hak dalam undang-undang tersebut dapat meluas dalam prakteknya seperti yang dikemukakan oleh Achie S. Luhulima, yaitu:

1. Hak perempuan untuk mendapatkan perlindungan aparat yang berwenang atas perilaku yang mungkin akan dilakukan si pelaku yang dilaporkan oleh korban. Jaminan perlindungan sangat penting untuk memastikan bahwa korban tersebut diperlakukan dengan simpatik dan hati-hati oleh penegak hukum, keselamatan dirinya dijamin, sehingga kesaksian yang diberikan dipastikan akan diperoleh untuk menghukum pelaku.
2. Hak untuk mendapat pemulihan medis, yaitu penyembuhan luka fisik yang diderita korban dengan memberikan rujukan ke rumah sakit yang menyediakan pelayanan terpadu bagi korban KDRT psikis, hukum dan sosial, terutama untuk mengembalikan kepercayaan dirinya, serta untuk dapat menjalani prosedur hukum setelah mendapat informasi mengenai prosedur yang akan dijalani dalam proses peradilan pidana.

3. Hak korban untuk memperoleh ganti kerugian atas kerugian yang dideritanya, baik dari pemerintah sebagai organisasi yang berkewajiban memberi perlindungan pada dirinya , maupun dari pelaku kejahatan yang telah menyebabkan kerugian yang luar biasa pada korban. Ketentuan yang memungkinkan korban mendapat ganti kerugian sangatlah kurang, terutama karena ganti kerugian yang diperkenankan adalah yang berkenaan dengan penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Seperti dalam kasus KDRT karena kerugian yang dialami sulit diukur dengan materi.
4. Hak korban untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan keputusan hakim, termasuk pula hak untuk diberitahu apabila pelaku telah dikeluarkan atau dibebaskan dari penjara, kalau dia dihukum karena bukti yang kurang kuat.
5. Pelayanan bimbingan rohani, bimbingan rohani dilakukan oleh pembimbing rohani dengan cara memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajibannya, serta penguatan iman dan takwa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Prospek restitusi dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dilihat dalam pasal berikut:

Pasal 50 Rancangan UU KUHP mengatur mengenai tujuan pemidanaan yaitu :

1. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; Dengan terjadinya tindak pidana, berarti norma hukum yang berlaku dalam masyarakat telah dilanggar sehingga perlu ditegakkan kembali dengan memberi atau menjatuhkan sanksi kepada si pelanggar;
2. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; Hal ini berarti penjatuhan sanksi atau hukuman pada pelaku tindak pidana disamping bertujuan membuatnya jera juga bermaksud membina agar pelaku menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna;
3. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; Hal ini berarti, dengan penjatuhan sanksi atau hukuman pada pelaku tindak pidana, diharapkan konflik yang terjadi akibat tindak pidana dapat hilang dan masyarakat kembali damai;
4. membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Dengan penjatuhan sanksi atau hukuman pada pelaku tindak pidana diharapkan dapat membebaskan pelaku dari rasa bersalah atas tindak pidana yang telah dia lakukan.

Berdasarkan pada tujuan pembedaan di atas, maka dalam pelaksanaan pembedaan, Hakim harus mempertimbangkan beberapa hal yaitu sebagaimana ditentukan di dalam pasal 51 RUU KUHP :

- a. kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. cara melakukan tindak pidana;
- d. sikap batin pembuat tindak pidana;

- e. riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
- f. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- h. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Ketentuan lain yang masih terkait dengan bagaimana RUU KUHP memformulasikan kepentingan korban, menurut hemat penulis dapat dilihat juga ketentuan Pasal 66 RUU KUHP yang berbunyi bahwa dengan mempertimbangkan Pasal 50 dan Pasal 51, pidana penjara sejauh mungkin tidak dijatuhkan jika dijumpai keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. terdakwa berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau di atas 70 (tujuh puluh) tahun;
- b. terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- c. kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;
- d. terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban;
- e. terdakwa tidak mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
- f. tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
- g. korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut;
- h. tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;

- i. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain;
- j. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
- k. pembinaan yang bersifat non-institusional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa;
- l. penjatuan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
- m. tindak pidana terjadi di kalangan keluarga; atau
- n. terjadi karena kealpaan.

Ketentuan yang tertuang dalam Pasal 66 Rancangan UU KUHP di atas, dimaksudkan untuk membantu hakim dalam menentukan takaran pidana yang akan dijatuhkan, dimana dengan mempertimbangkan Pasal 50 dan Pasal 51 RUU KUHP hakim diharapkan dapat menjatuhkan pidana secara proporsional dan efektif, sehingga tujuan pemidanaan dapat diwujudkan.

Berdasarkan Pasal 66 Rancangan UU KUHP tersebut di atas jelas terlihat kurangnya perhatian atau perlindungan pada korban kejahatan dan sebaliknya banyak keadaan-keadaan yang menguntungkan pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana perkosaan tidak akan dijatuhi pidana penjara apabila baru pertama kali melakukan tindak pidana perkosaan, hal ini tentu akan mendorong laki-laki untuk melakukan perkosaan. Pelaku yang telah membayar ganti kerugian kepada korban tidak dipidana penjara, hal ini tidak mengandung

efek jera bagi pelaku perkosaan. Orang kaya akan dengan mudah membayar ganti kerugian dan akan dengan mudah pula terhindar dari pidana penjara.<sup>98</sup>

Pemerintah mulai memperhatikan upaya untuk member perlindungan terhadap korban kejahatan (tindak pidana) yaitu di dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHAP)<sup>99</sup> . Didalam pasal 1 ayat (13) Draf RUU KUHAP didefinisikan, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian nama baik, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Kewajiban Pemerintah untuk member perlindungan terhadap korban, ditentukan di dalam ketentuan Pasal 40 RUU KUHAP, yang intinya, setiap orang atau korban wajib memperoleh perlindungan hukum, berupa perlindungan fisik dan nonfisik. Perlindungan hukum berlaku dalam proses penuntutan dan proses pemeriksaan di siding Pengadilan. Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan perlindungan terhadap korban dibebankan kepada Negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 RUU KUHAP di atas, tampak diketahui adanya *political will* dari Pemerintah untuk memberikan perlindungan secara fisik dan non fisik terhadap korban. Namun persoalannya

---

<sup>98</sup> Tri Wahyu Widiastuti, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Terhadap Korban Perkosaan*, Tesis (tidak dipublikasikan) Universitas Diponegoro, Semarang,

<sup>99</sup> Draf RUU KUHAP yang penulis gunakan adalah Draf RUU KUHAP Tahun 2008

adalah siapa yang secara teknis melaksanakan kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum ini, RUU KUHAP tidak menyebutkan secara tegas.

Perlindungan hukum terhadap korban oleh Pengadilan (oleh Hakim) yaitu dilakukan melalui Putusan Pengadilan tentang ganti kerugian terhadap korban. Artinya, harus dan tidaknya terpidana memberikan ganti rugi terhadap korban, harus berdasarkan putusan Pengadilan.

Hal ini sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 135 RUU KUHAP

- (1) Apabila terdakwa dijatuhi pidana dan terdapat korban yang menderita kerugian materiel akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, Hakim mengharuskan terpidana membayar ganti kerugian kepada korban yang besarnya ditentukan dalam putusannya.
- (2) Apabila terpidana tidak membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harta benda terpidana disita dan dilelang untuk membayar ganti kerugian kepada korban.
- (3) Apabila terpidana berupaya menghindar untuk membayar kompensasi kepada korban, terpidana tidak berhak mendapatkan pengurangan masa pidana dan tidak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (4) Dalam penjatuan pidana bersyarat dapat ditentukan syarat khusus berupa kewajiban terpidana untuk membayar ganti kerugian kepada korban.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyitaan dan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.



Berdasarkan ketentuan Pasal 135 RUU KUHAP di atas, tampak diketahui Hakim diharuskan juga memperhatikan kepentingan korban yaitu kerugian yang diderita oleh si korban sehingga hakim memutuskan, mewajibkan agar si terpidana mengganti biaya kerugian materiel yang diderita oleh si korban. Dalam ketentuan Pasal 135 RUU KUHAP dimungkinkan juga bagi Hakim untuk melakukan upaya paksa yaitu dengan menyita dan melelang harta benda si terpidana untuk membayar ganti kerugian kepada korban.